

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025



**BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh



Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai pertanggungjawaban terhadap anggaran yang sudah dipergunakannya.

LAKIP Tahun 2025 ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memenuhi harapan akan terwujudnya *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam laporan ini pula kami menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk periode Tahun 2025, yang mencakup keberhasilan maupun hambatan yang kami alami, sebagai cerminan dari kesungguhan kami untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan. Secara umum LAKIP ini telah menggambarkan keseluruhan capaian kinerja dan program-program yang dilaksanakan sebagai upaya mencapai dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Karawang, 31 Maret 2026





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) juga 2 RPJMD yaitu RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029, Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD 2021-2026 yaitu 14 (Empat Belas) Sasaran Strategis dan 17 (Tujuh Belas) Indikator Kinerja Utama Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati-Wakil Bupati Karawang Periode 2021-2026 sesuai dengan RPJMD 2021-2026 Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2025, terdapat 4 IKU (23,53%) belum mencapai target, 2 IKU (11,76%) belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang berwenang, 11 IKU (64,7%) sudah mencapai target. Selanjutnya berdasarkan RPJMD 2025-2029 dengan 12 (dua belas) sasaran strategis dan 14 (empat belas) IKU Bupati Karawang sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2025, terdapat 6 IKU (42,8%) belum mencapai target, 8 IKU (57,2%) sudah mencapai target

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran berdasarkan APBD Pada tahun anggaran 2025, berdasarkan pada RPJMD 2021-2026 Rp6.334.624.632.860 dan sampai dengan Desember 2025 dapat terealisasi Rp5.745.368.499.404 atau mencapai 90,7%. Selanjutnya berdasarkan RPJMD 2025-2029 belanja Pemerintah Kabupaten



Karawang sebesar Rp4.898.248.487.539 dan sampai dengan Desember 2025 dapat terealisasi Rp3.878.645.519.910 atau mencapai 79,18%.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Karawang	4
1.2.1. Kondisi Geografis	4
1.2.2. Gambaran Umum Demografis	6
1.2.2.1 Kondisi Ekonomi	7
1.3. Kedudukan, Kewenangan, Dan Struktur Organisasi	17
1.3.1. Kedudukan Dan Kewenangan	17
1.3.2. Struktur Organisasi	18
1.4. Isu – Isu Strategis	22
1.5. Dasar Hukum	23
1.6. Sistematika Pelaporan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Visi Dan Misi Kabupaten Karawang	26
2.1.1 Visi Dan Misi Kabupaten Karawang Berdasarkan RPJMD 2021-2026	28
2.1.2 Visi Dan Misi Kabupaten Karawang Berdasarkan RPJMD 2025-2029	41
2.2 Indikator Kinerja Utama	51
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	57
2.4 Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	71
2.5 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	74
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	79
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	80
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	83
3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2025	106
3.3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan IKU RPJMD 2021-2026	106
3.3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan IKU RPJMD 2025-2029	164
3.4 Realisasi Anggaran	220
3.4.1 Realisasi Anggaran Visi Dan Misi Kabupaten	220
3.4.2 Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Karawang	228
3.4.2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	228
3.4.2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	233
BAB IV PENUTUP	244



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Agregat Kepedudukan Per-Kecamatan (DAK2) Kab. Karawang Semester 2 Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2017 s.d. 2024	8
Tabel 1.3	Produktivitas Tanaman Padi, kedelai, jamur merang, kopi Kabupaten Karawang Tahun 2019 – 2024 (Kw/Ha)	8
Tabel 1.4	Perkembangan Produksi Ternak Tahun 2018 s.d. 2024	9
Tabel 1.5	Nama Kawasan Industri di Kabupaten Karawang	11
Tabel 1.6	Data Perkembangan Investasi di Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2024	11
Tabel 1.7	Perikanan tangkap	12
Tabel 1.8	Perikanan Budidaya	13
Tabel 1.9	Produk Olahan hasil Perikanan	13
Tabel 1.10	Potensi Wisata di Kabupaten Karawang	14
Tabel 2.1	Matriks Misi Kabupaten Karawang RPJMD 2021-2026	30
Tabel 2.2	Matriks Misi Kabupaten Karawang 2025-2029	46
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2021	52
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	55
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	46
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	67
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	84
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	102
Tabel 3.3	Indeks Kesehatan	108
Tabel 3.4	Efisiensi Indeks Kesehatan	109
Tabel 3.5	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kesehatan	109
Tabel 3.6	Indeks Pendidikan	111
Tabel 3.7	Efisiensi Indeks Pendidikan	112
Tabel 3.8	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Pendidikan	113
Tabel 3.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	115
Tabel 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	116
Tabel 3.11	Efisiensi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	117
Tabel 3.12	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	118
Tabel 3.13	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	120
Tabel 3.14	Efisiensi Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	121
Tabel 3.15	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	122
Tabel 3.16	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB	124
Tabel 3.17	Efisiensi Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB	125
Tabel 3.18	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Pertumbuhan Kontribusi	125

	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB	
Tabel 3.19	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	127
Tabel 3.20	Efisiensi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	128
Tabel 3.21	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	129
Tabel 3.22	Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan dalam PDRB	131
Tabel 3.23	Efisiensi Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan dalam PDRB	131
Tabel 3.24	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan dalam PDRB	132
Tabel 3.25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	136
Tabel 3.26	Efisiensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	137
Tabel 3.27	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	137
Tabel 3.28	Indeks Resiko Bencana	140
Tabel 3.29	Efisiensi Indeks Resiko Bencana	140
Tabel 3.30	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Resiko Bencana	141
Tabel 3.31	Rasio Konektivitas	143
Tabel 3.32	Efisiensi Rasio Konektivitas	143
Tabel 3.33	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Rasio Konektivitas	144
Tabel 3.34	Capaian Universal Akses	146
Tabel 3.35	Efisiensi Capaian Universal Akses	147
Tabel 3.36	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Capaian Universal Akses	147
Tabel 3.37	Nilai AKIP	150
Tabel 3.38	Efisiensi Nilai AKIP	150
Tabel 3.39	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Nilai AKIP	151
Tabel 3.40	Opini Audit (Opini BPK)	153
Tabel 3.41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	153
Tabel 3.42	Efisiensi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	154
Tabel 3.43	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	155
Tabel 3.44	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	157
Tabel 3.45	Efisiensi Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	158
Tabel 3.46	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	158
Tabel 3.47	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	161
Tabel 3.48	Efisiensi Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	162
Tabel 3.49	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	162
Tabel 3.50	Indeks Pendidikan	166
Tabel 3.51	Efisiensi Indeks Pendidikan	167
Tabel 3.52	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks pendidikan	167
Tabel 3.53	Indeks Kesehatan	170
Tabel 3.54	Efisiensi Indeks Kesehatan	170
Tabel 3.55	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kesehatan	171
Tabel 3.56	Indeks Kesejahteraan Sosial	173
Tabel 3.57	Efisiensi Indeks Kesejahteraan Sosial	174
Tabel 3.58	IKU yang menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Indeks Kesejahteraan Sosial	174
Tabel 3.59	Capaian Universal Akses	178



Tabel 3.60	Efisiensi Capaian Universal Akses	178
Tabel 3.61	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Capaian Universal Akses	179
Tabel 3.62	Indeks Konektivitas Wilayah	182
Tabel 3.63	Efisiensi Indeks Konektivitas Wilayah	182
Tabel 3.64	IKU yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	183
Tabel 3.65	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186
Tabel 3.66	Efisiensi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	187
Tabel 3.67	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	187
Tabel 3.68	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	190
Tabel 3.69	Efisiensi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	191
Tabel 3.70	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	192
Tabel 3.71	Rasio PDRB Industri Pengolahan	194
Tabel 3.72	Efisiensi Rasio PDRB Industri Pengolahan	195
Tabel 3.73	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Rasio PDRB Industri Pengolahan	195
Tabel 3.74	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	197
Tabel 3.75	Efisiensi Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	198
Tabel 3.76	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	199
Tabel 3.77	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	201
Tabel 3.78	Efisiensi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	202
Tabel 3.79	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	202
Tabel 3.80	Tingkat Pengangguran Terbuka	206
Tabel 3.81	Efisiensi Tingkat Pengangguran Terbuka	206
Tabel 3.82	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Tingkat Pengangguran Terbuka	207
Tabel 3.83	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	211
Tabel 3.84	Efisiensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	211
Tabel 3.85	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	212
Tabel 3.86	Indeks Risiko Bencana	214
Tabel 3.87	Efisiensi Indeks Risiko Bencana	215
Tabel 3.88	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Risiko Bencana	216
Tabel 3.89	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	218
Tabel 3.90	Efisiensi Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	219
Tabel 3.91	IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	219
Tabel 3.92	Capaian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	221
Tabel 3.93	Capaian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	225



Tabel 3.94	Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per SKPD	229
Tabel 3.95	Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD	230
Tabel 3.96	Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Khusus Kecamatan	232



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Good Governance</i>	3
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Karawang	4
Gambar 2.1	Urusan Pemerintahan Daerah	72
Gambar 3.1	Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja	81

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	7
-------------	--	---



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika perkembangan skala global, regional, maupun nasional, saat ini, setiap pemerintahan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Paradigma *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang terutama pasca krisis multidimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya pemerintahan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

Salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan, antara lain dengan mengimplementasikan dengan prinsip-prinsip mendasarinya konsep *Good Governance* transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat secara transparan, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Selain implementasi *Good Governance*, tuntutan dalam era reformasi adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel serta masyarakat yang menuntut kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik (*public goods* dan *public service*). Agar *Good Governance* dan reformasi birokrasi di atas menjadi kenyataan diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak terutama yaitu pemerintah yaitu menjalankan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan integritas, akuntabilitas, transparansi serta profesionalitas, dan etos kerja (kinerja) yang tinggi. Untuk hal itu perlu dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang salah satunya mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Pelaporan Kinerja. Pada tingkat kebijakan pelaksanaan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*.

Selanjutnya Sebagaimana pelaksanaan pada tahun sebelumnya, maka dokumen Laporan Kinerja yang tertuang dalam buku ini akan memuat berbagai informasi berkaitan dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran 2025.

Gambar 1.1
Good Governance



1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

1.2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dimana secara geografis terletak antara 1070,02' - 1070,40' BT dan 50,56' - 60,34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, dengan variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dan kemiringan wilayah 0 - 20,2 - 150, 15 - 400, dan diatas 400.

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, dan laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kab.Cianjur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

Gambar 1.2
Peta Kabupaten Karawang



Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 mdpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit - bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang, sedangkan Sungai Cibeet yang menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor di wilayah selatan. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang memiliki temperatur udara rata - rata 27°C dengan tekanan udara rata - rata 0,01 milibar. Penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi 80%. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.100 – 3.200 mm/ tahun. Pada bulan Januari sampai dengan April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara. Kecepatan angin antara 30 – 350 km/jam, lamanya tiupan rata - rata 5 - 7 jam.

1.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2025 berjumlah 2.666.915 jiwa, dengan perincian data agregat kependudukan per kecamatan di Kabupaten Karawang sebagai berikut :

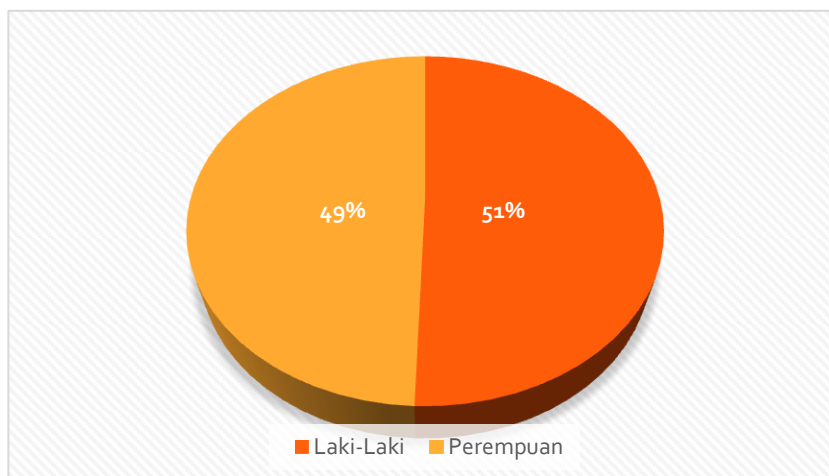
Tabel 1.1
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN (DAK2)
KAB.KARAWANG SEMESTER 2 TAHUN 2025 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	KODE	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	32.15.01	Karawang Barat	88.364	86.926	175.290
2	32.15.02	Pangkalan	21.673	21.588	43.261
3	32.15.03	Telukjambe Timur	75.230	73.982	149.212
4	32.15.04	Ciampel	25.180	24.301	49.481
5	32.15.05	Klari	109.494	107.396	216.890
6	32.15.06	Rengasdengklok	63.215	61.034	124.249
7	32.15.07	Kutawaluya	33.455	32.508	65.963
8	32.15.08	Batujaya	44.503	43.548	88.051
9	32.15.09	Tirtajaya	39.516	38.159	77.675
10	32.15.010	Pedes	43.349	42.133	85.482
11	32.15.011	Cibuaya	29.422	28.150	57.572
12	32.15.012	Pakisjaya	22.706	21.894	44.600
13	32.15.013	Cikampek	64.930	63.144	128.074
14	32.15.014	Jatisari	43.495	42.280	85.775
15	32.15.015	Cilamaya Wetan	43.348	42.029	85.377
16	32.15.016	Tirtamulya	28.369	27.800	56.169
17	32.15.017	Telagasari	36.589	36.508	73.097
18	32.15.018	Rawamerta	29.370	28.862	58.232
19	32.15.019	Lemah Abang	35.085	34.425	69.510
20	32.15.20	Tempuran	35.275	34.935	70.210
21	32.15.21	Majalaya	46.697	45.534	92.231
22	32.15.22	Jayakarta	37.249	35.710	72.959

23	32.15.23	Cilamaya Kulon	36.251	35.724	71.975
24	32.15.24	Banyusari	30.274	29.636	59.910
25	32.15.25	Kota baru	76.256	74.884	151.140
26	32.15.26	Karawang Timur	84.766	82.576	167.342
27	32.15.27	Telukjambe Barat	30.813	30.566	61.379
28	32.15.28	Tegalwaru	21.816	21.273	43.089
29	32.15.29	Purwasari	48.260	47.328	95.588
30	32.15.30	Cilebar	23.795	23.337	47.132
JUMLAH			1.321.284	1.290.781	2.612.065

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang

Diagram 1.1
Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin



1.2.2.1 Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Potensi Pertanian

Komoditas yang dihitung produktivitas nya selama tahun 2025 adalah produktivitas padi, kedelai, jamur merang, kopi dan populasi ternak. Produktivitas padi, kedelai, jamur merang cenderung naik setiap tahun, sementara untuk tanaman kopi jika dibandingkan tahun 2024 dengan tahun 2025 cenderung turun, hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 perubahan iklim (*elnino*) dan ada beberapa hektar yang belum panen.

Tabel 1.2
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah
Tahun 2018 s.d. 2025

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2018	195.353	1.531,567	78,40
2	2019	188.053	1.401.690	74,53
3	2020	184.587	1.370.802	74,26
4	2021	181.469	1.319.011,34	72,69
5	2022	193.816	1.411.330	72,82
6	2023	192.539	1.386.477	72,01
7	2024	197.402	1.386.470	72,24
8	2025	212.517	1.439.910	67,75

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang

Tabel 1.3
Produktivitas Tanaman Padi, kedelai, jamur merang, kopi
Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2025 (Kw/Ha)

NO	KOMODITAS	2024			2025		
		Luas Panen/kgb	Produksi (ton)	Produktivitas (kw)	Luas Panen/kgb	Produksi (ton)	Produktivitas (kw)
1	Padi	197.402	1.386.740,69	70,24	212.517	1.439.910	67,75
2	Kedelai	856	15.290	17,86	17	25.517	15,01
3	Jamur Merang	985	5.660	5,75	858	4.989	5,69
4	Kopi	496	408	8,23	751	371,32	848,14

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Padi Sawah	74,26	72,69	72,82	72,01	70,24	67,75
2	Kedelai (kw/ha)	15,89	17,01	16,47	16,69	17,86	15,01

3	Jamur Merang (kw/kgb)	3,53	4,9	5,09	5,15	5,75	5,69
4	Kopi (ton)	-	8,16	8,24	8,12	8,23	848,14

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang

Tabel 1.4
Perkembangan Produksi Ternak
Tahun 2020 s.d. 2025

No	Jenis Ternak	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Populasi Ternak Besar (ekor)	6.907	6.942	6.368	6.527	6.123	4.119
2	Populasi Ternak Kecil (ekor)	159.970	160.993	152.957	153.994	155.570	115.796
3	Populasi Ternak Unggas (ekor)	72.794.756	73.152.894	73.532.053	73.674.220	73.921.547	14.996.234

Sumber data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada tabel-tabel diatas terlihat perbandingan produktivitas tanaman padi, kedelai, jamur merang, kopi dan populasi ternak pada tahun 2024 dengan tahun 2025. Tanaman padi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten karawang pada tahun 2025 mengalami penurunan produktivitas tetapi dilihat dari luas panen ada peningkatan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

1. Hasil uji ph tanah yang dilakukan di beberapa lokasi menunjukan ph asam, artinya tanah sawah di Kabupaten Karawang mengalami penurunan kesuburan tanah;
2. Tahun 2025 ada serangan hama tikus yang sangat luas (3.228,5 Ha) sehingga panen yang diperoleh sangat sedikit;
3. Disamping serangan hama tikus juga terjadi banjir di beberapa kecamatan, menyebabkan tanam ulang dan gagal panen;

Populasi ternak hewan besar (sapi, Kerbau) mengalami penurunan populasi pada tahun 2025. Hal ini disebabkan keluar masuk hewan besar berkurang karena adanya penyakit mulut dan kuku dan penyakit LSD.

Faktor pendorong tercapainya target produksi Pertanian (kedelai, jamur merang, kopi dan ternak kecil, unggas) adalah, sarana dan prasarana Pertanian cukup, ditambah dengan pendampingan kegiatan berjalan

maksimal, contoh pelatihan-pelatihan, bimtek, sekolah lapang yang dilaksanakan pada kelompok- kelompok tani selama tahun 2025.

2) Potensi Industri

Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 27.128,52 Ha atau 15,47 % dari luas Kabupaten Karawang, terdiri atas:

- a) Kawasan Industri seluas 7.006 Ha (terdiri atas Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari dan Kecamatan Cikampek).
- b) Kawasan Industri Terpadu seluas 743 Ha di Kecamatan Telukjambe Barat.
- c) Kota Industri seluas 1000 Ha di Kecamatan Cikampek.
- d) Kawasan Peruntukan Industri Seluas 18.378,57 Ha (Kecamatan Klari, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Rengasdengklok).

Sampai saat ini pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang dialokasikan pada bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan dan Cikampek. Walaupun begitu tidak semuanya berkembang, terutama yang diperuntukan untuk Kawasan Industri terpadu di Kecamatan Telukjambe Barat seluas kurang lebih 743 Ha, 200 Ha fungsinya sudah dikembalikan pada semula sebagai lahan Perhutani. Lambatnya perkembangan kegiatan industri tersebut diakibatkan terbitnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang mengharuskan kegiatan industri dilakukan di kawasan sehingga mengurangi daya tarik investasi. Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya Kota Industri di bagian timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan Industri (Kecamatan Telukjambe Timur dan Pangkalan), Zona Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Klari, Cikampek dan Karawang).

Kawasan industri di Kabupaten Karawang yang sudah beroperasi sebanyak 23 kawasan, dengan rincian sebagaimana yang terlampir pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Nama Kawasan Industri di Kabupaten Karawang

No	Kawasan Industri	Luas Lahan	Status Izin	Lokasi/Kec
1	Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah)	694.00 Ha	Izin Usaha	Cikampek
2	Kawasan Industri Kujang Cikampek	140.00 Ha	Izin Usaha	Cikampek
3	Kawasan Industri Mitrakarawang	438.90 Ha	Izin Usaha	Ciampel
4	Karawang International Industrial City (PT. Maligi Permata Industrial Estate)	471.72 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Timur
5	Karawang International Industrial City (PT. Karawang Tatabina IE)	621.74 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Timur
6	Karawang International Industrial City (PT. Harapan Anang Bakri & Sons)	100.00 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Timur
7	Suryacipta IE	1398.00 Ha	Izin Usaha	Ciampel
8	Kawasan Industri Artha Industrial Hill (PT. Daya Kencanasia)	135.12 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Barat
9	Kawasan Industri Artha Industrial Hill (PT. Karawang Cipta Persada)	180.00 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Barat
10	Taman Niaga Karawang Prima / GT Tech Park	400.00 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Barat
11	Karawang New Industrial City	204.80 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Barat
12	Pertiwi Lestari Industrial Estate	791.26 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Barat
13	Karawang Jabar Industrial Estate	400.00 Ha	Izin Usaha	Telukjambe Barat

Sumber : DPMPTSP tahun 2025

Tabel 1.6
Data Perkembangan Investasi di Kabupaten Karawang
Tahun 2018 – 2024

No	Tahun	Jumlah Investasi (Rp. Triliyun)
1.	2018	20.023
2.	2019	24,296
3.	2020	16.739

4.	2021	26.632
5.	2022	28.854
6.	2023	40.243
7.	2024	42,664

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Karawang

3) Potensi Perikanan

Kabupaten Karawang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Untuk bidang perikanan tangkap, Kabupaten Karawang memiliki potensi ikan yang beraneka ragam serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Keadaan ini didukung oleh panjang pantai yang dimiliki yang terbentang di bagian utara sepanjang 84,23 km. Sumber perikanan di Kabupaten Karawang berasal dari:

a. Perikanan tangkap

Tabel 1.7
Perikanan tangkap

Uraian Description	Produksi (ton) Production (ton)	Nilai Produksi Value of Production (000 Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1. Perikanan Tangkap / Capture Fisheries	9.473,68	206.930.963
a. Laut / Marine Fisheries	9.403,51	205.873.954
b. Perairan Umum / Inland Water	70,17	1.057.009
1) Sungai / River	24,70	337.929
2) Genangan Air Lainnya/ Another Puddle	43,33	683.374
3) Rawa / Swamp	2,14	35.706

Sumber : Dinas Perikanan 2025

b. Perikanan budidaya

Untuk bidang perikanan budidaya, Kabupaten Karawang memiliki potensi perikanan air payau dan perikanan air tawar yang cukup besar. Potensi perikanan budidaya tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.8
Perikanan Budidaya

2. Perikanan Budidaya / <i>Aquaculture</i>	46.715,09	1.522.442.297
a. Tambak / <i>Brackish Water Pond</i>	41.494,60	1.418.313.050
b. Kolam / <i>Fresh Water Pond</i>	4.835,53	96.146.351
c. Sawah (Minipadi) / <i>Paddy Field</i>	82,72	1.791.112
d. Jaring Apung/KJA / <i>Floating Cage Net</i>	302,24	6.191.784

Sumber : Dinas Perikanan 2025

- c. Produk olahan hasil perikanan

Tabel 1.9
Produk Olahan hasil Perikanan

NO	URAIAN	PRODUKSI	NILAI PRODUKSI (000 rupiah)
1	Pemindangan	26.416,33	449.077.610
2	Pengeringan/penggaraman	11.119,11	333.573.300
3	Terasi	7.873,73	314.949.200
4	Pelumatan Daging	4.018,48	112.517.440
5	Rumput Laut	2.177,99	21.779.900
6	Pengolahan lainnya	5.084,47	172.871.980

Sumber : Dinas Perikanan 2025

4) Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Karawang sangat menjanjikan untuk dibangun. Karawang memiliki jenis tujuan wisata yang bervariasi, lebih dari 78 tujuan wisata tersebar di wilayah Kabupaten Karawang yang dapat dikategorikan kedalam wisata budaya, wisata sejarah, wisata tirta, wisata alam, wisata keagamaan dan wisata kuliner, Sebagai berikut :

Tabel 1.10
Potensi Wisata di Kabupaten Karawang

Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
Objek Wisata Budaya	1. Situs Batujaya, terdiri atas Situs Segaran 1 s/d 8 dan Situs Telagajaya 1 s/d 8 2. Kawasan Candi Batujaya 3. Situs Cibuaya, terdiri atas Situs Lanang dan Situs Wadon 4. Situs Kebonjambe	Kecamatan Batujaya Kec.Cibuaya Kec. Tegalwaru
Objek Wisata Sejarah	1. Makam Mantan para Bupati Karawang 2. Kawasan Kuta Tandingan 3. Petilasan Tubagus Rangin 4. Petilasan Joko Tingkir 5. Makam Syech Quro 6. Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok 7. Rumah Djiouw Ki Siong 8. Monumen Rawa Gede 9. Monumen Suroto Kunto 10. Monumen Resimen V Cikampek 11. Taman Makam Pahlawan 12. Peristiwa Gunung Goong 13. Peristiwa Rawasikut 14. Peristiwa Karawang	Kec. Cilamaya Kulon Kec.Ciampel Kec. Kutawaluya Kec. Rawamerta Kec. Lemah Abang Kec. Rengasdengklok Kec. Rawamerta Kec. Karawang Timur Kec. Cikampek Kec. Purwasari Kec. Pangkalan Kec. Telagasari Karawang dan Sekitarnya.
Objek Wisata Tirta, berupa danau buatan dan kolam renang	1. Situ Kamojing 2. Kolam Renang Tirtasari 3. Bendungan Parisdo Walahar 4. Kolam Renang Sportif 5. Kolam Renang PD Prakasa 6. Kolam Renang Permata Rubi 7. Situ Cipule 8. Danau San Diego Hills 9. Kolam Renang PT. Bukit Muria Jaya Resinda 10. Kolam Renang Mutiara 11. Kolam Renang DG'S Pool Waterboom 12. Kolam Renang PKPRI KGL 13. Kolam Renang Tirtakencana 14. Kolam Renang Tirta Ilani 15. Wahana Bermain Batu Tumpang Adventure Camp 16. Kampung Wisata Curug Cigentis 17. Waterpark Wonderland 18. Kampung Budaya Gerbang Karawang	Kec. Cikampek Kec. Klari Kec. Karawang Barat Kec. Ciampel Kec. Telukjambe Barat Kec. Telukjambe Timur Kec. Rengasdengklok Kec. Lemahabang Kec. Jatisari Kec. Cilamaya Kulon Kec. Tegalwaru Kec. Telukjambe Timur

Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
Objek Wisata Alam, Berupa Alam Pegunungan dan Pantai	1. Curug Bandung 2. Curug Peuteuy 3. Curug Cigentis 4. Curug Lalay 5. Curug Cipanundaan 6. Curug Santri 7. Curug Cikoleangkak 8. Gunung Sanggabuana 9. Pantai Tanjungpakis 10. Pantai Samudra Baru 11. Pantai Tanjung Baru 12. Pantai Pasir Putih 13. Buana Wisata Cikeong 14. Green Canyon 15. Wisata Puncak Sempur 16. Wisata Pohon Pinus 17. Pantai Tangkolak dan Ekowisata Mangrove 18. Kebon Kembang	Kec. Tegalwaru Kec. Pakisjaya Kec. Pedes Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cilamaya Wetan Kec. Tirtajaya Kec. Pangkalan Kec. Tegalwaru Kec. Ciampel Kec. Cilamaya Wetan Kec. Cikampek
Objek Wisata Keagamaan, berupa tempat-tempat peribadatan	1. Mesjid Agung Karawang (tempat beribadah agama islam) 2. Vihara Sian Ji Kupoh (tempat peribadatan agama Kong Hu Chu/Umat Budha) 3. Gereja Immanuel (tempat peribadatan agama Kristen Protestan) 4. Gereja Sion (Tempat Peribadatan agama Kristen Katolik) 5. Candi Jiwa (tempat pemujaan agama Budha) 6. Makam Syekh Quro (Tempat/Makam/Petilasan penyebaran agama islam) 7. Gereja Kristus Raja Karawang (tempat peribadatan agama Katolik)	Kec. Karawang Barat Kec. Batujaya Kec. Lemahabang Kec. Karawang Barat
Objek Wisata Kuliner	1. Bolu Kijing 2. Opak Kawung, Nasi Tangkar, Telor Asin, Semprong Mondy 3. Pemancingan Rio 4. Kupat Tahu, Sangu Tahu/Sangtau 5. Pepes Jambal Walahar 6. Sorabi Hijau, Kerupuk Udang dan Kue Semprong 7. Saung Beureum 8. Pemancingan dan Restoran Saung Endah 9. Saung Kabayan	Kec. Kutawaluya Kec. Karawang Barat Kec. Klari Kec. Rengasdengklok Kec. Karawang Timur Kec. Telukjambe Timur



Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
	10. Resto Alam Sari Interchange 11. Pemancingan Ajo 12. Rumah Makan Cibiuk 13. Rumah Makan Sindang Reret 14. Restoran Lebaksari Indah 15. Telaga Resto 16. Restoran Danau Bukit Indah Alamsari Opak Cibuaya	Kec. Cikampek Kec. Cibuaya

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

1.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi daerah-daerah dan juga bagi hubungan pusat dan daerah. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah memberi warna baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Melalui penitikberatan otonomi daerah di level Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemberian kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikannya sebagai dasar guna peningkatan keberdayaan, kesejahteraan dan daya saing daerahnya masing-masing. Dalam kaitan ini, untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu dibentuk organisasi perangkat daerah sesuai koridor hukum yang berlaku.

Di Kabupaten Karawang, berpijak pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tahun 2016 hingga disusunnya dokumen ini, telah membentuk perangkat daerah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang.

Keberadaan dan pembentukan perangkat daerah merupakan salah satu bentuk operasionalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakekatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam konteks pelayanan sebagai salah satu fungsi hakiki pemerintahan, pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapat membuat penyediaan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat terjadi terutama karena

melalui otonomi terjadi optimalisasi hierarki dalam penyampaian layanan akibat dari penyediaan pelayanan publik dilakukan oleh institusi yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat lebih mudah dibuat, juga karena adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayahnya.

1.3.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tahun 2016 hingga disusunnya dokumen ini, telah membentuk perangkat daerah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 19 Dinas Daerah, 5 Badan, 30 Kecamatan dan 12 Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Lembaga Lain yang sebelumnya dibentuk oleh Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2015 yaitu : Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap dipertahankan. Kemudian pada Tahun 2021 dilakukan Perubahan Peraturan Daerah dengan terbitnya Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah tipe A ;

- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban Umum;
 - 6) Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang kehutanan;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 13) Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - 15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan

fungsi pelayanan terpadu satu pintu;

- 17) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 18) Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - 19) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; dan
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Karawang Barat tipe A;
 - 2) Kecamatan Telukjambe Timur tipe A;
 - 3) Kecamatan Ciampel tipe A;
 - 4) Kecamatan Klari tipe A;
 - 5) Kecamatan Rengasdengklok tipe A;
 - 6) Kecamatan Cikampek tipe A;
 - 7) Kecamatan Cilamaya Wetan tipe A;
 - 8) Kecamatan Tirtamulya tipe A;
 - 9) Kecamatan Majalaya tipe A;
 - 10) Kecamatan Kota baru tipe A;
 - 11) Kecamatan Karawang Timur tipe A;

- 12) Kecamatan Telukjambe Barat tipe A;
- 13) Kecamatan Purwasari tipe A;
- 14) Kecamatan Pangkalan tipe B;
- 15) Kecamatan Kutawaluya tipe B;
- 16) Kecamatan Batujaya tipe B;
- 17) Kecamatan Tirtajaya tipe B;
- 18) Kecamatan Pedes tipe B;
- 19) Kecamatan Cibuaya tipe B;
- 20) Kecamatan Pakisjaya tipe B;
- 21) Kecamatan Jatisari tipe B;
- 22) Kecamatan Telagasari tipe B;
- 23) Kecamatan Rawamerta tipe B;
- 24) Kecamatan Lemahabang tipe B;
- 25) Kecamatan Tempuran tipe B;
- 26) Kecamatan Jayakarta tipe B;
- 27) Kecamatan Cilamaya Kulon tipe B;
- 28) Kecamatan Banyusari tipe B;
- 29) Kecamatan Tegalwaru tipe B;
- 30) Kecamatan Cilebar tipe B.

g. Kelurahan, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Karawang Kulon
- 2) Kelurahan Adiarsa Barat
- 3) Kelurahan Tanjungpura
- 4) Kelurahan Tanjungmekar
- 5) Kelurahan Tunggakjati
- 6) Kelurahan Karangpawitan
- 7) Kelurahan Nagasari
- 8) Kelurahan Mekarjati
- 9) Kelurahan Karawang Wetan
- 10) Kelurahan Adiarsa Timur
- 11) Kelurahan Palumbonsari
- 12) Kelurahan Plawad

1.4. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Karawang; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Karawang; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Karawang; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Karawang; dan (5) KLHS RPJMD. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Karawang adalah :

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.
2. Membangun Ekonomi Kerakyatan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities di destinasi pariwisata prioritas. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif.
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Reformasi birokrasi pelayanan publik dan penyelenggaraan *e-government*.
4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
Pembangunan di Kabupaten Karawang perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung Lingkungan hidup, penanganan persampahan, kerentanan bencana dan perubahan iklim.
5. Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan Infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

1.5. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2024 adalah :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Karawang Tahun 2021-2026; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Karawang Tahun 2025-2029.

1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Karawang, Indikator Makro, Struktur organisasi, Isu-isu strategis yang berpengaruh, Dasar Hukum serta Sistematika Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja tahun 2025, Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Karawang, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, ***Kajian Lingkungan Hidup Strategis*** dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk ***menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi***

program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda, menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dan mengantisipasi program dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Selain itu, RPJMD Kabupaten Karawang juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD Kabupaten Karawang bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN RPJMD 2021-2026

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah “Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”.

Kata kunci dari visi ini adalah : (1) Mandiri, (2) Bermartabat, (3) Sejahtera. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya:

1. Mandiri

Mandiri mengandung makna sikap dan mental Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.

2. Bermartabat

Bermartabat mengandung makna kedudukan yang menjadi kehormatan bagi Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional.

3. Sejahtera

Sejahtera mengandung makna makmur, terlepas dari segala macam kesulitan dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat Karawang, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur pendukung serta lingkungan hidup yang terjaga.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut.

1. Misi Pertama : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

2. Misi Kedua : **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal”**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

3. Misi Ketiga : **“Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

4. Misi Keempat : **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 4 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Karawang.

Tabel 2.1
Matriks Misi Kabupaten Karawang

Misi I : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam berpendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pendidikan, sarana dan prasarana sebagaimana SPM pendidikan, mengurangi usia anak sekolah yang tidak sekolah, dan beasiswa pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu peningkatan partisipasi sekolah PAUD usia 5-6 tahun, pendidikan SD, SMP dan penduduk usia 15-18 tahun di kesetaraan
		Meningkatkan budaya literasi membaca dikalangan masyarakat dalam rangka	Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan minat baca

		meningkatkan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan pelayanan digitalisasi perpustakaan sehingga mampu mengakses perpustakaan	
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan kelompok pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan pemuda dan olahraga difokuskan pada pemberdayaan pemuda dan pencarian bibit atlet sejak dini
	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya promotif dan preventif, meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dengan prioritas mencapai SPM bidang Kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan <i>universal health coverage</i>	Pembangunan layanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan 12 SPM bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan sesuai protokol kesehatan, budaya perilaku hidup bersih dan sehat
		Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan partisipasi KB MKJP, peningkatan peran laki-laki dalam berKB, peningkatan media	Pengendalian penduduk difokuskan pada pengaturan kelahiran dan menuju pertumbuhan penduduk 1%

		kampanye dalam peningkatan Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera	
	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan implementasi PUG dan PUHA dalam pembangunan, penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak, mengembangkan pemberdayaan perempuan rentan, meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak
Meningkatnya kesejahteraan dan jaminan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Penanganan pengangguran melalui peningkatan kesempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, peningkatan kerja sama dengan pasar kerja, dan penempatan transmigrasi	Penanganan pengangguran difokuskan pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja, peningkatan pemuda wirausaha
		Meningkatkan peran desa dan kelurahan dalam pembangunan melalui peningkatan penataan administrasi desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, peningkatan	Pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dalam mendukung prioritas pembangunan



		kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan, peningkatan kualitas RKPDes dengan APBDes	daerah, peningkatan pemberdayaan dan sarana prasarana desa dan kelurahan
		Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan melalui peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan peran koperasi dalam permodalan usaha mikro	Fokus pembangunan koperasi dan UMKM adalah pemberdayaan usaha mikro dan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai penyedia modal bagi usaha mikro
		Meningkatkan penanganan PMKS melalui pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas kelembagaan penanganan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas data penduduk miskin	Peningkatan penanganan PMKS difokuskan pada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan di luar panti sesuai dengan SPM Bidang Sosial

Misi II : Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------



Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Peningkatan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas produk pertanian, produktivitas pertanian, mempertahankan sawah lestari, peningkatan teknologi pertanian, kualitas dan kesejahteraan petani	Peningkatan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kualitas produksi pertanian unggulan, peningkatan kesejahteraan petani
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan dan keamanan , keanekaragaman pangan	Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada pola pangan harapan yang baik dengan pemanfaatan pekarangan dalam ketersediaan pangan.
		Peningkatan kontribusi perikanan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas tangkapan nelayan, kualitas budidaya perikanan, peningkatan pemasaran hasil pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Peningkatan pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada produksi budidaya dan pengolahan hasil perikanan
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah melalui peningkatan daya tarik wisata pengembangan desa wisata, peningkatan promosi wisata, dan peningkatan kerjasama wisata	Peningkatan kunjungan wisata difokuskan pengembangan daya tarik destinasi wisata, pengembangan desa wisata dengan pembangunan tempat <i>instagramable</i>



		dengan daerah sekitar	
		Peningkatan sektor usaha kreatif melalui peningkatan kualitas ekonomi kreatif, pengembangan 16 sektor usaha kreatif	Peningkatan ekonomi kreatif difokuskan pada pengembangan usaha mikro dan
		Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya, kesenian tradisional	peningkatan pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya benda maupun tak benda
		Peningkatan pelaku usaha dalam penyediaan barang pokok dan barang penting dalam konsep ekonomi kerakyatan melalui peningkatan peran pasar sebagai sarana distribusi, peningkatan akses ekspor, peningkatan perlindungan terhadap konsumen.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan difokuskan pada perbaikan sarana distribusi perdagangan dan peningkatan produk pelaku usaha
	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pembangunan ekonomi	Peningkatan kontribusi industri pengolahan dengan peningkatan klaster industri sebagai penyangga kawasan industri dan peningkatan promosi perindustrian	Pengembangan industri pengolahan dengan fokus pengembangan klaster industri , penguatan industri kecil dan peningkatan investasi
		Peningkatan pertumbuhan investasi melalui peningkatan	peningkatan realisasi investasi dengan fokus mempermudah

		promosi investasi, mempermudah akses pelayanan penanaman modal berbasis teknologi	akses pelayanan perijinan , memperkuat mall pelayanan publik
--	--	---	--

Misi III : Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanganan pencemaran udara, air dan tanah, peningkatan ruang terbuka hijau dalam rangka peningkatan konservasi lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	Penanganan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah 3R
	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Peningkatan kualitas penanganan bencana dan mengurangi resiko kerugian akibat bencana melalui peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana, penyediaan	Penanganan dan pencegahan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana berbasis teknologi

		roadmap kesiapsiagaan bencana, perlengkapan logistik penanganan bencana dan peningkatan kelurahan/ desa tangguh bencana	
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Pengurangan genangan air di permukiman melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi, penanganan erosi di sempadan sungai	Peningkatan konektivitas wilayah difokuskan pada peningkatan dan pembangunan jalan dan drainase, dan peningkatan sarana pengendali banjir (kualitas irigasi sekunder dan pengendali SDA), peningkatan pelayanan transportasi massal aman dan nyaman
		Peningkatan kualitas konektivitas wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, drainase, jembatan, jaringan jalan, kualitas angkutan massal, perlengkapan jalan, sarana dan prasarana angkutan	
		Peningkatan ketaatan terhadap RTRW melalui peningkatan informasi, penegakan RTRW, penyusunan RDTRK, RTBL	Peningkatan ketaatan RTRW difokuskan pada penegakan perda RTRW
	Tercapainya universal akses	Peningkatan cakupan	Peningkatan akses air bersih



	(Kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	universal akses melalui peningkatan peran SPAM baik dikelola BUMD, maupun PAMSIMAS dalam peningkatan sambungan ke rumah, peningkatan pengelolaan limbah domestik komunal dalam peningkatan akses sanitasi	dan limbah domestik difokuskan pada pencapaian SPM bidang PU PR
		Penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni akibat bencana dan dampak program, penyediaan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kumuh di luar 10.000 ha, penanganan kumuh sesuai dengan SK kumuh yang ditetapkan, penyediaan kawasan permukiman dengan PSU yang baik	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada penanganan SPM bidang perumahan dan penanganan kumuh dibawah 10.000 ha

Misi IV : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran, pembangunan berbasis elektronik dan kemudahan pelayanan publik
		Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset	Fokus pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pengawasan dan kepegawaian
		Peningkatan pengawasan yang berjenjang dan ketat dilakukan melalui peningkatan kualitas APIP, maturitas SPIP dan peningkatan kualitas pengawasan.	
		Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta	



		peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian	
	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan fokus perwujudan <i>smart city</i>
		Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data , peningkatan keamanan informasi penting	
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat melalui penegakan perda/perbup dengan HUMANIS, peningkatan patroli di daerah rawan, penanganan kebakaran sesuai	Penanganan keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat difokuskan pada pelaksanaan SPM bidang trantibun, kebakaran dan toleransi

		dengan SOP	
		Penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial dengan peningkatan kesadaran bela negara, cinta kepada negara, peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, peningkatan kehidupan sosial, politik dan pencegahan penggunaan NARKOBA	

2.1.3 VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN RPJMD 2025-2029

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku- kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah **“Kabupaten Karawang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”**.

Kata kunci dari visi ini adalah : (1) Unggul, (2) Maju, (3) Berkelanjutan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Unggul

Mewujudkan Kabupaten Karawang 2045 dengan menaikkan posisinya dalam ketahanan pangan dan resiliensi secara ekonomi dan sosial, bukan hanya untuk kesejahteraan penduduknya, akan tetapi untuk pengembangan ekonomi-sosial negara secara keseluruhan. Diperlukan 3 langkah utama antara lain: 1) Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi; 2) Berkolaborasi dengan mitra global yang sudah mapan untuk memperoleh transfer teknologi dan litbang; dan 3) Pengembangan UMKM berwawasan global untuk tumbuh menjadi Industri Kecil dan Menengah yang tangguh, UMKM perlu meningkatkan akses ke pasar, baik domestik maupun ekspor, dan kemampuan untuk menarik talent pool yang jauh lebih kuat.

2. Maju

Terwujudnya Kabupaten Karawang menjadi daerah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih unggul dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan lebih unggul dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan inovasi. Dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan termanifestasi dalam komitmen Kabupaten Karawang dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk pengurangan pencemaran, pelestarian hutan dan air, serta pengembangan energi terbarukan.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran

visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Kabupaten Karawang tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2025 - 2029 pada RPJPD Kabupaten Karawang 2025 - 2045, termasuk menjaga konsistensi dengan Asta Cita yang ada di RPJMN 2025 - 2029. Berikut ini adalah rumusan lengkap dari misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029:

1. Misi Pertama : **“Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter”**

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor-sektor yang akan dikembangkan seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Karawang yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan investasi yang besar dan berjangka panjang. Namun harus dilakukan karena, keluaran atau hasil dari investasi tersebut adalah SDM yang berkualitas yang menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pembangunan Kabupaten Karawang yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang juga memiliki banyak kekhasan sosial dan budaya serta bentuk lokalitas lainnya. Kekhasan tersebut harus perhatian utama saat pembangunan daerah dilaksanakan, sehingga akan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Di sisi lain, SDM Kabupaten Karawang juga menghadapi tantangan akibat perubahan zaman, globalisasi termasuk perkembangan teknologi (kecerdasan buatan).

2. Misi Kedua : **“Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi”**

Penyediaan infrastruktur, sarana dan fasilitas kewilayahan yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Karawang juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya

dukung prasarana dan sarana yang memadai. Sistem prasarana dan sarana yang baik, khususnya transportasi secara langsung akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun rumah tangga. Penurunan pengeluaran ini akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan anggarannya ke jenis pengeluaran produktif maupun konsumsi lainnya, sehingga secara berantai ekonomi akan hidup dan tumbuh. Pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan lainnya perlu diwadahi dalam sistem perkotaan dan perdesaan yang efisien dan memiliki daya dukung yang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh kapasitas prasarana dan sarana wilayah yang mencukupi. Prasarana dan sarana tersebut mencakup energi, telekomunikasi, internet, transportasi, sistem utilitas dan lainnya. Sistem infrastruktur wilayah di Kabupaten Karawang juga harus didesain secara inklusif agar bisa dimanfaatkan seluas mungkin oleh seluruh masyarakat. Secara fisik, desain infrastruktur harus mudah digunakan oleh kelompok anak, perempuan, masyarakat lanjut usia hingga kelompok disabilitas. Infrastruktur dan sistem transportasi yang baik juga akan menjamin akses masyarakat ke pusat pelayanan yang ada. Sistem ini diharapkan juga akan mengatasi kesenjangan wilayah serta memperkuat konektivitas antar wilayah di dalam Kabupaten Karawang serta antara Kabupaten Karawang dengan wilayah lain, terutama dengan memanfaatkan KJCB, kereta api dan jalan tol.

3. Misi Ketiga : **“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif”**

Pengembangan ekonomi di Karawang tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Karawang serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Kabupaten Karawang akan fokus pada 2 (dua) sektor unggulan (yang sudah berkembang dan menjadi basis selama ini), yaitu industri (yang melibatkan investasi besar dan merupakan industri manufaktur) dan pertanian. Sektor-sektor lainnya yang terkait juga harus ikut berkembang agar dapat terjadi keterkaitan usaha (rantai bisnis atau rantai pasok) di Kabupaten Karawang sehingga daerah setempat dapat menikmati nilai tambahnya.

Pengembangan rantai pasok dalam sistem ekonomi lokal menjadi sangat penting. Rantai pasok tersebut dapat berwujud antara industri manufaktur yang ada dengan UMKM atau IKM setempat, sebagai pemasok komponen maupun terlibat dalam

kegiatan ikutan lainnya. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata juga harus dikembangkan hingga skala industri dan saling melibatkan dengan UMKM setempat. Diharapkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Karawang akan menjadi sebuah ekosistem dan satu rantai pasok yang lengkap.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya keterlibatan UMKM dalam ekonomi daerah. Keberlanjutan juga dapat dibangun jika lingkungan tetap terjaga dan terjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang harus sebanding dengan pembukaan lapangan kerja secara luas dan menurunkan tingkat kemiskinan setempat. Usaha padat modal dan UMKM perlu dikembangkan sebagai klaster ekonomi yang saling terkait. Oleh sebab itu Kabupaten Karawang harus terbuka dan ramah terhadap investasi. Para investor dan pelaku usaha juga harus dijamin keamanan dan kepastian hukumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya partisipasi kuat dari UMKM serta kepercayaan investor yang kuat sekaligus juga akan menunjukkan daya saing daerah.

4. Misi Keempat : **“Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”**

Kabupaten Karawang memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Kabupaten Karawang yang tangguh menghadapi bencana (resilien). Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pembangunan di Kabupaten Karawang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hijau, ramah lingkungan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Pembangunan di Karawang harus pada konteks melindungi lingkungan, mempromosi penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

5. Misi Kelima : **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif”**

Indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah tingkat kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja

aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari 4 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Karawang.

Tabel 2.2
Matriks Misi Kabupaten Karawang

Misi 1 : Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan akses serta kualitas sarana prasarana pendidikan daerah	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan daerah untuk menghasilkan SDM daerah yang berkualitas dan berkompeten
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Mewujudkan budaya hidup sehat dan kecukupan makanan bergizi pada masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan



			derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi
		Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan kesehatan pada siklus hidup manusia	
Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Meningkatkan kapasitas sistem jaminan sosial yang luas, merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat	Penyediaan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat
		Menyediakan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak dasar (kesehatan, pendidikan, hunian layak dan murah serta hak dasar lainnya) bagi berbagai kelompok rentan dan seluruh masyarakat lainnya secara merata dalam rangka pembentukan masyarakat yang sejahtera	
		Menyediakan fasilitas pemberdayaan pemuda dan perempuan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan



			partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		Membentuk ketahanan sosial pada masyarakat dan keluarga	

MISI II : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Menyediakan infrastruktur wilayah yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkotaan dan perdesaan	Penyediaan infrastruktur, penataan dan pengelolaan kawasan dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang efisien dan inklusif
		Meningkatkan keterpaduan dan tertib tata ruang wilayah	
		Menciptakan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan berkelanjutan	
	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Membangun jaringan jalan di seluruh wilayah dan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan dan rel nasional dan regional	Peningkatan sistem pergerakan atau distribusi penumpang dan barang secara dan terintegrasi dan efisien
		Menyediakan sistem transportasi untuk penumpang dan barang yang melayani seluruh wilayah dan terintegrasi dengan sistem transportasi nasional dan regional	

Misi III : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Meningkatkan ekosistem usaha pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan produksi, nilai tambah dan kontribusi sektor	Pengembangan dan revitalisasi sektor pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan kontribusi kedua sektor ke ekonomi daerah dan mendukung ketahanan pangan
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang bersumber pada pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan setempat	
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Meningkatkan kualitas dan efektivitas promosi investasi di bidang industri yang didukung oleh iklim dan layanan investasi untuk industri dan ekosistem pendukungnya, termasuk sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan dan pengembangan kawasan perkotaan	Peningkatan investasi sektor industri, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan dan revitalisasi sektor industri, termasuk pengembangan ekosistem dan rantai pasok usaha industri dan sektor ekonomi lainnya
		Fasilitasi pengembangan industri yang bernilai tambah tinggi, mendukung ekonomi hijau, serta memiliki multiplier terhadap kesejahteraan masyarakat	
		Fasilitasi iklim perdagangan daerah terutama untuk mendukung ekspor	
		Mengembangkan potensi	

		UMKM, BUMD, BUMDes, dan koperasi serta wirausaha daerah untuk menjadi bagian rantai pasok kegiatan usaha di daerah	
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Meningkatkan daya tarik dan destinasi pariwisata berbasis alam, warisan sejarah, budaya dan perkotaan dan MICE	Percepatan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan MICE
		Mengembangkan nilai budaya dan seni lokal serta kreativitas para pelaku di bidang budaya dan pariwisata	
		Mengembangkan ekosistem pariwisata daerah yang berkelanjutan	
		Menguatkan kapasitas promosi pariwisata daerah	
	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan tenaga kerja lokal untuk mengakses kesempatan kerja yang ada	Peningkatan layanan pasar kerja dan akses tenaga kerja lokal ke kesempatan kerja yang adil Kabupaten Karawang

MISI IV : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kapasitas perlindungan kualitas udara, ekosistem pesisir, daerah aliran sungai dan kawasan penyangga serta kawasan kritis lainnya	Peningkatan kapasitas perlindungan lingkungan hidup daerah
		Meningkatkan kapasitas	

		pemeliharaan kualitas lingkungan	
	Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen penanggulangan bencana	Penguatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Karawang

Misi V : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen pemerintahan daerah	Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
		Meningkatkan kapasitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		Mengembangkan inovasi dalam pembiayaan dan perluasan sumber penerimaan daerah	

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang lebih akuntabel dan terukur, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama untuk diterapkan di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 yakni Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun selanjutnya yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 yakni Indikator Kinerja Utama.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 2.3

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2021

Misi I : Terwujudnya Sumber daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	81,48	81,63
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan Dan Literasi	Indeks Pendidikan	60,08	61,85
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target

3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,35	91,85
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Dan Daya Beli Masyarakat Serta Pemberian Jaminan Dan Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,24	8,73
		Indeks Purchasing Power Parity (Ppp)	74,53	76,95

Misi II : Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif, Produktif Dan Berdaya Saing Serta Berbasis Pada Potensi Lokal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Dalam PDRB	4,5	4,8
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Terwujudnya Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing Dan Unggul Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	7,36	10,48
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
3	Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan Dalam PDRB	0,39	2,68

Misi III : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Aman, Nyaman Dan Mendukung Proses Pembangunan Yang Berkesinambungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
----	-------------------	---------------------------	--------------	--------

1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	47,15	47,89
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi Dan Mitigasi	Indeks Resiko Bencana	174,33	174,5
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
3	Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Rasio Konektivitas	0,6297	0,6303
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
4	Tercapainya Universal Akses (Kumuh, Air Bersih, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Domestik)	Capaian Universal Akses	41,8	69,47

Misi IV : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Kapabel	Nilai AKIP	66,5	69,5
		Opini Audit (Opini BPK)	WTP	WTP
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Terwujudnya Implementasi Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	83,5
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,4	4,38
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target

3	Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5	6
---	---	--	---	---

Tabel 2.4

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029

Misi I : Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan	60,75	61,01
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	84,88	86,04
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,84	57,84

Misi II : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Capaian Universal Akses	70,14	36,68
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	68,80	73,09

Misi III : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,71	2,36
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,10	4,20
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	69,91	70,78
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	9,81	10,20
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,32	1,37
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
4	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,04	8,04

Misi IV : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
----	-------------------	---------------------------	--------------	--------



1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,34	44,53
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
2	Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	142,06	142,06

Misi V : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,29	73,5

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Karawang tahun RPJMD 2025-2029 masih bersifat indikatif, oleh sebab itu setiap tahun berdasarkan hasil Musrenbang disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang yang selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Kerja SKPD dan Perjanjian Kinerja SKPD.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja SKPD mencantumkan sasaran strategis berikut indikator kinerja dan target tahun 2025, yaitu :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Misi I : Terwujudnya Sumber daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	81,63	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
				4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				5	Program Pengendalian Penduduk
				6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan Dan Literasi	Indeks Pendidikan	61,85	1	Program Pengelolaan Pendidikan
				2	Program Pengembangan Kurikulum
				3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				5	Program Pembinaan Perpustakaan
				6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
				7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



				8	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,85	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				2	Program Perlindungan Perempuan
				3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
				5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				6	Program Perlindungan Khusus Anak
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Dan Daya Beli Masyarakat Serta Pemberian Jaminan Dan Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,73	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76,95	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				3	Program Penempatan Tenaga Kerja
				4	Program Hubungan Industrial
				5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				6	Program Penataan Desa
				7	Program Peningkatan Kerjasama Desa
				8	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan



					Masyarakat Hukum Adat
				10	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				11	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				12	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				13	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				14	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				15	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
				16	Program Rehabilitasi Sosial
				17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				18	Program Penanganan Bencana
				19	Program Pemberdayaan Sosial
				20	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Misi II : Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif, Produktif Dan Berdaya Saing Serta Berbasis Pada Potensi Lokal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Dalam PDRB	4,8	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



				4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				5	Program Perizinan Usaha Pertanian
				6	Program Penyuluhan Pertanian
				7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				8	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				9	Program Pengawasan Keamanan Pangan
				10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Terwujudnya Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing Dan Unggul Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10,48	1	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata
				2	Program Pemasaran Pariwisata
				3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
				5	Program Pengembangan UMKM
				6	Program Pengembangan Kebudayaan
				7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				8	Program Pembinaan Sejarah
				9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				10	Program Pengelolaan Permuseuman



				11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				14	Program Pengembangan Ekspor
				15	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
				16	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3	Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan Dalam PDRB	2,68	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				5	Program Promosi Penanaman Modal
				6	Program Pelayanan Penanaman Modal

Misi III : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Aman, Nyaman Dan Mendukung Proses Pembangunan Yang Berkesinambungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	47,89	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup



				3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				7	Program Pengelolaan Persampahan
				8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2	Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi Dan Mitigasi	Indeks Resiko Bencana	174,5	1	Program Penanggulangan Bencana
				2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3	Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Rasio Konektivitas	0,6303	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				2	Program Pengelolaan Perkeretaapian
				3	Program Pengelolaan Pelayaran
				4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



				5	Program Penyelenggaraan Jalan
				6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
				10	Program Penataan Bangunan Gedung
4	Tercapainya Universal Akses (Kumuh, Air Bersih, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Domestik)	Capaian Universal Akses	69,47	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				3	Program Pengembangan Perumahan
				4	Program Kawasan Permukiman
				5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				7	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi IV : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
----	-------------------	---------------------------	--------	----	-------------------



1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Kapabel	Nilai AKIP	69,5	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Opini Audit (Opini BPK)	WTP	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				5	Program Perekonomian dan Pembangunan
				6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
				7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				8	Program Kepegawaian Daerah
				9	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
				10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				12	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Terwujudnya Implementasi Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	1	Program Pencatatan Sipil
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,38	2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				3	Program Pendaftaran Penduduk
				4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan



				5	Program Pelayanan Penanaman Modal
				6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				7	Program Promosi Penanaman Modal
				8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				13	Program Informasi dan Komunikasi Publik
				14	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
				15	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				16	Program Pengelolaan Arsip
				17	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				18	Program Perizinan Penggunaan Arsip
3	Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6	1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

				3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Misi I : Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan	61,64	1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	87,21	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,84	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				2	Program Penanganan Bencana
				3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Misi II : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Capaian Universal Akses	40,28	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				4	Program Kawasan Permukiman
				5	Program Pengembangan Perumahan
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	75,76	1	Program Penyelenggaraan Jalan
				2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Misi III : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2,38	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	4,05		
				2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan



					Masyarakat
				4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	70,73	1	Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	10,61		
				2	Program Pengembangan Ekspor
				3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkh)
				4	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
				5	Program Promosi Penanaman Modal
3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,42	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				3	Program Pemasaran Pariwisata
4	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,06	1	Program Penempatan Tenaga Kerja
				2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Misi IV : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
----	-------------------	---------------------------	--------	----	-------------------



1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,4	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				3	Program Pengelolaan Persampahan
				4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehayati)
2	Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	142,05	1	Program Penanggulangan Bencana

Misi V : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	No	Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,75	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				5	Program Aplikasi Informatika
				6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				7	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



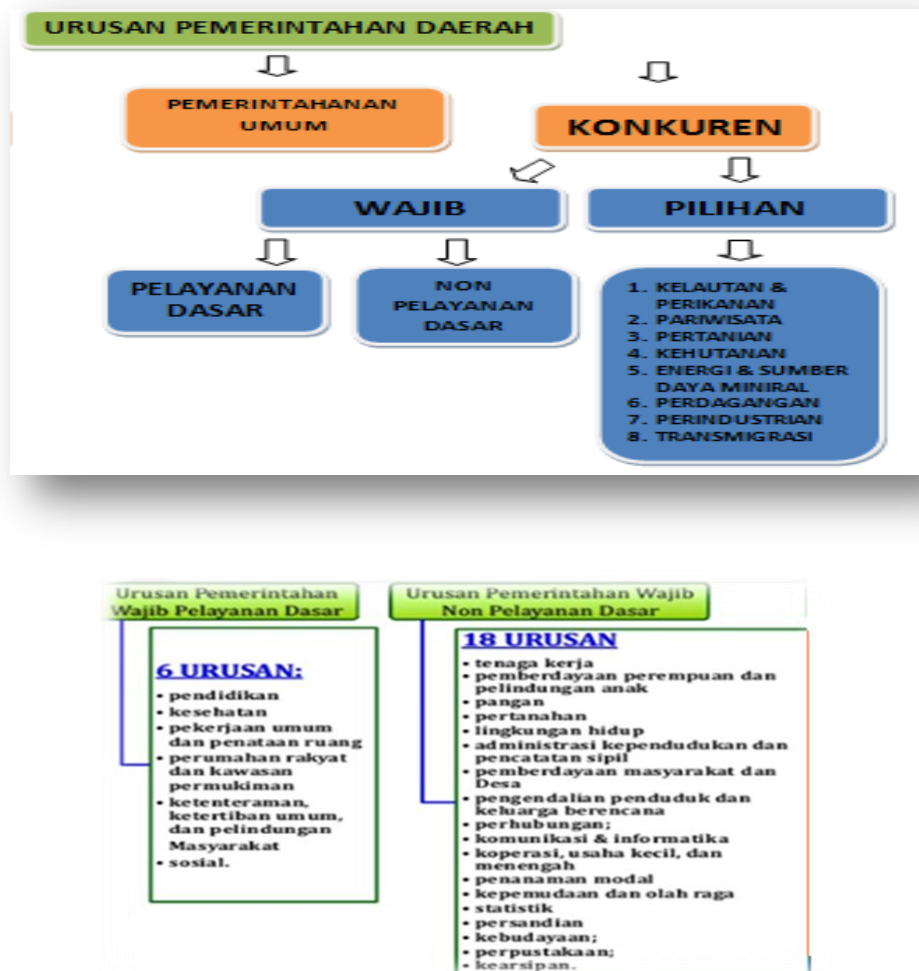
				8	Program Riset dan Inovasi Daerah
				9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				10	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				11	Program Pengelolaan Arsip
				12	Program Kepegawaian Daerah
				13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

2.4 KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Pembangunan Kabupaten Karawang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Karawang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Gambar 2.1
Urusan Pemerintahan Daerah



Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2025 diselaraskan dengan pelaksanaan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Karawang meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sosial;

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi dan UKM;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Arsip

Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi:

1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Energi dan Sumberdaya Mineral;
4. Pariwisata;
5. Kelautan dan Perikanan;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian;
8. Transmigrasi;

Selain urusan wajib dan urusan pilihan untuk mencapai misi Kabupaten

Karawang Tahun 2021-2026 terdapat **unsur penunjang** yang meliputi:

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, memiliki kesetaraan dan kemitraan hubungan dengan DPRD. Hubungan tersebut menciptakan checks and balances antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan DPRD. Hal tersebut merupakan wujud dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintahan daerah yang baik adalah menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki juga dapat memenuhi kewajiban dalam bentuk akuntabilitas publik.

Pada RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2025 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

2.5 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk engine of growth yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau. Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut:

Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan

Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi

antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan berkualitas layanan pendidikan
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - b. Memajukan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman, penghayatan nilai agama; pengamalan,
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan

- e. Meningkatkan budaya literasi.
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Mendukung Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
 - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
 - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“Lingkungan**

Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim”.

Tema tersebut diarahkan untuk mencapai Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2024, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 3) Pengelolaan dan ketahanan sumber daya air;
- 4) Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas;
- 5) Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan Kembali;
- 6) Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Karawang selaku pengemban amanah masyarakat Karawang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kabupaten Karawang memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja, Program/Kegiatan serta Indikator Makro sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, untuk Tahun 2025 sebagai Tahun Akhir RPJMD 2021-2026 juga sebagai Tahun Transisi untuk RPJMD 2025-2029 sehingga berdasarkan juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, oleh karena itu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 menyajikan dua Capaian, yakni Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026 dan juga Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kabupaten Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 dan PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diperbaharui oleh PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008, Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja, program/kegiatan serta Indikator Makro. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, dilakukan pengukuran melalui media perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2015. Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, program/kegiatan dan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategik Pemerintah Kabupaten Karawang dan sebab-sebab tercapai dan tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan skala pengukuran ordinat kinerja untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :

1. Nilai Capaian Kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau sangat berhasil;
2. Nilai Capaian Kinerja dari 70% - 85% adalah sedang, baik atau berhasil;
3. Nilai Capaian Kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau cukup berhasil;
4. Nilai Capaian Kinerja 55% ke bawah sangat kurang, kurang baik atau tidak.

Gambar 3.1
Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja



Pengukuran kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka penghitungan capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka penghitungan capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas pengukuran efisiensi, dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan Capaian Kinerja, apabila realisasi anggaran lebih tinggi dari Capaian Kinerja maka termasuk kategori tidak efisien, apabila realisasi anggaran lebih rendah dari Capaian Kinerja maka termasuk kategori efisien, evaluasi dan analisis kepada anggaran untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang. Adapun pengukuran efisiensi anggaran dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengukuran Efisiensi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% = \text{Persentase Realisasi}$$

$$\text{Persentase Efisiensi Anggaran} = 100\% - \text{Persentase Realisasi}$$

Indikator RPJMD

Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 Makro berfungsi sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang, sebagai ukuran capaian Visi dan Misi. Indikator kinerja tersebut terdiri dari 6 Tujuan dan 14 Sasaran yang seluruhnya bermuara pada indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan dampak menyeluruh dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Adapun indikator kinerja yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 terdiri dari 6 Tujuan dan 12 Sasaran.

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu

strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melakukan kajian ulang (*review*) terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan *review* dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

MISI I : TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	84,98	85,49	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp527.204.444.805
					2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp1.134.338.000
					3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp106.671.200
					4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp15.707.131.900
					5	Program Pengendalian Penduduk	Rp1.556.662.400
					6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp16.163.376.500



					7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp13.536.633.400
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Literasi	Indeks Pendidikan	62,45	61,64	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp571.005.055.062
					2	Program Pengembangan Kurikulum	Rp105.570.400
					3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp94.874.300
					4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp50.000.000
					5	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp2.010.988.248
					6	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp20.444.200
					7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp2.983.921.700



					8	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp651.337.600
					9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp16.758.864.700
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,98	NA	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp1.361.415.900
					2	Program Perlindungan Perempuan	Rp694.721.100
					3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp941.545.500
					4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp20.813.300
					5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp417.408.000
					6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp131.141.000



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daya Beli Masyarakat serta Pemberian Jaminan dan Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	8,04	7,99	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp129.380.000
		Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	78,02	78,74	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp4.743.043.079
					3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp406.711.200
					4	Program Hubungan Industrial	Rp1.417.606.900
					5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp114.317.300
					6	Program Penataan Desa	Rp265.059.490
					7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp11.790.119.284
					8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp8.815.680.593
					9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp1.192.368.100



					10	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp64.955.400
					11	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp217.010.600
					12	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp93.905.300
					13	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp53.723.600
					14	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp1.263.029.700
					15	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp29.799.200
					16	Program Rehabilitasi Sosial	Rp5.675.618.791
					17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp12.125.238.158
					18	Program Penanganan Bencana	Rp773.457.700



					19	Program Pemberdayaan Sosial	Rp7.680.708.040
					20	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp524.860.329

MISI II : Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif, Produktif Dan Berdaya Saing Serta Berbasis Pada Potensi Lokal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB	4,9	17,58	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp3.492.647.600
					2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp18.695.435.750
					3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp919.050.800
					4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp2.819.781.100
					5	Program Perizinan	Rp0



					6	Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	Rp2.714.523.000
					7	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp0
					8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp2.136.328.500
					9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp53.312.300
					10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp118.881.500
					11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.430.732.460
					12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp2.883.953.600
					13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp584.258.250



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
2	Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10,48	9,26	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp4.394.245.867
					2	Program Pemasaran Pariwisata	Rp1.664.360.000
					3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp1.743.159.600
					4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Rp868.333.400
					5	Program Pengembangan UMKM	Rp14.201.457.082
					6	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp7.904.375.273
					7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp258.214.200
					8	Program Pembinaan Sejarah	Rp0
					9	Program Pelestarian dan	Rp1.168.143.500



						Pengelolaan Cagar Budaya	
					10	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp0
					11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp158.387.600
					12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp627.713.026
					13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp1.138.974.000
					14	Program Pengembangan Ekspor	Rp62.518.000
					15	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp1.313.921.400
					16	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp172.531.560
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan dalam Pertumbuhan	Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan	2,78	3,21	1	Program Perencanaan dan Pembangunan	Rp441.486.950



	Ekonomi	Dalam PDRB				Industri	
					2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp34.291.600
					3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp55.024.900
					4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp236.547.300
					5	Program Promosi Penanaman Modal	Rp222.793.500
					6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp1.705.837.342

MISI III : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Aman, Nyaman Dan Mendukung Proses Pembangunan Yang Berkesinambungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	48,13	59,4	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp117.084.400
					2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp3.288.851.200



					3	Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp560.509.600
					4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp87.886.800
					5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp104.016.000
					6	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (KEHATI)	Rp24.337.272.600
					7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp75.041.745.375
					8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp182.617.000
					9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	Rp244.794.000



						Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
2	Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi	Indeks Resiko Bencana	174,1	147,42	1	Program Penanggulanga n Bencana	Rp4.952.455.120
					2	Program Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp11.882.504.400
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Rasio Konektivitas	0,685	0,7047	1	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp32.084.296.693
					2	Program Pengelolaan Penerbangan	Rp0
					3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp430.370.000
					4	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp209.567.428
					5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp40.887.432.200



					6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp396.797.967.813
					7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp141.046.125.000
					8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp1.476.242.000
					9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp924.777.200
					10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp0
					11	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp93.194.692.700
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
4	Tercapainya Universal Akses (Kumuh, Air Bersih, Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik)	Capaian Universal Akses	78,02	39,71	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp25.596.836.800
					2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp43.216.573.400



					3	Program Pengembangan Perumahan	Rp6.432.273.100
					4	Program Kawasan Permukiman	Rp187.740.101.700
					5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp0
					6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp147.546.652.915
					7	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp0

MISI IV : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Kapabel	Nilai AKIP	70,5	67,21	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.271.697.400
		Opini Audit (Opini BPK)	WTP	NA	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Rp2.333.089.180



						Pembangunan Daerah	
					3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.019.713.200
					4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp92.570.093.539
					5	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp1.545.801.100
					6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp26.330.689.816
					7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.784.423.443.624
					8	Program Kepegawaian Daerah	Rp3.234.150.764
					9	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Rp3.727.160.300
					10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp3.612.367.400
					11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp9.854.691.900



					12	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp3.534.537.400
					13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp946.894.700
					14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp776.958.500.860
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
2	Terwujudnya Implementasi Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,88	86,20	1	Program Pencatatan Sipil	Rp1.594.633.900
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,4	4,4	2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp649.596.700
					3	Program Pendaftaran Penduduk	Rp7.473.704.800
					4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp0
					5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp1.705.837.342
					6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp290.305.800
					7	Program Promosi Penanaman Modal	Rp222.793.500



					8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp10.539.626.300
					9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp336.572.800
					10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp8.096.635.300
					11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp268.269.700
					12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp5.710.089.922
					13	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp5.726.103.830
					14	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp283.803.900
					15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp338.947.800
					16	Program Pengelolaan Arsip	Rp565.752.000
					17	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp79.643.000



					18	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp0
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
3	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,66	10	1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp26.474.908.900
					2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp1.413.205.400
					3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp6.418.860.000
					4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp1.217.450.000
					5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp216.242.400



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Misi I : Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan	61,01	61,64	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp571.005.055.062
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	86,04	85,49	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp527.204.444.805
					2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp15.707.131.900
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,84	48,49	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp12.125.238.158
					2	Program Penanganan Bencana	Rp773.457.700
					3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp941.545.500
					4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp1.361.415.900

Misi II : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Capaian Universal Akses	36,68	39,71	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp141.046.125.000
					2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Rp25.596.836.800



						Air Minum	
					3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp43.216.573.400
					4	Program Kawasan Permukiman	Rp187.940.101.700
					5	Program Pengembangan Perumahan	Rp6.432.273.100
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	73,09	70,47	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp396.797.967.813
					2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp32.084.296.693
					3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp40.887.432.200

Misi III : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,36	17,58	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp18.695.435.750
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	4,20	4,68			
					2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp584.258.250
					3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp2.136.328.500



					4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp3.492.647.600
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	70,78	68,03	1	Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp34.291.600
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	10,20	10,31			
					2	Program Pengembangan Ekspor	Rp62.518.000
					3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)	Rp868.333.400
					4	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp11.790.119.284
					5	Program Promosi Penanaman Modal	Rp222.793.500
3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,37	1,4	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp4.394.245.867
					2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp1.743.159.600
					3	Program Pemasaran Pariwisata	Rp1.664.360.000
4	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,04	7,99	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp406.711.200
					2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp4.743.043.079

**Misi IV : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44,53	59,4	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp3.288.851.200
					2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp560.509.600
					3	Program Pengelolaan Persampahan	Rp75.041.745.375
					4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehayati)	Rp24.337.272.600
2	Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	142,06	147,42	1	Program Penanggulangan Bencana	Rp4.952.455.120

Misi V : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,5	77,01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.784.423.443.624
					2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp3.612.367.400
					3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp9.854.691.900



					4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp3.727.160.300
					5	Program Aplikasi Informatika	Rp5.710.089.922
					6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp10.539.626.300
					7	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.271.697.400
					8	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp0
					9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp776.958.500.860
					10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp3.534.537.400
					11	Program Pengelolaan Arsip	Rp565.752.000
					12	Program Kepegawaian Daerah	Rp3.234.150.764
					13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp283.803.900

3.3. PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025

3.3.1. PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025 BERDASARKAN IKU RPJMD 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karawang **“KARAWANG YANG MANDIRI, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”** dimana dalam mewujudkan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah menetapkan 4 misi dengan 17 Indikator Kinerja Utama

Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati-Wakil Bupati Karawang Periode 2021-2026. Dari 17 Indikator Kinerja Utama tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Misi 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan IKU:
 - a. Indeks Kesehatan : Sudah mencapai target
 - b. **Indeks Pendidikan : Belum mencapai target**
 - c. **Indeks Pembangunan Gender : N/A**
 - d. Tingkat Pengangguran Terbuka : Sudah mencapai target
 - e. Indeks Purchasing Power Parity : Sudah mencapai target
2. Misi 2 Terwujudnya ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing Serta Berbasis Pada Potensi Lokal dengan IKU:
 - a. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Dalam PDRB : Sudah mencapai target
 - b. **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD : Belum mencapai target**
 - c. Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB : Sudah mencapai target
3. Misi 3 Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan Yang Berkesinambungan Dengan IKU:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : Sudah mencapai target
 - b. Indeks Resiko Bencana : Sudah Mencapai Target
 - c. Rasio Konektivitas : Sudah mencapai target
 - d. **Capaian Universal Akses : Belum mencapai target**
4. Misi 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dengan IKU:
 - a. **Nilai SAKIP : Belum mencapai target**
 - b. **Opini Audit (Opini BPK) : N/A**
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Sudah mencapai target
 - d. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) : Sudah mencapai target
 - e. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Sudah mencapai target

Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2025, terdapat 4 IKU (23,53%) belum mencapai target, 2 IKU (11,76%) belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang berwenang, 11 IKU (64,7%) sudah mencapai target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dapat dilihat pada penjabaran berikut ini :

MISI 1 : TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

1. Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kesehatan

Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan yang dapat digunakan banyak sekali, tetapi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesehatan terdiri dari variabel mortalitas, morbiditas dan fertilitas.

Tabel 3.3
Indeks Kesehatan

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	81,38	84,88	84,98	85,49	100,60%	100,72%	85,08	100,48%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Target Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2025 adalah 84,98 dan terealisasi dengan poin 85,49 sehingga capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang sebesar 100,60%, artinya masuk kategori sudah sangat berhasil mencapai target. Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2024 meningkat 0,61 poin, dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 meningkat 3,6 poin, hal ini menunjukkan bahwa tren indeks kesehatan termasuk yang positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang dengan sekaligus bisa

mencapai target tahun 2026, kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang 85,08 juga sudah melewati target mencapai 100,48%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Kesehatan secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.4
Efisiensi Indeks Kesehatan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
INDEKS KESEHATAN	84,98	85,49	100,60%	Rp575.409.258.205	Rp 539.199.225.808	93,71%	6,29%	Rp 36.210.032.397

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.4 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Kesehatan** mencapai 100,60% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 93,71%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp36.210.032.397 atau sebesar 6,29% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Kesehatan** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Kesehatan ialah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 93,21%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.5

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kesehatan

No	Indikator kinerja	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)

1	Umur Harapan Hidup (UHH)	75,26	75,57	100,41%
---	--------------------------	-------	-------	---------

Dilihat dari tabel 3.3 dan 3.5 diatas terlihat bahwa Capaian Indeks Kesehatan hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Dinkes) yang justru berhasil mencapai target, yakni Umur Harapan Hidup (UHH) yang capaiannya mencapai 100,41%. hal ini menunjukan bahwa IKU Dinkes tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati indeks kesehatan.

1. Faktor Pendorong

- Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan urusan Bidang Kesehatan;
- Kebijakan yang mendorong terpenuhinya SPM Kesehatan sudah tersedia;
- Semua Rumah Sakit Rujukan sudah terakreditasi;
- Rata-rata Capaian SPM Kesehatan sudah sangat tinggi;
- Meningkatnya persentase perempuan yang menikah di usia matang sehingga menurunkan risiko kematian ibu dan bayi.

2. Faktor Penghambat

Masih ada SPM Kesehatan yang belum mencapai target yaitu layanan kesehatan yaitu:

- Pelayanan kesehatan untuk penduduk berusia 15-59 tahun;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita Hipertensi;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita Diabetes Melitus;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita ODGJ;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita TBC.

3. Alternatif Solusi

- Kebijakan Internal yang Mendukung Keberlanjutan Posisi, aturan khusus dalam klausul Surat Keputusan penunjukkan personel pelaporan agar tidak mudah berganti-ganti, digitalisasi dan integrasi sistem pelaporan, digitalisasi kampanye pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- Harmonisasi dan Penyelarasan Protokol Skrining-Diagnostik melalui SK Internal atau Revisi SOP, Penggunaan Teknologi Digital untuk

Sinkronisasi Data Skrining dan Diagnostik, Pelatihan singkat (mini workshop atau *e-learning*) dan Simulasi Kasus bagi Tenaga Kesehatan tentang Alur Skrining-Diagnostik yang benar;

- Memanfaatkan program Dukcatpil Ada Untukmu (DAU) untuk memberikan identitas kependudukan bagi ODGJ.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Kesehatan secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

2. Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Literasi

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Tabel 3.6
Indeks Pendidikan

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan	60,69	60,75	62,45	61,64	98,70%	101,47%	63,04	97,78%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.6 diatas, Indeks Pendidikan yang pada tahun 2025 ini berhasil mencapai target yaitu sebesar 61,64 poin. Capaian tersebut hampir melampaui target 2025 sebesar 62,45 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 98,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 60,75 juga mengalami peningkatan 0,89 poin dengan persentase tingkat capaian 101,47%. Lalu apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 meningkat 0,95 poin. Peningkatan nilai capaian Indeks Pendidikan ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena angka yang dicapai sudah mendekati bawah target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 63,04 atau persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD sudah mencapai sekitar 97,78%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Pendidikan secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Indeks Pendidikan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
INDEKS PENDIDIKAN	62,45	61,64	98,70%	Rp593.681.056.210	Rp 584.220.961.305	98,41%	1,59%	Rp 9.460.094.905

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.7 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Pendidikan** mencapai 98,70% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 98,41%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp9.460.094.905 atau sebesar 1,59% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Pendidikan** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Pendidikan ialah Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 72,32%.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.8

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks pendidikan

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,11	8,31	102,47%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21,41	21,03	98,23%

Dilihat dari tabel 3.6 dan 3.8 diatas terlihat bahwa Capaian Indeks pendidikan belum mencapai target disebabkan oleh belum tercapainya target Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi IKU Dinas Pendidikan, dimana capaiannya selaras dengan capaian indeks pendidikan yakni di sekitar 98%.

1. Faktor Pendorong

- Pemerintah Kabupaten Karawang sudah berupaya mengoptimalkan sumber daya berupa peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan *mandatory spending* 20% pendanaan urusan bidang pendidikan dan perbaikan kurikulum serta metode pembelajaran;

- Partisipasi sekolah SD sudah mencapai lebih dari 100%, Partisipasi sekolah SMP sudah tinggi (93,54%), dan Partisipasi jenjang PAUD dan kesetaraan mencapai 82,34%

2. Faktor Penghambat

- Angka putus sekolah masih tinggi dan angka tidak sekolah tinggi terutama di perkotaan (17.629 orang);
- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan realisasi capaiannya yaitu 4,67% atau tingkat capaiannya 92,36% dari target, atau belum mencapai target;
- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri adalah basis data untuk perhitungan yang masih terbatas, sehingga upaya yang dilakukan ialah melaksanakan pendataan kepemudaan serta berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pengumpulan data eksternal kepemudaan khususnya data kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
- Penentuan target indeks pendidikan sangat menantang dan belum melihat tren capaian tahun-tahun sebelumnya.

3. Alternatif Solusi

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk verifikasi dan validasi data jumlah penduduk usia 7-18 tahun belum/tidak sekolah, untuk penjaringan siswa kembali sekolah ke PKBM dengan menyediakan bantuan biaya personil untuk penanganan anak tidak/putus sekolah agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- Kampanye MANFAAT PAUD, Trial Gratis di PAUD, dan Duta PAUD dari Tokoh Masyarakat & Kader Posyandu;
- "Gerakan 100% PAUD Terdaftar" – Pendataan & Legalitas PAUD;
- "PAUD GRATIS untuk Semua" – Skema Subsidi & Kemitraan;
- "PAUD Berkualitas di Setiap Desa" – Standarisasi & Peningkatan Kualitas Layanan;

- Penyusunan "Database Pendidikan Berkelanjutan" – Pelacakan Siswa yang Melanjutkan Sekolah;
- Program Pendidikan Fleksibel untuk Remaja Bekerja atau Menikah Muda;
- Ekstensifikasi Beasiswa Pendidikan Kesetaraan.
- Untuk perbaikan akan lebih Mengarahkan sasaran Program Pendidikan kepada sasaran yang mengarah langsung ke target perbaikan pada Angka Partisipasi Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama, rasio murid per guru tingkat Sekolah Dasar, rasio murid per guru tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah hampir bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil karena Capaian saat ini sudah hampir melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Pendidikan secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pembangunan Gender

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.9
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,85	84,88	91,98	N/A	#VALUE!	#VALUE!	91,98	#VALUE!	

Sumber data : Bappeda Kab. Karawang

4. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Daya Beli Masyarakat serta Pemberian Jaminan dan Perlindungan Sosial

A. Indikator Kinerja Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kesempatan kerja merupakan parameter penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mempengaruhi sisi *supply* dan *demand* untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada sisi *demand*, perlu diupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu menyerap tenaga kerja. Pada sisi *supply*, perlu ditekan laju pertumbuhan angkatan kerja. Pada elemen laju pertumbuhan angkatan kerja, terkait didalamnya soal laju pertumbuhan penduduk, maka pada sisi *supply*, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami. Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang

dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daya Beli Masyarakat serta Pemberian Jaminan dan Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,95	8,04	8,04	7,99	100,63%	100,63%	8,04	100,63%	

Sumber data : Bappeda Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.10 diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2025 ini berhasil mencapai target yaitu sebesar 7,99% yang merupakan penurunan sebesar 0,05% poin dibandingkan dengan target 2025 sebesar 8,04% dengan persentase tingkat capaian 100,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 8,95% mengalami penurunan 0,96%, lalu pada tahun 2024 yaitu 8,04% juga mengalami penurunan 0,05% yaitu dengan persentase tingkat capaian 100,63%. Penurunan persentase TPT ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena angka yang dicapai sudah berhasil melampaui bawah target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 8,04 atau persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD sudah mencapai 100,63%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Tingkat Pengangguran Terbuka secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.11
Efisiensi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	8,04	7,99	100,63%	Rp 57.376.592.764	Rp 47.564.239.841	82,90%	17,10%	Rp 9.812.352.923

Sumber data : Bappeda dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.11 diatas terlihat bahwa Capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 100,63% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 82,90%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp9.812.352.923 atau sebesar 17,10% dari total anggaran. apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Tingkat Pengangguran Terbuka ialah Program Penataan Desa dengan realisasi anggaran sebesar 27,12%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.12
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan ditempatkan	74,65	72,92	97,68
2	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	80,32	97,13	120,93

Dilihat dari tabel 3.10 dan 3.12 diatas terlihat bahwa Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DISNAKERTRANS) yang juga hampir mencapai target dan ada yang berhasil mencapai target, yakni Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan ditempatkan yang capaiannya mencapai 97,68% dan Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja yang capaiannya mencapai 120,93%. Hal ini menunjukkan bahwa IKU DISNAKERTRANS tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Tingkat Pengangguran Terbuka ialah Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja.

1. Faktor Pendorong

- Pengelolaan Pendidikan, dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan, penyediaan akses biaya pendidikan melalui beasiswa, serta peningkatan mutu dan manajemen pendidikan;
- Penempatan Tenaga Kerja, dengan peningkatan pelayanan informasi pasar kerja termasuk layanan informasi pasar kerja online, optimalisasi mekanisme antar kerja lokal, antar kerja antar daerah (AKL/ AKAD) serta penyelenggaraan kegiatan tenaga kerja mandiri;
- Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan pada 12 kejuruan dan MOU dengan perusahaan untuk pelatihan dan pemagangan;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa seperti pelatihan sekolah lapang, penguatan kelompok tani, penguatan ekonomi petani;
- Pemberdayaan UMKM melalui, Sinergitas Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Program Pengembangan Usaha Mikro dengan pemberian bantuan alat pada UMKM;
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan fasilitasi Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih;
- Program pemberdayaan pelaku seni dengan pelatihan, pemberian alat kesenian dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;

- Program pengembangan kapasitas nelayan, dengan Pelaksanaan Diklat Basic Safety Training Fisheries II (BST-F II) dan Kecakapan Nelayan.

2. Faktor Penghambat

- Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi masih rendah (45% dari jumlah tenaga kerja keseluruhan);
- Persentase tenaga kerja yang ditempatkan masih rendah (47,89% dari jumlah pencaker terdaftar sebanyak 33.191 orang).

3. Alternatif Solusi

- Penguatan Pendidikan Vokasi melalui kurikulum berbasis industri, meningkatkan kerja sama magang dan pelatihan langsung (siswa dengan Perusahaan, Balai Latihan Kerja, dunia usaha, dan platform digital untuk memberikan kursus keterampilan), Pelatihan dan Sertifikasi untuk Lulusan SMA/SMK, membentuk *Career Center* di sekolah dan di tingkat kabupaten yang menyediakan pendampingan kerja, informasi lowongan, serta pelatihan interview dan CV, Mendorong Wirausaha Muda melalui inkubasi bisnis dan akses modal usaha bagi lulusan SMA/SMK untuk membangun usaha kecil berbasis lokal, Transformasi Mindset melalui Kampanye bahwa bekerja tidak hanya berarti menjadi pegawai, tetapi bisa dengan *freelance*, digital business, dan usaha mandiri;
- Peningkatan efektifitas seleksi calon peserta pelatihan agar tepat sasaran misalnya calon peserta diambil dari jumlah pencaker terdaftar yang belum ditempatkan;
- Peningkatan kualitas pelaksanaan subkeg untuk membiayai aktivitas yang berkontribusi langsung terhadap perluasan cakupan layanan untuk meningkatkan angka tenaga kerja yang kompeten;

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator

Tingkat Pengangguran Terbuka secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

B. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil.

Tabel 3.13
Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP)

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daya Beli Masyarakat serta Pemberian Jaminan dan Perlindungan Sosial	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76,69	78,02	78,02	78,74	100,92%	100,92%	77,4	101,73%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.13 diatas, Indeks *Purchasing Power Parity* yang pada tahun 2025 ini berhasil mencapai target yaitu sebesar 78,74 yang merupakan peningkatan sebesar 0,72% poin dibandingkan dengan target 2025 sebesar 78,02 dengan persentase tingkat capaian 100,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 76,69 mengalami peningkatan sebesar 2,05 poin. Lalu jika dibandingkan dengan capaian 2024 yaitu 78,02 juga mengalami peningkatan 0,72% yaitu dengan persentase tingkat capaian 100,92%. Peningkatan persentase PPP ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena angka yang dicapai sudah berhasil melampaui bawah target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 77,4 atau persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD sudah mencapai 101,73%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026

maka indikator Indeks *Purchasing Power Parity* secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.14
Efisiensi Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
INDEKS <i>PURCHASING POWER PARITY</i> (PPP)	78,02	78,74	100,92%	Rp 57.376.592.764	Rp 47.564.239.841	82,90%	17,10%	Rp 9.812.352.923

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.14 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks *Purchasing Power Parity*** mencapai 100,92% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 82,90%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp9.812.352.923 atau sebesar 17,10% dari total anggaran. apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks *Purchasing Power Parity*** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks *Purchasing Power Parity* ialah Program Penataan Desa dengan realisasi anggaran sebesar 27,12%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.15
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP)

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	68,70	72,12	104,98%

2	Persentase Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil (naik Kelas)	6,00	6,00	100,00%
---	---	------	------	---------

Dilihat dari tabel 3.13 dan 3.15 diatas terlihat bahwa Capaian **Purchasing Power Parity (PPP)** sudah mencapai target, dan hal keberhasilan ini di dorong oleh capaian Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Dinkop UKM) yakni Persentase Koperasi yang berkualitas dan Persentase Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil (naik Kelas) yang masing-masing bisa mencapai 100 % target dan bahkan untuk IKU Dinkop Persentase Koperasi yang berkualitas bisa mencapai 104%.

1. Faktor Pendorong

- Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha;
- Cakupan SPM Sosial (layanan terhadap PMKS) sudah mencapai 76%.

2. Faktor Penghambat

- Jumlah penganggur masih tinggi dan didominasi oleh lulusan SMA/SMK merupakan potensi yang dapat diintervensi oleh Dinas KopUKM untuk ekstensifikasi peningkatan wirausaha;
- Perbedaan Data yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Sorabi sebagai basis data untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk meringankan beban ekonomi.

3. Alternatif Solusi

- Mendorong Wirausaha Muda melalui inkubasi bisnis dan akses modal usaha bagi lulusan SMA/SMK untuk membangun usaha kecil berbasis lokal;
- Harmonisasi Data PMKS untuk Sinkronisasi Data Formal dan data *Real-time*, menyusun SOP Pembaruan Data Berkala untuk *Update Data Formal* yang Lebih Cepat, melakukan *Pilot Project* memanfaatkan Data *Real-time*.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian

dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP) secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

MISI 2 : TERWUJUDNYA EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING SERTA BERBASIS PADA POTENSI LOKAL

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran : Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau menurut KBBI: agrobisnis atau usaha niaga tani ini merupakan bisnis berbasis usaha di bidang pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan bekerja pada rantai sektor pangan (*food supply chain*).

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Pengelolaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.

Tabel 3.16
Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB	-0,19	1,71	4,9	17,58	358,78%	1028,07%	4,9	358,78%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.16 diatas, Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB pada tahun 2025 meraih poin sebesar 17,58 poin. Capaian tersebut jauh melebihi target 2025 yang hanya sebesar 4,9 poin, dengan persentase tingkat capaian mencapai sebesar 358,78%. Peningkatan nilai capaian Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB yang sangat besar ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu -0,19 poin mengalami peningkatan 17,39 poin dan realisasi tahun 2024 yaitu 1,71 poin mengalami peningkatan 15,87 poin dengan persentase tingkat capaian sebesar 1028,07%. Serta apabila dibandingkan dengan RPJMD 2021-2026 yaitu 4,9 poin, capaian 2025 juga sudah jauh melebihi target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai hingga 358,78%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.17**Efisiensi Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	4,9	17,58	358,78%	Rp 36.848.904.860	Rp 25.545.557.474	69,33%	30,67%	Rp 11.303.347.386

Sumber data : Bappeda dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.17 diatas terlihat bahwa Capaian **Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB** mencapai 358,78% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 69,33%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp11.303.347.386 atau sebesar 30,67% dari total anggaran. apabila melihat hasil perbandingan

tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB** ini termasuk **indikator yang sangat bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran **Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB** ialah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan realisasi anggaran sebesar 52,43%.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.18

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB

No	IKU	2025		
		Target (Ton)	Capaian (Ton)	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	47.222,35	47.231,11	100,02
2	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	57.406,21	57.830	100,74

Dilihat dari tabel 3.16 dan 3.18 diatas terlihat bahwa Capaian **Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB** berhasil mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DPKPP) yang juga berhasil mencapai target, yakni Jumlah produksi perikanan budidaya yang capaiannya mencapai 100,02% dan Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang capaiannya mencapai 100,74%. Hal ini menunjukan bahwa IKU DPKPP tersebut merupakan IKU yang sangat berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati **Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB**.

1. Faktor Pendorong

- Jumlah armada kapal/perahu penangkapan ikan sebanyak 1.683 unit, dengan jumlah nelayan laut sebanyak 7.830 orang serta PUD sebanyak 1.081 orang
- Luas tambak mencapai 13.411,30 Ha; Kolam sebanyak 957,40 Ha; dan KJA sebanyak 83 unit. Dengan jumlah pembudidaya sebanyak 4.659 orang.

2. Faktor Penghambat

- Kebutuhan alat penangkapan ikan (jaring, pancing, bubu, dll), serta umur alat tangkap yang rata-rata hanya 3-6 bulan;
- Faktor cuaca, terutama cuaca ekstrim yang mengakibatkan gelombang tinggi, sehingga terkadang menjadi penghambat kegiatan penangkapan ikan;
- Tingginya biaya produksi seperti pakan, pupuk, benih, dll;
- Musim/cuaca yang sulit di prediksi, seperti kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan mengakibatkan kesulitan dalam pembudidayaan ikan.

3. Alternatif Solusi

- Mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian Modern & Digitalisasi Pertanian (revitalisasi SMK pertanian);
- Membangun Koperasi dan Pasar Tani Digital;
- Revitalisasi Tata Kelola Air dan penegakkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian;

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDRB secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja Sasaran : Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sebagai salah satu bagian dari organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka fokus kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang adalah pada upaya peningkatan kualitas pariwisata, seni dan budaya masyarakat guna menggali pendapatan melalui peningkatan PAD Sektor Pariwisata.

Tabel 3.19

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10,17	10,48	10,48	9,26	88,36%	88,36%	10,48	88,36%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.19 diatas, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD pada tahun 2025 meraih poin sebesar 9,26. Capaian tersebut hampir mencapai target 2025 sebesar 10,48, dengan persentase tingkat capaian mencapai 88,36%. Nilai capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 10,17 mengalami penurunan 0,91 dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 10,48 mengalami penurunan 1,22 dengan persentase tingkat capaian sebesar 88,36%. Serta apabila dibandingkan dengan RPJMD 2021-2026 yaitu 10,48, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai 88,36%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD

2021-2026 maka indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.20
Efisiensi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD	10,48	9,26	88,36%	Rp 35.676.334.508	Rp 34.508.918.988	96,73%	3,27%	Rp 1.167.415.520

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.20 diatas terlihat bahwa Capaian **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD** mencapai 88,36% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 96,73%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp1.167.415.520 atau sebesar 3,27% dari total anggaran. apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD** ini termasuk indikator yang kurang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD ialah Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri dengan realisasi anggaran sebesar 92,22%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.21
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

No	IKU	2025
----	-----	------

		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Karawang	90,90	217,64	239,43%
2	Persentase unsur pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	17,4	19,4	100%

Dilihat dari tabel 3.19 dan 3.21 diatas terlihat bahwa Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD belum berhasil mencapai target, namun Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DISPARBUD) berhasil mencapai target. Hal ini menunjukan bahwa IKU DISPARBUD tersebut yang sangat berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD adalah Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Karawang dengan persentase keberhasilan sebesar 239,43%.

1. Faktor Pendorong

- Pertumbuhan wisatawan tahun 2025 meningkat;
- Peningkatan perjalanan wisatawan yang datang tahun 2025 meningkat.

2. Faktor Penghambat

Tingkat hunian akomodasi masih kurang optimal yaitu baru mencapai 50,78%.

3. Alternatif Solusi

"Event-Based Tourism: Kalender Event Wisata & Bisnis Karawang"

Tujuan: Meningkatkan okupansi hotel dengan menyelenggarakan dan mengkurasi berbagai event—baik skala lokal, nasional, maupun internasional—yang menarik wisatawan dan peserta bisnis untuk datang dan menginap di Karawang.

- Buat Kalender Event Karawang
- Gandeng *Influencer & Digital Marketing*
- Kerja Sama dengan OTA (*Online Travel Agent*)
- Integrasikan dengan Industri & Komunitas.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, belum mencapai target tahunan, namun tetap bisa dikatakan berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa dikatakan berhasil terhadap target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Sasaran : Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Tabel 3.22
Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
2	3		4	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan dalam PDRB	5,35	2,91	2,78	3,21	115,47%	110,31%	2,88	111,46%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian kinerja

Dilihat dari Tabel 3.22 diatas, Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB pada tahun 2025 meraih poin sebesar 3,21. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 2,78, dengan persentase tingkat capaian mencapai 115,47%. Nilai capaian Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 5,35 mengalami penurunan sebesar 2,14, namun pada capaian tahun 2024 yaitu 2,91 mengalami peningkatan 0,3 dengan persentase tingkat capaian sebesar 110,31%. Serta apabila dibandingkan dengan RPJMD 2021-2026 yaitu 2,88, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai 111,46%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.23
Efisiensi Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE ERSIENSI ANGGARAN	NILAI ERSIENSI ANGGARAN
PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PERINDUSTRIAN PENGOLAHAN DALAM PDRB	2,78	3,21	115,47%	Rp 2.695.981.592	Rp 2.490.116.200	92,36%	7,64%	Rp 205.865.392

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.23 diatas terlihat bahwa Capaian **Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB** mencapai 115,47% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 92,36%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp205.865.392 atau sebesar 7,64% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB** ini termasuk indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB ialah Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar 72,09%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.24
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	4,2	10,35	246,43

2	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (IUP)	6,1	5,82	104,81
---	---	-----	------	--------

Sumber data : Bappeda Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.22 dan 3.24 diatas terlihat bahwa Capaian Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB berhasil mencapai target, hal ini didukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DISPERINDAG) yang berhasil mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa IKU DISPERINDAG tersebut yang sangat berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB.

1. Faktor Pendorong

- Faktor Internal: Posisi Strategis dan Infrastruktur yang Berkembang dan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Melimpah;
- Faktor Eksternal: Adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang meningkatkan permintaan terhadap produk industri, Kebijakan Nasional yang Mendukung Industri, Adopsi teknologi otomasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses produksi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional.

2. Faktor Penghambat

- Faktor Internal: Ketergantungan pada Sektor Otomotif dan Elektronik, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Terampil, Tingginya Upah Minimum;
- Faktor Eksternal: Persaingan dengan Daerah Lain, Krisis Energi dan Bahan Baku dll.

3. Alternatif Solusi

Untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor tersebut, strategi utama yang harus diterapkan adalah digitalisasi, insentif bagi investor, dan kolaborasi dengan sektor swasta:

- Untuk mempercepat pertumbuhan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang: *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pengelolaan air dan limbah untuk meningkatkan efisiensi, Mendirikan fasilitas daur ulang terpadu, menghubungkan sektor industri dengan pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular,

Mendorong program *waste-to-energy*, mengubah sampah menjadi sumber energi listrik bagi kawasan industri dan permukiman;

- Untuk mempercepat pertumbuhan sektor Konstruksi: Penerapan Sistem Informasi Konstruksi Digital untuk mempercepat perizinan dan monitoring proyek, Insentif bagi pengembang yang menerapkan konsep *Green Building* dan efisiensi energi, Membangun Pusat Inovasi Konstruksi untuk riset dan pelatihan tenaga kerja konstruksi berbasis teknologi;
- Mempercepat pertumbuhan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi: Inovasi layanan keuangan digital, termasuk layanan pinjaman untuk UMKM dan *startup*, Meningkatkan literasi keuangan dengan pelatihan investasi & manajemen keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha, Mengembangkan skema asuransi UMKM untuk mengurangi risiko usaha;
- Mempercepat pertumbuhan sektor Jasa Perusahaan (*Business Services*): Menyediakan *co-working space* dan inkubasi bisnis bagi *startup* dan profesional, Memberikan insentif bagi perusahaan *outsourcing*, konsultasi bisnis, dan layanan teknologi untuk berkembang di Karawang, Memfasilitasi digitalisasi layanan perusahaan, termasuk *cloud computing* dan *automation service*;
- Mempercepat pertumbuhan sektor Jasa Pendidikan: Mendorong kemitraan universitas dengan industri untuk program vokasi dan sertifikasi keahlian, Digitalisasi sekolah dan perguruan tinggi dengan *e-learning* dan laboratorium virtual, Insentif bagi *startup edutech* untuk memperluas akses pendidikan berbasis teknologi;
- Mempercepat pertumbuhan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: Mengembangkan rumah sakit berbasis teknologi dengan sistem rekam medis digital, Insentif bagi *startup healthtech* yang menyediakan layanan *telemedicine* dan *Artificial Intelligent* dalam diagnosis Kesehatan, Mengembangkan klinik keliling dan layanan kesehatan berbasis komunitas untuk meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil;
- Mempercepat pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Mendorong sertifikasi halal dan keamanan pangan

untuk meningkatkan daya saing restoran dan hotel, Digitalisasi sektor F&B dengan *e-menu*, sistem pemesanan online, dan program loyalitas pelanggan, Insentif bagi usaha kuliner berbasis lokal dan UMKM untuk berkembang di pasar nasional dan internasional;

- Mempercepat pertumbuhan sektor *Real Estate*: Mendorong pengembangan hunian terjangkau berbasis transportasi publik dan *green city*, Memanfaatkan lahan *idle* menjadi zona *mixed-use* (perumahan + komersial + industri kreatif), Insentif bagi pengembang *real estate* yang menerapkan konsep *smart home* & energi hijau.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan Dalam PDRB secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

MISI 3 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP YANG AMAN, NYAMAN DAN MENDUKUNG PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karawang

Indikator Kinerja Sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Indonesia berada dalam kategori baik, sedang atau buruk. pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah: Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,4	50,34	48,13	59,4	123,42%	118,00%	48,38	122,78%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.25 diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 meraih poin sebesar 59,4 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 48,13 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 123,42%. Peningkatan nilai capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 51,4 mengalami peningkatan 8 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu

50,34 mengalami peningkatan 9,06 poin dengan persentase tingkat capaian 118%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 48,38 poin, capaian 2025 sudah jauh melebihi target akhir RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 122,78%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.26
Efisiensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFIISIENSI ANGGARAN	NILAI EFIISIENSI ANGGARAN
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	48,13	59,4	123,42%	Rp103.964.776.975	Rp 81.221.944.594	78,12%	21,88%	Rp 22.742.832.381

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.26 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** mencapai 123,42% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 78,12%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp22.742.832.381atau sebesar 21,88% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** ini termasuk **indikator yang sangat bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ialah Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan realisasi anggaran sebesar 69,41%.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.27

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Air	64,76	69,00	106,55
2	Indeks Kualitas Udara	21,56	57,30	265,77
3	Indeks Kualitas Lahan	52,26	52,42	100,31

Sumber data : Bappeda Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.25 dan 3.27 diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bisa mencapai target karena adanya dukungan pencapaian IKU dari Dinas Lingkungan Hidup, dimana dari tiga IKU Dinas Lingkungan Hidup yang paling berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Udara yang capaiannya lebih dari 265,77%.

1. Faktor Pendorong

- Kualitas udara meningkat;
- Komitmen seluruh stake holder dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala;
- Mekanisme pengawasan baik langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program lingkungan;
- Kerjasama dengan sektor pendidikan dan komunitas lingkungan memperkuat kampanye dan aksi nyata.

2. Faktor Penghambat

- Kualitas air menurun;
- Kualitas tutupan lahan menurun.

3. Alternatif Solusi

- Intensifikasi dan ekstensifikasi Program "Bank Limbah Domestik" (BLD) untuk Pengelolaan Limbah Cair dan Padat, Gerakan "Satu Rumah Satu Lubang Biopori", dan "Karawang Bebas Sampah Plastik" – Pengurangan Sampah dari Sumbernya;
- Optimalisasi teknologi digital (kanal aduan lingkungan berbasis aplikasi, Drone untuk Pemantauan Area Luas, Manfaatkan CCTV Lingkungan);
- Peningkatan Peran Stakeholder Lain (Satgas Lingkungan atau Relawan Pengawas, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan NGO dan Sinergi dengan OPD Terkait & Aparat Penegak Hukum);
- Pendekatan Preventif melalui Penguatan Kepatuhan (Penerapan Sistem Insentif & Disinsentif), Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha);
- Pengawasan Berbasis Risiko (Prioritaskan Pengawasan pada Sektor dengan Risiko Tinggi, Gunakan Data untuk Pengawasan Berbasis Prioritas);
- Rotasi & Jadwal Pengawasan yang Fleksibel (inspeksi acak, rotasi pengawasan antar wilayah).

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

2. Sasaran Strategis : Meningkatkan Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi

Indikator Kinerja Sasaran: Indeks Resiko Bencana

Penghitungan Indeks Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Tabel 3.28
Indeks Resiko Bencana

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
2	3		4	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi	Indeks Risiko Bencana	152,32	142,06	174,1	147,42	118,10%	96,36%	174	118,03%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.28 diatas, Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 meraih poin sebesar 147,42 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 174,1 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 118,10%. peningkatan nilai capaian Indeks Risiko Bencana ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 152,32 mengalami penurunan sebesar 4,9 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 142,06 mengalami penurunan 5,36 poin dengan persentase tingkat capaian 96,36%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 174 poin, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 118,03%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD

2021-2026 maka indikator Indeks Risiko Bencana secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.29
Efisiensi Indeks Resiko Bencana

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFIISIENSI ANGGARAN	NILAI EFIISIENSI ANGGARAN
INDEKS RISIKO BENCANA	174,1	147,42	118,10%	Rp 16.834.959.520	Rp 14.485.116.702	86,04%	13,96%	Rp 2.349.842.818

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.29 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Risiko Bencana** mencapai 118,10% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 86,04%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp2.349.842.818 atau sebesar 13,96% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Risiko Bencana** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Risiko Bencana ialah Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 74,55%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.30
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Resiko Bencana

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,48	0,55	114,58
2	Persentase pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sub urusan	100%	100%	100,00

	kebakaran			
--	-----------	--	--	--

Dilihat dari tabel 3.28 dan 3.30 diatas terlihat bahwa Indeks Risiko Bencana bisa mencapai target karena adanya dukungan pencapaian IKU dari BPBD, dimana dari dua IKU BPBD yang paling berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian Indeks Risiko Bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang capaiannya lebih dari 114,58%.

1. Faktor Pendorong

- Selesainya penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
- Pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang semakin baik; dan
- Regulasi-regulasi baru dibidang kebencanaan yang memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat

- Pengadaan barang/Jasa yang Kompleks sehingga di perlukan perencanaan pengadaan yang sangat detail, di mulai dari proses identifikasi kebutuhan, penyusunan persyaratan Spesifikasi Teknis, serta penyusunan perkiraan harga. dan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit memerlukan data dan Informasi yang sangat Kompleks dan/atau di mungkinkan untuk dapat melibatkan tenaga ahli di dalamnya;
- Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2025 banyak dari kegiatan program prioritas tidak memperoleh anggaran.

3. Alternatif Solusi

- Perlu dilakukan penambahan personil sesuai kebutuhan dalam rangka percepatan pelayanan penanganan bencana.
- Perlunya inovasi untuk kelanjutan Program/ Kegiatan di tahun 2025 karena sudah tertuang dalam Rencana Strategis dan RPJMD (2021-2026).
- Perlunya anggaran yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana pada program yang direncanakan ditahun berikutnya untuk melanjutkan sisa target yang telah ditetapkan.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, sudah bisa mencapai target tahunan bahkan target akhir RPJMD, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Risiko Bencana secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator Kinerja Sasaran: Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas perhubungan dapat dilakukan melalui strategi Optimalisasi layanan sistem jaringan transportasi dan Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

Tabel 3.31
Rasio Konektivitas

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
2	3		4	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Rasio Konektivitas	0,515	0,685	0,685	0,7047	102,88%	102,88%	0,685	102,88%	

Sumber data : Bappeda Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.31 diatas, Rasio Konektivitas pada tahun 2025 meraih poin sebesar 0,7047. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 0,685, dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,88%. peningkatan nilai capaian Rasio Konektivitas ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 0,515 mengalami peningkatan sekitar 0,189, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 0,685 mengalami

peningkatan sekitar 0,01 dengan persentase tingkat capaian 102,88%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 0,685, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 102,88%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Rasio Konektivitas secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.32
Efisiensi Rasio Konektivitas

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
RASIO KONEKTIVITAS	0,685	0,7047	102,88%	Rp707.051.471.034	Rp 625.727.978.351	88,50%	11,50%	Rp 81.323.492.683

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.32 diatas terlihat bahwa Capaian Rasio Konektivitas mencapai 102,88% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 88,50%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp81.323.492.683 atau sebesar 11,50% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian Rasio Konektivitas ini termasuk indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Rasio Konektivitas ialah Program Penataan Bangunan Gedung dengan realisasi anggaran sebesar 73,51%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.33
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Rasio Konektivitas

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	71,26	68,81	96,56
2	Indeks Infrastruktur Perhubungan	62,03	57,78	93,15

Dilihat dari tabel 3.31 dan 3.33 diatas terlihat bahwa Capaian Rasio Konektivitas berhasil mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DPUPR dan IKU DISHUB) yang hampir mencapai target, yakni Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (IKU DPUPR) yang capaiannya mencapai 96,56% dan Indeks Infrastruktur Perhubungan (IKU DISHUB) yang capaiannya mencapai 93,15%. Hal ini menunjukkan bahwa IKU DPUPR dan IKU DISHUB tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati indikator Rasio Konektivitas.

1. Faktor Pendorong

Lintas penyeberangan yang beroperasi sudah cukup memadai.

2. Faktor Penghambat

Angkutan jalan baru memenuhi 50% dari kebutuhan. Salah satunya adalah karena keberadaan transportasi online yang dirasa lebih nyaman oleh masyarakat. Tetapi transportasi online tidak memenuhi kriteria sebagai transportasi publik karena tidak termasuk dalam Kategori Angkutan Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang dengan sistem pembayaran dan rute yang tetap. Jika transportasi online diakui sebagai transportasi publik, maka dapat mengurangi jumlah penumpang angkot, bus, dan MRT yang sudah lebih dulu diakui sebagai moda transportasi publik dan menurunkan investasi di sektor transportasi massal.

3. Alternatif Solusi

Untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor tersebut, strategi utama yang harus diterapkan adalah digitalisasi, insentif bagi investor, dan kolaborasi dengan sektor swasta:

- Optimalisasi dan Penyesuaian Trayek Berdasarkan Data Mobilitas: Gunakan big data GPS, survei penumpang, dan analisis pola perjalanan untuk mengetahui rute yang paling dibutuhkan, Sesuaikan trayek angkutan umum agar lebih efisien, mengurangi trayek tumpang tindih, dan menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Tambahkan rute baru atau

perpendek rute kurang produktif berdasarkan permintaan riil Masyarakat;

- Revitalisasi Infrastruktur Jalan dan Halte yang Mendukung Trayek: Perbaiki kondisi jalan di trayek utama agar lebih layak untuk kendaraan umum, Tambahkan halte dan titik naik-turun yang strategis, termasuk di area permukiman baru;
- Skema Insentif dan Regulasi untuk Menarik Operator Baru & Modernisasi Armada: Berikan insentif pajak atau subsidi operasional bagi operator angkutan umum yang membuka trayek baru di daerah yang masih minim layanan, dorong modernisasi angkutan umum dengan kendaraan yang lebih nyaman, ramah lingkungan, dan terjadwal, Atur standar pelayanan minimum untuk memastikan transportasi tetap berkualitas.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja akhir masa RPJMD maka perlu dipertimbangkan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

4. Sasaran Strategis : Tercapainya Universal Akses (Kumuh, Air Bersih, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Domestik)

Indikator Kinerja Sasaran: Capaian Universal Akses

Capaian Universal Akses adalah Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kawasan kumuh.

Tabel 3.34
Capaian Universal Akses

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2030		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
2	3		4	4	5	6	7	8	9	10
Tercapainya Universal Akses (Kumuh, Air Bersih, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Domestik)	Capaian Universal Akses	62,41	70,14	78,02	39,71	50,90%	56,62%	85	46,72%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.34 diatas, Capaian Universal Akses pada tahun 2025 meraih poin sebesar 39,71 poin. Capaian tersebut belum berhasil mencapai target 2025 sebesar 78,02 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 50,90%. Adapun nilai Capaian Universal Akses ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik dan sudah di sesuaikan dengan RPJMD baru. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 62,41 mengalami penurunan sebesar 22,7 poin. Lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 70,14 poin mengalami penurunan hampir setengahnya yaitu sebesar 30,43 poin dengan persentase perbandingan capaian 56,62%. Apabila dibandingkan dengan RPJMD 2021-2026 yaitu 85 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 46,72%. Walaupun capaian 2025 mengalami penurunan dan belum mencapai target, namun karena berubahnya formulasi perhitungan Capaian Universal Akses, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Capaian Universal Akses secara keseluruhan dianggap sudah berhasil mencapai target

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.35
Efisiensi Capaian Universal Akses

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
CAPAIAN UNIVERSAL AKSES	70,14	39,71	56,62%	Rp410.532.437.915	Rp 378.770.058.368	92,26%	7,74%	Rp 31.762.379.547

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.35 diatas terlihat bahwa Capaian **Capaian Universal Akses** mencapai 56,62% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 92,26%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp31.762.379.547 atau sebesar 7,74% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Capaian Universal Akses** ini termasuk indikator yang kurang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berpengaruh terhadap kurang tercapainya efisiensi anggaran Capaian Universal Akses ialah Program Kawasan Permukiman dengan realisasi anggaran sebesar 95,64%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.36
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Capaian Universal Akses

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	74,04	71,44	96,49
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	33,05	6,15	18,61%

Dilihat dari tabel 3.34 dan 3.36 diatas terlihat bahwa Capaian Universal Akses hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator

Kinerja dibawahnya (IKU DPRKP) yang juga hampir berhasil mencapai target, yakni Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang capaiannya mencapai 96,49%. Hal ini menunjukkan bahwa IKU DPRKP tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Capaian Universal Akses.

Selain IKU DPRKP, Dinas Lingkungan Hidup juga turut berkontribusi dalam capaian universal akses yaitu terkait Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP). Capaian IKU terkait pengelolaan sampah yaitu sebesar 18.61%.

1. Faktor Pendorong

Pelaksanaan program perluasan cakupan air bersih, air limbah dan rumah layak huni yang terus dilaksanakan dan menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Karawang serta adanya kolaborasi berbagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan layanan air bersih, air limbah dan rumah layak huni yaitu Pemerintah Pusat maupun instansi swasta.

2. Faktor Penghambat

Komponen perhitungan capaian universal akses yaitu rata-rata capaian akses air minum, sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) dan kumuh. Dalam pelaksanaan layanan ini, yang menjadi faktor penghambat yaitu dalam penanganan air minum dan air limbah belum didasarkan pada data kebutuhan dikarenakan belum adanya database terkait sebaran kebutuhan layanan air minum dan air limbah Kabupaten. Layanan dilaksanakan berdasarkan usulan proposal yang masuk melalui masyarakat maupun perangkat Desa. Selain kendala tersebut, kendala dalam layanan penanganan Kawasan kumuh yaitu terkait masih sulitnya pencegahan kumuh Kembali pada lokasi yang telah diintervensi penataan Kawasan kumuhnya.

3. Alternatif Solusi

- Pendataan kebutuhan sanitasi dan air minum melalui kolaborasi seluruh Dinas terkait (Dinas Kesehatan dan Dinas PRKP)
- Intensifikasi dan ekstensifikasi Program "Bank Limbah Domestik" (BLD) untuk Pengelolaan Limbah Cair dan Padat, Gerakan "Satu Rumah Satu Lubang Biopori", dan "Karawang Bebas Sampah Plastik" – Pengurangan Sampah dari Sumbernya;

- Optimalisasi teknologi digital (kanal aduan lingkungan berbasis aplikasi, Drone untuk Pemantauan Area Luas, Manfaatkan CCTV Lingkungan);
- Peningkatan Peran Stakeholder Lain (Satgas Lingkungan atau Relawan Pengawas, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan NGO dan Sinergi dengan OPD Terkait & Aparat Penegak Hukum);
- Pendekatan Preventif melalui Penguatan Kepatuhan (Penerapan Sistem Insentif & Disinsentif), Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha);
- Pengawasan Berbasis Risiko (Prioritaskan Pengawasan pada Sektor dengan Risiko Tinggi, Gunakan Data untuk Pengawasan Berbasis Prioritas);
- Rotasi & Jadwal Pengawasan yang Fleksibel (inspeksi acak, rotasi pengawasan antar wilayah).

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Karawang sangat berhasil karena Capaian saat ini sudah bisa melampaui bahkan target Akhir RPJMD 2021-2026, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Capaian Universal Akses secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

MISI 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Kapabel.

A. Indikator Kinerja Sasaran: Nilai AKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.37
Nilai AKIP

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Kapabel	Nilai AKIP	66,95	69,5	70,5	67,21	95,33%	96,71%	71,5	94,00%	

Sumber data : Bapperida dan Bag Organisasi Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.37 diatas, Nilai AKIP pada tahun 2025 meraih poin sebesar 67,21 poin. Capaian tersebut belum berhasil mencapai target 2025 sebesar 70,5 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 95,33%. Nilai capaian Nilai AKIP ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 66,95 mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 69,5 mengalami penurunan 5,36 poin dengan persentase tingkat capaian 96,71%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 71,5 poin, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 94%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Nilai AKIP secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.38
Efisiensi Nilai AKIP

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFIISIENSI ANGGARAN	NILAI EFIISIENSI ANGGARAN
NILAI AKIP	70,5	67,21	95,33%	Rp 3.711.362.831.183	Rp 3.333.255.421.411	89,81%	10,19%	Rp 378.107.409.772

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.38 diatas terlihat bahwa Capaian **Nilai AKIP** mencapai 95,33% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 89,81%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp378.107.409.772 atau sebesar 10,19% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Nilai AKIP** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Nilai AKIP ialah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi anggaran sebesar 36,29%.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.39
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Nilai AKIP

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	100%
2	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	22,18	21,62	97,48%
3	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	19,98	19,94	99,80%

Dilihat dari tabel 3.37 dan 3.39 diatas terlihat bahwa Nilai AKIP hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Inspektorat dan IKU Bappeda) yang juga hampir berhasil mencapai target, adapun dari ke 3 IKU dinas tersebut IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Nilai AKIP adalah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan persentase sebesar 100%.

1. Faktor Pendorong

- Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia ;

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, telah diformalkan, telah di reviu, telah Dipublikasikan, dan telah disampaikan tepat waktu;
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Evaluasi Internal Telah dilakukan untuk hampir semua Perangkat Daerah.

2. Faktor Penghambat

- Dokumen Perencanaan kinerja beberapa Perangkat Daerah masih belum memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis,serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
- Perencanaan Kinerja pada Sebagian perangkat daerah belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Dokumen Laporan Kinerja pada sebagian Perangkat Daerah belum memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan nya;
- Keterbatasan Evaluator untuk bisa melakukan review dan Evaluasi untuk Semua Perangkat Daerah.

3. Alternatif Solusi

Menindaklanjuti semua rekomendasi LHE SAKIP Kemenpan RB Tahun 2025.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, Nilai AKIP dapat di kategorikan sudah berhasil. Dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Nilai AKIP secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

B. Indikator Kinerja Sasaran: Opini Audit (Opini BPK)

Data Capaian Opini Audit (Opini BPK) masih belum tersedia karena belum dirilisnya data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tetapi

dari Capaian Tahun 2025 yang mendapatkan WTP bisa terlihat bahwa pengelolaan Keuangan di Kabupaten Karawang sudah sangat Baik.

Tabel 3.40
Opini Audit (Opini BPK)

NO	SASARAN	IKU	TAHUN					Capaian Terhadap RPJMD
			2024	2025			2026	
			Capaian	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Opini audit (Opini BPK)	WTP	WTP	-	-	WTP	-

3. Sasaran Strategis : Terwujudnya Implementasi Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat

A. Indikator Kinerja Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

Survei IKM dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui mutu kinerja pelayanan masing masing unit pelayanan publik secara berkala, dan mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan serta sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik.

Tabel 3.41
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
2	3		4	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Implementasi Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,4	84,88	84,88	86,2	101,56%	101,56%	84,5	102,01%	

Sumber data : Bapperida dan Bag Organisasi Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.41 diatas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 meraih poin sebesar 86,2 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 84,88 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,56%. Nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 83,4 mengalami peningkatan 2,8 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 84,88 mengalami peningkatan 1,32 poin dengan persentase tingkat capaian 101,56%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 84,5 poin, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 102,1%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.42
Efisiensi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84,88	86,02	101,34%	Rp 43.882.316.594	Rp 40.895.600.718	93,19%	6,81%	Rp 2.986.715.876

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.42 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** mencapai 101,34% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 93,19%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp2.986.715.876 atau sebesar 6,81% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Kepuasan Masyarakat ialah Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar 72,09%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.43
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	100%
2	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	22,18	21,62	97,48%

3	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	19,98	19,94	99,80%
---	--	-------	-------	--------

Dilihat dari tabel 3.41 dan 3.43 diatas terlihat bahwa Nilai AKIP hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Inspektorat dan IKU Bappeda) yang juga hampir berhasil mencapai target, adapun dari ke 3 IKU dinas tersebut IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Nilai AKIP adalah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan persentase sebesar 100%.

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 30 SKPD telah menyampaikan laporannya. Terdapat 1 SKPD yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.
2. Dari seluruh SKPD yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

1. Faktor Pendorong

Personel pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas/Kantor/Badan sebagian besar sudah memahami urgensi pengukuran kepuasan masyarakat untuk meningkatkan layanan publik.

2. Faktor Penghambat

Personel pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat pada kecamatan sebagian besar belum memahami urgensi dan tatacara pengukuran kepuasan masyarakat untuk meningkatkan layanan publik.

3. Alternatif Solusi

- Workshop pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat untuk personel Kecamatan;
- Transformasi pengumpulan survey kepuasan masyarakat.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat di kategorikan sudah berhasil. Dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

4. Indikator Kinerja Sasaran: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Tabel 3.44
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2026		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Indeks SPBE	4,38	4,4	4,4	4,4	100,00%	100,00%	4,4	100,00%	

Sumber data : Bapperida dan Diskominfo Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.44 diatas, Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pada tahun 2025 meraih poin sebesar 4,4 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 4,4 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Nilai capaian Indeks SPBE ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 4,38 mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 4,4 tidak mengalami peningkatan dengan persentase tingkat capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 4,4 poin, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 100%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks SPBE secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.45
Efisiensi Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
EFISIENSI INDEKS SPBE	4,4	4,4	100,00%	Rp 43.882.316.594	Rp 40.895.600.718	93,19%	6,81%	Rp 2.986.715.876

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.45 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks SPBE** mencapai 100% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 93,19%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp2.986.715.876 atau sebesar 6,81% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Indeks SPBE** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks SPBE ialah Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar 72,09%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.46
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

NO	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	88	90	102,27%
2	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	1	1	100,00%
3	Indeks Keamanan Informasi	Level III	Level III	100,00%

		s/d III+	s/d III+	
4	Persentase Statistik Sektoral yang diterbitkan	100		

Dilihat dari tabel 3.44 dan 3.46 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)** sudah mencapai target salah satunya adalah karena adanya dukungan dari IKU Perangkat Daerah yakni IKU Diskominfo yang semua IKU nya bisa mencapai lebih dari 100% terutama untuk IKU Presentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang dimana capaiannya mencapai 102%.

1. Faktor Pendorong

Penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan audit masih perlu ditingkatkan dengan pelaksanaan audit oleh pihak eksternal yang bersertifikasi dan independen. Selain itu, masih perlunya penyempurnaan pada dokumen kebijakan terkait manajemen keamanan informasi yang belum terdapat tindak lanjut dari revidi yang dilakukan. Selain itu pada aspek penerapan manajemen khususnya pada indikator penerapan kompetensi sumber daya manusia masih dibutuhkan usaha untuk memenuhi kompetensi diseluruh unsur SPBE.

3. Alternatif Solusi

Peningkatan kualitas penerapan:

- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi ;
- Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
- Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

- Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE ;
- Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK;
- Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan;
- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE;
- Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE;
- Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;
- Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian;
- Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis;
- Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, Indeks SPBE dapat di kategorikan sudah berhasil. Dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Indeks SPBE secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran: Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan

menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.47
Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	29,96	6	6,66	10	150,15%	166,67%	6,66	150,15%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

a. Capaian Kinerja

Dilihat dari Tabel 3.47 diatas, Nilai Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 meraih poin sebesar 10 persen. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 6,66 persen, dengan persentase tingkat capaian sebesar 150,15%. Nilai capaian Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 29,96 mengalami penurunan sebesar 19,96, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 6 persen mengalami peningkatan dengan persentase tingkat capaian 166,67%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yaitu 6,66 persen, dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 150,15%, dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.48
Efisiensi Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,66	10	150,15%	Rp 35.740.666.700	Rp 34.164.308.375	95,59%	4,41%	Rp 1.576.358.325

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.48 diatas terlihat bahwa Capaian **Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum** mencapai 150,15% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 95,59%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp1.576.358.325 atau sebesar 4,41% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum ialah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan realisasi anggaran sebesar 72,09%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.49
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian

				(%)
1	Persentase Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	92%	93%	101%
2	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik berwawasan kebangsaan per tahun	300	300	100,00%

Sumber data : Bappeda Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.47 dan 3.49 diatas terlihat bahwa Capaian Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sudah mencapai target adalah karena adanya dukungan dari IKU Perangkat Daerah yakni IKU Satpol PP dan Badan Kesbangpol yang semua ikunya bisa mencapai lebih dari 100% terutama untuk IKU Persentase Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana capaiannya mencapai 101%.

1. Faktor Pendorong

➤ Partisipasi Aktif Masyarakat

Keterlibatan aktor masyarakat dalam melaporkan berbagai macam kasus gangguan trantibum melalui media sosial dan wadah pelaporan lainnya, sehingga gangguan trantibum dapat dicegah sejak dini;

➤ Peningkatan Kapasitas Personil Pol PP

Pelatihan atau peningkatan kompetensi personel Satpol PP yang telah dilakukan mungkin telah berperan dalam meningkatkan efektivitas operasional penyelenggaraan Trantibum. .

2. Faktor Penghambat

➤ Sumber Daya Terbatas

Jumlah personil Pol PP dibanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Karawang Serta Sarana Prasarana pendukung masih sangat terbatas;

➤ Tantangan Lingkungan atau Sosial

Faktor eksternal seperti meningkatnya aktivitas masyarakat atau konflik sosial tertentu mungkin menyulitkan pengendalian ketertiban;

➤ Kurangnya Data Real-Time

Jika data pengumpulan kasus tidak dilakukan secara real-time atau akurat, ini bisa menjadi hambatan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja di masa depan.

3. Alternatif Solusi

➤ Kegiatan Sosialisasi Masyarakat

Luncurkan kampanye kesadaran untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih terstruktur, sehingga penegakan ketertiban menjadi lebih preventif daripada reaktif;

➤ Pemanfaatan Teknologi

Implementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi (misalnya CCTV atau aplikasi pelaporan online) untuk meningkatkan akurasi data dan respon cepat terhadap pelanggaran;

➤ Evaluasi Berkala dan Pelatihan

Lakukan evaluasi rutin terhadap strategi yang digunakan dan berikan pelatihan berkelanjutan kepada personel untuk menjaga kualitas kinerja.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dapat di kategorikan sudah berhasil. Dengan demikian dikarenakan sudah berakhirnya masa RPJMD 2021-2026 maka indikator Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target.

3.3.2. PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025 BERDASARKAN IKU RPJMD 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karawang **“Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan”** dimana dalam mewujudkan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah menetapkan 5 misi dengan 14 Indikator Kinerja Utama Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati-Wakil

Bupati Karawang Periode 2025-2029. Dari 14 Indikator Kinerja Utama tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Misi 1 : **Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter** dengan IKU :
 - a. Indeks Pendidikan : Sudah Mencapai Target
 - b. **Indeks Kesehatan : Belum Mencapai Target**
 - c. **Indeks Kesejahteraan Sosial : Belum Mencapai Target**
2. Misi 2 : **Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi** dengan IKU :
 - a. Capaian Universal Akses : Sudah Mencapai Target
 - b. **Indeks Konektivitas Wilayah : Belum Mencapai Target**
3. Misi 3 : **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif** dengan IKU :
 - a. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : Sudah Mencapai Target
 - b. **Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) : Belum Mencapai Target**
 - c. **Rasio PDRB Industri Pengolahan : Belum Mencapai Target**
 - d. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB : Sudah Mencapai Target
 - e. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum : Sudah Mencapai Target
 - f. Tingkat Pengangguran Terbuka : Sudah Mencapai Target
4. Misi 4 : **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan** dengan IKU :
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : Sudah Mencapai Target
 - b. **Indeks Resiko Bencana : Belum Mencapai Target**
5. Misi 5 : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif** dengan IKU :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten : Sudah Mencapai Target

Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2025, terdapat 6 IKU (42,8%) belum mencapai target, 8 IKU (57,2%) sudah mencapai target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dapat dilihat pada penjabaran berikut ini :

Misi 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG ADAPTIF DAN BERKARAKTER

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pendidikan

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.50
Indeks Pendidikan

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan	60,69	60,75	61,01	61,64	101,03%	101,47%	62,05	99,34%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.50 diatas, Indeks Pendidikan yang pada tahun 2025 ini berhasil mencapai target yaitu sebesar 61,64 poin. Capaian tersebut berhasil melampaui target 2025 sebesar 61,01 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 60,69 mengalami peningkatan 0,95 poin. Lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 60,75 juga mengalami peningkatan 0,89 poin dengan persentase tingkat capaian 101,47%. Peningkatan nilai capaian Indeks Pendidikan ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena angka yang dicapai sudah mendekati bawah target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 62,05 atau persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD sudah mencapai sekitar 99,34%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Indeks Pendidikan termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target akhir RPJMD di tahun 2029.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.51
Efisiensi Indeks Pendidikan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
INDEKS PENDIDIKAN	61,01	61,64	101,03%	Rp571.005.055.062	Rp 563.747.832.003	98,73%	1,27%	Rp 7.257.223.059

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.51 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Pendidikan** mencapai 101,03% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 98,73%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp7.257.223.059 atau sebesar 1,27% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Pendidikan** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Pendidikan ialah Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,73%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Kinerja

Tabel 3.52
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks pendidikan

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,11	8,31	102,47%
2	Skor Literasi dan Numerasi (IUP)	71,59%	73,14%	102,17%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.50 dan 3.52 diatas terlihat bahwa Capaian Indeks pendidikan berhasil mencapai target, dan hal keberhasilan ini di dorong oleh capaian Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Disdikbud) yakni Rata-rata lama sekolah yang berhasil melebihi target yaitu mencapai 102,47% serta Skor literasi dan numerasi yang juga berhasil melebihi target yaitu mencapai 102,17%.

1. Faktor Pendorong

- Pemerintah Kabupaten Karawang sudah berupaya mengoptimalkan sumber daya berupa peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan *mandatory spending* 20% pendanaan urusan bidang pendidikan dan perbaikan kurikulum serta metode pembelajaran;

- Partisipasi sekolah SD sudah mencapai lebih dari 100% dan Partisipasi sekolah SMP sudah tinggi (92,69%).

2. Faktor Penghambat

- Partisipasi sekolah PAUD (73,43) dan pendidikan kesetaraan masih rendah (45,24%);
- Angka putus sekolah masih tinggi dan angka tidak sekolah tinggi terutama di perkotaan (17.629 orang);
- Penentuan target indeks pendidikan sangat menantang dan belum melihat tren capaian tahun-tahun sebelumnya.

3. Alternatif Solusi

- Kampanye MANFAAT PAUD, Trial Gratis di PAUD, dan Duta PAUD dari Tokoh Masyarakat & Kader Posyandu;
- "Gerakan 100% PAUD Terdaftar" – Pendataan & Legalitas PAUD;
- "PAUD GRATIS untuk Semua" – Skema Subsidi & Kemitraan;
- "PAUD Berkualitas di Setiap Desa" – Standarisasi & Peningkatan Kualitas Layanan;
- Penyusunan "Database Pendidikan Berkelanjutan" – Pelacakan Siswa yang Melanjutkan Sekolah;
- Program Pendidikan Fleksibel untuk Remaja Bekerja atau Menikah Muda;
- Ekstensifikasi Beasiswa Pendidikan Kesetaraan.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas di setiap level capaian indeks pendidikan tidak bisa melebihi target yang diantaranya disebabkan oleh tidak tercapainya target Rata-Rata lama sekolah, untuk itu dirasa perlu untuk dilakukan akselerasi untuk mendorong indeks pendidikan untuk minimal bisa mencapai target pada tahun 2025 ini, dan ini merupakan catatan untuk Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* indeks pendidikan yakni Dinas pendidikan dengan pendampingan Bappeda untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk akselerasi ini.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kesehatan

Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan yang dapat digunakan banyak sekali, tetapi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesehatan terdiri dari variabel mortalitas, morbiditas dan fertilitas.

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.53
Indeks Kesehatan

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	81,38	84,88	86,04	85,49	99,36%	100,72%	90,69	94,27%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.53 diatas, Indeks Kesehatan pada tahun 2025 meraih poin sebesar 85,49 poin. Capaian tersebut hampir mencapai target 2025 sebesar 86,04 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 81,38 mengalami peningkatan 4,11 poin. Lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 84,88 mengalami peningkatan 0,61 poin dengan persentase tingkat capaian 100,72%. Peningkatan nilai capaian Indeks

Kesehatan ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena angka yang dicapai sudah mendekati bawah target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 90,69 atau persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD sudah mencapai sekitar 94,27%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Indeks Kesehatan sudah termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun-tahun selanjutnya serta target akhir RPJMD.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.54
Efisiensi Indeks Kesehatan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
INDEKS KESEHATAN	86,04	85,49	99,36%	Rp542.911.576.705	Rp 507.046.849.091	93,39%	6,61%	Rp 35.864.727.614

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.54 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Kesehatan** mencapai 99,36% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 93,39%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp35.864.727.614 atau sebesar 6,61% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Kesehatan** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Kesehatan ialah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 93,21%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.55

IKU yang menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Indeks Kesehatan

No	Indikator kinerja	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	75,26	75,57	100,41%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.53 dan 3.55 diatas terlihat bahwa Capaian Indeks Kesehatan hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Dinkes) yang justru berhasil mencapai target, yakni Umur Harapan Hidup (UHH) yang capaiannya mencapai 100,41%. hal ini menunjukkan bahwa IKU Dinkes tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati indeks kesehatan.

1. Faktor Pendorong

- Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan urusan Bidang Kesehatan;
- Kebijakan yang mendorong terpenuhinya SPM Kesehatan sudah tersedia;
- Semua Rumah Sakit Rujukan sudah terakreditasi;
- Rata-rata Capaian SPM Kesehatan sudah sangat tinggi yaitu 94,17;
- Meningkatnya persentase perempuan yang menikah di usia matang sehingga menurunkan risiko kematian ibu dan bayi.

2. Faktor Penghambat

Masih ada SPM Kesehatan yang belum mencapai target yaitu layanan kesehatan yaitu:

- Pelayanan kesehatan untuk penduduk berusia 15-59 tahun;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita Hipertensi;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita Diabetes Melitus;
- Pelayanan kesehatan untuk penderita ODGJ;

- Pelayanan kesehatan untuk penderita TBC.

3. Alternatif Solusi

- Kebijakan Internal yang Mendukung Keberlanjutan Posisi, aturan khusus dalam klausul Surat Keputusan penunjukkan personel pelaporan agar tidak mudah berganti-ganti, digitalisasi dan integrasi sistem pelaporan, digitalisasi kampanye pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- Harmonisasi dan Penyelarasan Protokol Skrining-Diagnostik melalui SK Internal atau Revisi SOP, Penggunaan Teknologi Digital untuk Sinkronisasi Data Skrining dan Diagnostik, Pelatihan singkat (mini workshop atau *e-learning*) dan Simulasi Kasus bagi Tenaga Kesehatan tentang Alur Skrining-Diagnostik yang benar;
- Memanfaatkan program Dukcatpil Ada Untukmu (DAU) untuk memberikan identitas kependudukan bagi ODGJ.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, indeks kesehatan hampir mencapai target tahun 2025, dengan demikian diharapkan di tahun-tahun selanjutnya target tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu untuk Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* indeks kesehatan yakni Dinas Kesehatan dengan pendampingan Bapperida untuk segera memformulasikan kembali strategi tahun selanjutnya sehingga target kinerja tahun berikutnya bisa tercapai.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kesejahteraan Sosial

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.56
Indeks Kesejahteraan Sosial

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,84	57,84	48,49	83,83%	85,31%	61,84	78,41%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.56 diatas, Indeks Kesejahteraan Sosial pada tahun 2025 meraih poin sebesar 48,49 poin. Capaian tersebut hampir mencapai target 2025 sebesar 57,84 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 83,83%. Peningkatan nilai capaian Indeks Kesejahteraan Sosial ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 56,84 mengalami penurunan 8,35 poin dengan persentase tingkat capaian 85,31%. Walaupun apabila dibandingkan dengan RPJMD 2025-2029 yaitu 61,84 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 78,41%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Indeks Kesejahteraan Sosial masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun 2026.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.57
Efisiensi Indeks Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL	57,84	48,49	83,83%	Rp 15.201.657.258	Rp 10.520.140.949	69,20%	30,80%	Rp 4.681.516.309

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.57 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Kesejahteraan Sosial** mencapai 83,83% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 69,20%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp4.681.516.309 atau sebesar 30,80% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Kesejahteraan Sosial** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Kesejahteraan Sosial ialah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 63,48%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.58
IKU yang menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Indeks Kesejahteraan Sosial

No	Indikator kinerja	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial tepat sasaran	88,72	85,37	96,22

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.56 dan 3.58 diatas terlihat bahwa Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DINSOS) yang juga hampir berhasil mencapai target, yakni Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial tepat sasaran yang capaiannya mencapai 96,22%. hal ini menunjukan bahwa IKU DINSOS tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati indeks kesejahteraan sosial.

1. Faktor Pendorong

Optimalnya capaian indeks kesejahteraan sosial didukung oleh koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, dukungan ketersediaan data serta proses verifikasi penerima layanan yang semakin baik turut memastikan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran. Pelaksanaan berbagai program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat capaian IKU Dinas Sosial Tahun 2025 adalah terdapat sejumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif sebagai dampak dari proses peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, terdapat pula beberapa bantuan sosial yang belum dapat tersalurkan secara optimal akibat adanya proses peralihan bank penyalur, sehingga memerlukan penyesuaian dalam mekanisme penyaluran kepada para penerima manfaat.

Pada indikator kesejahteraan sosial terdapat salah satu dimensi yang masih menunjukkan capaian relatif rendah, yaitu dimensi peranan sosial dengan capaian Tahun 2025 sebesar 36,77%. Rendahnya capaian pada dimensi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen penilaian, antara lain partisipasi kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat rentan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, keterwakilan masyarakat rentan dalam lembaga legislatif, indeks ketimpangan gender, angka kriminalitas dalam satu tahun, tingkat masyarakat yang mengakses layanan poli jiwa, serta ketersediaan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran serta dan keterlibatan kelompok rentan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

3. Alternatif Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat capaian IKU Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dengan melakukan pemutakhiran dan verifikasi data PPKS secara berkala pasca peralihan basis data dari DTKS ke DTSEN agar data penerima bantuan tetap akurat dan penerima yang memenuhi kriteria dapat kembali diaktifkan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sosial, pemerintah desa/kelurahan, serta pendamping sosial dalam proses sinkronisasi dan validasi data. Dalam rangka mengatasi kendala penyaluran bantuan sosial akibat peralihan bank penyalur, juga dilakukan penyesuaian mekanisme penyaluran melalui pendataan ulang rekening penerima manfaat, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan kepada penerima manfaat agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan kembali secara optimal.

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian dimensi peranan sosial dalam Pencapaian Indikator Kesejahteraan Sosial adalah dengan mendorong peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam berbagai forum perencanaan pembangunan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat rentan agar dapat terlibat dalam organisasi sosial kemasyarakatan serta meningkatkan keterwakilan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kebijakan daerah yang responsif terhadap isu kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental seperti poli jiwa. Melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan peran serta kelompok rentan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat semakin meningkat sehingga capaian dimensi peranan sosial dapat lebih optimal.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, indeks kesejahteraan sosial hampir mencapai target tahun 2025, dengan demikian diharapkan di tahun-tahun selanjutnya

target tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu untuk Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* indeks kesejahteraan sosial yakni Dinas Sosial dengan pendampingan Bapperida untuk segera memformulasikan Target baru tersebut.

Kemudian berkaitan dengan adanya IKU di Level dinas yang tidak tercapai, agar dilakukan peninjauan program kegiatan terutama yang berkaitan dengan target, output dan aktivitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar target kinerja yang sudah ditetapkan bisa tercapai.

Misi 2 : MENDORONG SARANA PRASARANA PELAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TERINTEGRASI

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah

Indikator Sasaran : Capaian Universal Akses

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.59
Capaian Universal Akses

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2030		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Capaian Universal Akses	62,41	70,14	36,68	39,71	108,26%	56,62%	57,94	68,54%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.59 diatas, Capaian Universal Akses pada tahun 2025 meraih poin sebesar 39,71 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai

target 2025 sebesar 36,68 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 108,26%. Tercapainya nilai capaian Capaian Universal Akses ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 62,41 poin mengalami penurunan 22,7 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi 2024 yaitu 70,14 poin mengalami penurunan hampir setengahnya yaitu sebesar 30,43 poin dengan persentase perbandingan capaian 56,62%. Apabila dibandingkan dengan RPJMD 2025-2029 yaitu 57,94 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 68,54%. Walaupun capaian 2025 mengalami penurunan dibanding dengan capaian 2024, namun masih ada harapan karena masih mencapai target 2025. Diharapkan hal ini menunjukkan bahwa tren capaian universal akses masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus stabil dan meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun-tahun selanjutnya serta target RPJMD.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.60
Efisiensi Capaian Universal Akses

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISENSI ANGGARAN	NILAI EFISENSI ANGGARAN
CAPAIAN UNIVERSAL AKSES	36,68	39,71	108,26%	Rp404.231.910.000	Rp 380.806.630.846	94,20%	5,80%	Rp 23.425.279.154

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.60 diatas terlihat bahwa Capaian **Capaian Universal Akses** mencapai 108,26% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 94,20%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp23.425.279.154 atau sebesar 5,80% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Capaian Universal Akses** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Capaian Universal Akses ialah Program Pengembangan Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar 63,99%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.61

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Capaian Universal Akses

No	Indikator kinerja	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	74,04	71,44	96,49
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	33,05	6,15	18,61%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.59 dan 3.61 diatas terlihat bahwa Capaian Universal Akses hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DPRKP) yang juga hampir berhasil mencapai target, yakni Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang capaiannya mencapai 96,49%. Hal ini menunjukan bahwa IKU DPRKP tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Capaian Universal Akses.

Selain IKU DPRKP, Dinas Lingkungan Hidup juga turut berkontribusi dalam capaian universal akses yaitu terkait Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP). Capaian IKU terkait pengelolaan sampah yaitu sebesar 18.61%.

1. Faktor Pendorong

Pelaksanaan program perluasan cakupan air bersih, air limbah dan rumah layak huni yang terus dilaksanakan dan menjadi prioritas Bupati

dan Wakil Bupati Karawang serta adanya kolaborasi berbagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan layanan air bersih, air limbah dan rumah layak huni yaitu Pemerintah Pusat maupun instansi swasta.

2. Faktor Penghambat

Komponen perhitungan capaian universal akses yaitu rata-rata capaian akses air minum, sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) dan kumuh. Dalam pelaksanaan layanan ini, yang menjadi faktor penghambat yaitu dalam penanganan air minum dan air limbah belum didasarkan pada data kebutuhan dikarenakan belum adanya database terkait sebaran kebutuhan layanan air minum dan air limbah Kabupaten. Layanan dilaksanakan berdasarkan usulan proposal yang masuk melalui masyarakat maupun perangkat Desa. Selain kendala tersebut, kendala dalam layanan penanganan Kawasan kumuh yaitu terkait masih sulitnya pencegahan kumuh Kembali pada lokasi yang telah diintervensi penataan Kawasan kumuhnya.

3. Alternatif Solusi

- Pendataan kebutuhan sanitasi dan air minum melalui kolaborasi seluruh Dinas terkait (Dinas Kesehatan dan Dinas PRKP);
- Intensifikasi dan ekstensifikasi Program "Bank Limbah Domestik" (BLD) untuk Pengelolaan Limbah Cair dan Padat, Gerakan "Satu Rumah Satu Lubang Biopori", dan "Karawang Bebas Sampah Plastik" – Pengurangan Sampah dari Sumbernya;
- Optimalisasi teknologi digital (kanal aduan lingkungan berbasis aplikasi, Drone untuk Pemantauan Area Luas, Manfaatkan CCTV Lingkungan);
- Peningkatan Peran Stakeholder Lain (Satgas Lingkungan atau Relawan Pengawas, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan NGO dan Sinergi dengan OPD Terkait & Aparat Penegak Hukum);
- Pendekatan Preventif melalui Penguatan Kepatuhan (Penerapan Sistem Insentif & Disinsentif), Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha);
- Pengawasan Berbasis Risiko (Prioritaskan Pengawasan pada Sektor dengan Risiko Tinggi, Gunakan Data untuk Pengawasan Berbasis Prioritas); dan

- Rotasi & Jadwal Pengawasan yang Fleksibel (inspeksi acak, rotasi pengawasan antar wilayah).

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja, tahun berikutnya maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

Kemudian berkaitan dengan adanya IKU di level dinas yang belum tercapai, agar dilakukan peninjauan program kegiatan terutama yang berkaitan dengan target, output dan aktivitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar target kinerja yang sudah ditetapkan bisa tercapai.

2. Sasaran Strategis : Meningkatkan Konektivitas Wilayah

Indikator Sasaran : Indeks Konektivitas Wilayah

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.62
Indeks Konektivitas Wilayah

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	68,8	73,09	70,47	96,42%	102,43%	88,74	79,41%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.62 diatas, Indeks Konektivitas Wilayah pada tahun 2025 meraih poin sebesar 70,47 poin. Capaian tersebut hampir mencapai target 2025 sebesar 73,09 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,42%. Peningkatan nilai capaian Indeks Konektivitas Wilayah ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 68,8 mengalami peningkatan 1,67 poin dengan persentase tingkat capaian 102,43%. Walaupun apabila dibandingkan dengan RPJMD 2025-2029 yaitu 88,74 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 79,41%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Indeks Konektivitas Wilayah masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun 2026.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.63

Efisiensi Indeks Konektivitas Wilayah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
INDEKS KONEKTIVITAS WILAYAH	73,09	70,47	96,42%	Rp428.882.264.506	Rp 387.358.897.075	90,32%	9,68%	Rp 41.523.367.431

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.65 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Konektivitas Wilayah** hanya mencapai 96,42% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 90,32%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp41.523.367.431 atau sebesar 9,68% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Konektivitas Wilayah** ini termasuk **indikator yang belum bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Konektivitas Wilayah ialah Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi anggaran sebesar 90,08%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.64

IKU yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Indikator kinerja	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	71,26	68,81	96,56
2	Indeks Infrastruktur Perhubungan	62,03	57,78	93,15

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.62 dan 3.64 diatas terlihat bahwa Capaian Indeks Konektivitas Wilayah hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DPUPR dan IKU DISHUB) yang juga hampir mencapai target, yakni Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (IKU DPUPR) yang capaiannya mencapai 96,56% dan Indeks Infrastruktur Perhubungan (IKU DISHUB) yang capaiannya mencapai 93,15%. Hal ini menunjukkan bahwa IKU DPUPR dan IKU DISHUB tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati indeks konektivitas wilayah.

1. Faktor Pendorong

- Dibuatkan pembangunan perlengkapan jalan prioritas sehingga pembangunan bisa terarah;
- Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Terjalannya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, serta masyarakat atau pihak swasta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor Penghambat

- Perlengkapan jalan di bangun di ruas jalan prioritas, berdasarkan hasil kajian oleh konsultan, yang kajian nya dilaksanakan di tahun 2025 sehingga hasil pembangunan perlengkapan jalan yang sudah

dilaksanakan di tahun berjalan tidak semuanya masuk kedalam ruas jalan prioritas karena ada perbedaan pelaksanaan antara hasil kajian pembangunan perlengkapan jalan prioritas dengan perencanaan pembangunan perlengkapan jalan yang dilaksanakan tahun sebelumnya (n-1);

- Keterbatasan Anggaran dan Perubahan Kebijakan Keterbatasan pagu anggaran serta adanya perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- Kendala Sumber Daya Manusia Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pelaksana, termasuk tingginya beban kerja, menghambat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Tingginya beban lalu lintas pada beberapa ruas jalan kabupaten yang mempercepat penurunan kondisi jalan;
- Munculnya kerusakan baru pada beberapa ruas jalan.

3. Alternatif Solusi

- Peningkatan Alokasi dan Optimalisasi Anggaran sehingga capaian kinerja kedepan bisa tercapai;
- Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana di Jalan Prioritas;
- Sumber daya manusia yang memadai karena adanya keterbatasan sumber daya manusia.
- Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten;
- Melaksanakan rekonstruksi dan pelebaran jalan kabupaten.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, indeks konektivitas wilayah hampir mencapai target tahun 2025, dengan demikian diharapkan di tahun-tahun selanjutnya target tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu untuk Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* indeks konektivitas wilayah yakni Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan dengan pendampingan Bapperida untuk segera memformulasikan Target baru tersebut.

Kemudian berkaitan dengan adanya IKU di Level dinas yang tidak tercapai, agar dilakukan peninjauan program kegiatan terutama yang berkaitan dengan target, output dan aktivitas untuk disesuaikan dengan



kebutuhan masyarakat, agar target kinerja yang sudah ditetapkan bisa tercapai.

Misi 3 : MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA IKLIM INVESTASI YANG RAMAH DAN KONDUSIF

1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan

Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.65
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,71	2,36	17,58	744,92%	1028,07%	2,45	717,55%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.65 diatas, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2025 meraih poin sebesar 17,58 poin. Capaian tersebut jauh melebihi target 2025 yang hanya sebesar 2,36 poin, dengan persentase tingkat capaian mencapai sebesar

744,92%. Peningkatan nilai capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sangat besar ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 1,71 poin mengalami peningkatan 15,87 poin dengan persentase tingkat capaian sebesar 1028,07%. Serta apabila dibandingkan dengan RPJMD 2025-2029 yaitu 2,45 poin, capaian 2025 juga sudah jauh melebihi target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai hingga 717,55%. Hal ini menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sudah termasuk indikator yang sangat berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.66
Efisiensi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,36	17,58	744,92%	Rp 22.772.341.600	Rp 12.815.547.502	56,28%	43,72%	Rp 9.956.794.098

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.66 diatas terlihat bahwa Capaian **Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** mencapai 744,92% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 56,28%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp9.956.794.098 atau sebesar 43,72% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** ini termasuk indikator yang sangat bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ialah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar 54,24%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.67

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

No	IKU	2025		
		Target (Ton)	Capaian (Ton)	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	47.222,35	47.231,11	100,02
2	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	57.406,21	57.830	100,74

Dilihat dari tabel 3.65 dan 3.67 diatas terlihat bahwa Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berhasil mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DPKPP) yang juga berhasil mencapai target, yakni Jumlah produksi perikanan budidaya yang capaiannya mencapai 100,02% dan Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang capaiannya mencapai 100,74%. Hal ini menunjukan bahwa IKU DPKPP tersebut merupakan IKU yang sangat berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

1. Faktor Pendorong

- Jumlah armada kapal/perahu penangkapan ikan sebanyak 1.683 unit, dengan jumlah nelayan laut sebanyak 7.830 orang serta PUD sebanyak 1.081 orang

- Luas tambak mencapai 13.411,30 Ha; Kolam sebanyak 957,40 Ha; dan KJA sebanyak 83 unit. Dengan jumlah pembudidaya sebanyak 4.659 orang;
- Pendampingan dan pengawasan sarana Pertanian yang ditingkatkan;
- Pembangunan dan rehabilitasi prasarana Pertanian yang ditingkatkan;
- Distribusi sarana Pertanian (bibit, benih, pupuk, alsintan dan lainnya);
- Pelatihan/ bintek, sekolah lapang terhadap kelompok tani dan penyuluh sebagai penggerak petani;
- Terpenuhinya aspek ketahanan pangan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
- Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

2. Faktor Penghambat

- Kebutuhan alat penangkapan ikan (jaring, pancing, bubu, dll), serta umur alat tangkap yang rata-rata hanya 3-6 bulan;
- Faktor cuaca, terutama cuaca ekstrim yang mengakibatkan gelombang tinggi, sehingga terkadang menjadi penghambat kegiatan penangkapan ikan;
- Tingginya biaya produksi seperti pakan, pupuk, benih, dll;
- Musim/cuaca yang sulit di prediksi, seperti kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan mengakibatkan kesulitan dalam pembudidayaan ikan;
- Adanya serangan hama tikus yang sangat luas (3.228,5 Ha dan banjir di beberapa kecamatan menyebabkan sawah yang sudah tanam harus tanam ulang dan tanaman padi yang akan panen tidak bisa di panen;
- Keluar masuknya ternak besar (sapi, kerbau) berkurang karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku, penyakit LDS (Lumpy Skin Disease) penyakit sejenis penyakit virus cacar yang menyerang ternak sapi dan kerbau.

3. Alternatif Solusi

- Menitik beratkan pada peningkatan indeks panen (IP);
- Menggunakan varietas unggul yang tahan serangan hama/penyakit tanaman, benih bersertifikat, pengembalian kesuburan lahan;
- Memaksimalkan pemanfaatan alat- alat pertanian dengan menggerakkan kelompok tani, kelompok upja yang ada di Kabupaten Karawang;
- Pembuatan lumbung pangan;
- Pengembangan sarana pertanian, pembangunan/rehabilitasi prasarana Pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier dan sumber sumber air lainnya); dan
- Pengembangan peternakan di Kabupaten Karawang.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang jauh melebihi target kinerja 2025 serta target kinerja akhir masa RPJMD maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan

Indikator Sasaran : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.68
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,1	4,2	4,68	89,74%	108,97%	3,42	73,08%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.68 diatas, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) pada tahun 2025 meraih poin sebesar 4,68 poin. Capaian tersebut hampir mencapai target 2025 sebesar 4,2 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 89,74%. Peningkatan nilai capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik apalagi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 5,1 mengalami penurunan 0,42 poin dengan persentase perbandingan capaian 108,97%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan RPJMD 2025-2029 yaitu 3,42 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 73,08%. Namun dengan adanya penurunan dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tren Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun-tahun selanjutnya dan target akhir RPJMD.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.69

Efisiensi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	4,2	4,68	89,74%	Rp 2.136.328.500	Rp 2.022.979.844	94,69%	5,31%	Rp 113.348.656

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.69 diatas terlihat bahwa Capaian **Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)** hanya mencapai 89,74% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 94,69%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp113.348.656 atau sebesar 5,31% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)** ini termasuk indikator yang kurang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berpengaruh terhadap kurang tercapainya efisiensi anggaran Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ialah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 94,69%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.70

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,58	93,90	101,43

Dilihat dari tabel 3.68 dan 3.70 diatas terlihat bahwa Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DPUPR) yang justru berhasil mencapai target, yakni Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (IKU DPKPP) yang capaiannya mencapai 101,43%. Hal ini menunjukan bahwa IKU DPKPP tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap hampir tercapainya IKU Bupati Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

1. Faktor Pendorong

- Surplus ketersediaan pada tanaman padi-padian karena Karawang sebagai salah satu Lumbung Padi Nasional;
- Akses keterjangkauan pangan yang cukup, sehingga ketersediaan pangan terpenuhi.

2. Faktor Penghambat

- Belum masifnya peningkatan produksi lokal untuk memperkuat keberagaman sumber pangan;
- Belum optimalnya distribusi dan penyaluran stok pangan;
- Masih terdapat *Food Lost and Waste*;
- Cuaca ekstrem, hujan dan kekeringan yang berlebihan dapat menyebabkan gagal panen;

- Keterbatasan sarana, keterbatasan akses terhadap air, dan jalan usaha tani dapat menghambat ketahanan pangan;
- Pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang lebih besar daripada kemampuan produksi;
- Keterjangkauan pangan, keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah;
- Harga Pangan, peningkatan harga pangan domestic dapat menyebabkan kerawanan pangan;
- Alih Fungsi lahan, semakin berkurangnya lahan Pertanian akibat alih fungsi lahan dapat mengancam produksi.

3. Alternatif Solusi

- Meningkatkan akses terhadap sarana, air, dan jalan usaha tani;
- Menginmbangi Pertumbuhan penduduk, dengan meningkatkan besar produksi;
- Pemerataan Keterjangkauan pangan masyarakat antar waktu dan antar wilayah;
- Pengendalian harga pangan domestik;
- Pengendalian Alih Fungsi lahan untuk mempertahankan kemampuan Produksi.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, pada semua level baik pada capaian tahunan maupun akhir masa RPJMD terlihat capaian yang masih belum mencapai target hal ini menunjukkan ada permasalahan dalam strategi pencapaian kinerja untuk indikator Indeks oleh karena itu perlu dipertimbangkan oleh Bapperida serta Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali strategi tahun selanjutnya sehingga target kinerja tahun berikutnya bisa tercapai.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal

Indikator Sasaran : Rasio PDRB Industri Pengolahan

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.71
Rasio PDRB Industri Pengolahan

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	69,91	70,78	68,03	96,11%	97,31%	70,59	96,37%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.71 diatas, Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 meraih poin sebesar 68,03 poin. Capaian tersebut belum berhasil mencapai target 2025 sebesar 70,78 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,11%. Penurunan nilai capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 69,91 mengalami penurunan 1,88 poin dengan persentase tingkat capaian 97,31%. Serta apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 70,59 poin, capaian 2025 masih belum melebihi target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan target akhir RPJMD mencapai sekitar 96,37%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Rasio PDRB Industri Pengolahan sudah termasuk indikator yang sangat berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.72
Efisiensi Rasio PDRB Industri Pengolahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN	70,78	68,03	96,11%	Rp 1.187.936.500	Rp 1.120.918.223	94,36%	5,64%	Rp 67.018.277

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.72 diatas terlihat bahwa Capaian **Rasio PDRB Industri Pengolahan** mencapai 96,11% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 94,36%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp67.018.277 atau sebesar 5,64% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Rasio PDRB Industri Pengolahan** ini termasuk **indikator yang sudah bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Rasio PDRB Industri Pengolahan ialah Program Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar 72,09%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.73
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Rasio PDRB Industri Pengolahan

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	4,2	10,35	246,43
2	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar	6,1	5,82	104,81

	Waktu Barang Kebutuhan Pokok (IUP)			
--	------------------------------------	--	--	--

Dilihat dari tabel 3.71 dan 3.73 diatas terlihat bahwa Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan sudah mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DISPERINDAGKOPUKM) yang juga berhasil mencapai target, yakni dari 2 IKU Dinas tersebut menunjukkan bahwa IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Rasio PDRB Industri Pengolahan ialah Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten dengan persentase keberhasilan 246,43%

1. Faktor Pendorong

- Sudah tersedianya Tenaga kerja yang terampil;
- Ketersediaan Infrastruktur Akses jalan yang menyambungkan wilayah antar kawasan industri.
- Sudah terkonsentrasinya industri dalam satu kawasan (seperti Kawasan Industri) yang menciptakan efisiensi melalui berbagi fasilitas dan rantai pasok yang lebih pendek;
- Kabupaten Karawang memiliki daya tarik investasi yang tinggi, dengan berbagai potensi seperti lokasi strategis di dekat Jakarta, infrastruktur yang berkembang, dan aksesibilitas yang baik, termasuk akses ke jalan tol dan pelabuhan. Potensi ini membuat Karawang tetap kompetitif dalam menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Faktor Penghambat

- Investasi di Kabupaten Karawang sebagian besar masih terfokus pada sektor manufaktur dan industri. Ketergantungan pada sektor ini dapat menjadi tantangan apabila terjadi perlambatan ekonomi di sektor terkait. Diversifikasi investasi ke sektor lain seperti pariwisata, teknologi, dan sektor jasa dapat membantu mengurangi risiko dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik di masa depan;
- Rendahnya R&D (Penelitian dan Pengembangan): Minimnya inovasi membuat industri lokal tertinggal dalam menciptakan produk bernilai tambah tinggi, sehingga hanya bermain di produk komoditas rendah.

3. Alternatif Solusi

- Perlu meningkatkan daya saing melalui perbaikan infrastruktur, pemberian insentif, dan kemudahan dalam perizinan untuk menjaga minat investor tetap tinggi.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja 2025 serta target kinerja akhir masa RPJMD maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal

Indikator Sasaran : Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.74

Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	9,81	10,2	10,31	101,08%	105,10%	11,93	86,42%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.74 diatas, Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB pada tahun 2025 meraih poin sebesar 10,31 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 10,2 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,08%. Peningkatan nilai capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 9,81 mengalami peningkatan 0,5 poin dengan persentase tingkat capaian 105,10%. Walaupun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 11,93 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 86,42%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun 2026 dan target akhir RPJMD.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.75

**Efisiensi Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	10,2	10,31	101,08%	Rp 1.187.936.500	Rp 1.120.918.223	94,36%	5,64%	Rp 67.018.277

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.75 diatas terlihat bahwa Capaian **Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan**

Sepeda Motor dalam PDRB mencapai 101,08% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 94,36%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp67.018.277 atau sebesar 5,64% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk **Capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB** ini termasuk **indikator yang sudah bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran **Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB** ialah Program Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar 72,09%.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.76

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	4,2	10,35	246,43
2	Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	69,300	70,776	102,13

Dilihat dari tabel 3.74 dan 3.76 diatas terlihat bahwa Capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB berhasil mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU Disperindagkopukm dan IKU DPMPTSP) yang juga berhasil mencapai target, yakni dari 2 IKU dinas

tersebut IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB ialah Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten dengan persentase keberhasilan sebesar 246,43%.

1. Faktor Pendorong

- Letak geografis kabupaten karawang yang berada pada koridor industri nasional dan dekat dengan pusat ekonomi serta terhubung dengan jaringan transportasi utama, Ketersediaan kawasan industri ;yang terintegrasi, dukungan infrastruktur penunjang industri, dan
- Komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi kondusif melalui penyederhanaan perizinan yang terintegrasi melalui OSS – RBA.

2. Faktor Penghambat

Masih adanya permasalahan teknis lapangan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis sehingga masih diperlukan peningkatan koordinasi dalam penyelesaian hambatan investasi agar dapat berjalan lebih optimal, adapun tantangan lainnya yaitu dinamika kondisi ekonomi global dan nasional yang turut mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan investasi maupun pengembangan usaha.

3. Alternatif Solusi

- Peningkatan koordinasi dalam penyelesaian hambatan investasi agar dapat berjalan lebih optimal;
- Peningkatan kualitas pelayanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja 2025, maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing

Indikator Sasaran : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.77

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,32	1,37	1,4	102,19%	106,06%	1,6	87,50%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.77 diatas, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun 2025 meraih poin sebesar 1,4 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 1,37 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,19%. Peningkatan nilai capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 1,32 mengalami peningkatan 0,08 poin dengan persentase tingkat capaian 106,06%. Walaupun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 1,6 poin, capaian 2025 masih jauh dari target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 87,50%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun 2026 dan target akhir RPJMD.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.78

Efisiensi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM	1,37	1,4	102,19%	Rp 7.801.765.467	Rp 7.019.698.248	89,98%	10,02%	Rp 782.067.219

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.78 diatas terlihat bahwa Capaian **Efisiensi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum** mencapai 102,19% didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai 89,98%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp782.067.219 atau sebesar 10,02% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Efisiensi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum** ini termasuk indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Efisiensi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ialah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar 86,35%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.79

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)

1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	9,27	9,26	99,89
2	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karawang	10,11	10,15	100,40

Dilihat dari tabel 3.77 dan 3.79 diatas terlihat bahwa Capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum berhasil mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DISPARPORA) yang juga berhasil mencapai target, yakni dari 2 IKU dinas tersebut IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ialah Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karawang dengan persentase keberhasilan sebesar 100,40%.

1. Faktor Pendorong

- Bertambahnya anggaran pelatihan pengembangan ekonomi kreatif yang diwujudkan melalui bertambahnya kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif di kabupaten karawang.
- Adanya promosi melalui media cetak, media elektronik, media sosial seperti Instagram, Youtube. Sosial Media Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang selama tahun 2025 juga mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karawang secara masif;
- Dilakukannya promosi secara offline dengan menyelenggarakan berbagai event, melakukan pameran baik tingkat provinsi dan nasional.
- Terlaksananya event-event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

2. Faktor Penghambat

- Belum adanya daerah tujuan wisata, belum adanya wisata unggulan, belum adanya branding city karawang;

- Objek wisata belum memiliki akses jalan memadai, minim transportasi umum ke jalan wisata, sarana penunjang terbatas (lahan parkir toilet dll);
- Banyak destinasi yang dikelola tanpa standar profesional, Promosi pariwisata masih lemah, belum memanfaatkan optimal media digital, Informasi wisata Karawang masih sulit diakses oleh wisatawan;
- Pelaku wisata (pengelola, masyarakat, UMKM) masih minim pelatihan dan pendampingan, Rendahnya kemampuan dalam menciptakan paket wisata terpadu;
- Minimnya investasi swasta dalam pengembangan destinasi maupun fasilitas penunjang, Belum ada sinergi optimal antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

3. Alternatif Solusi

- Perlu dilakukan penguatan pengembangan destinasi wisata unggulan melalui penetapan kawasan prioritas, peningkatan amenities dan atraksi wisata, serta pembangunan citra dan branding destinasi secara terarah guna meningkatkan daya tarik pariwisata daerah;
- Pelestarian cagar budaya dan nilai tradisional perlu ditingkatkan melalui inventarisasi, perlindungan, pemeliharaan, serta pemanfaatan cagar budaya sebagai sarana edukasi, wisata sejarah, dan penguatan karakter budaya lokal.
- Promosi pariwisata dan kebudayaan perlu diarahkan pada strategi digital marketing terpadu melalui penguatan branding daerah, pengembangan konten kreatif digital, optimalisasi media sosial resmi, serta penyediaan pusat informasi wisata berbasis digital;
- Pengembangan sektor ekonomi kreatif perlu diperkuat melalui peningkatan pemasaran produk kreatif, fasilitasi pameran dan promosi, pembentukan ekosistem kreatif daerah, serta pengembangan pusat kreatif sebagai ruang kolaborasi pelaku ekonomi kreatif.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja 2025, maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan

Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

6. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi

Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka

Kesempatan kerja merupakan parameter penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mempengaruhi sisi supply dan demand untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada sisi demand, perlu diupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu menyerap tenaga kerja. Pada sisi supply, perlu ditekan laju pertumbuhan angkatan kerja. Pada elemen laju pertumbuhan angkatan kerja, terkait didalamnya soal laju pertumbuhan penduduk, maka pada sisi supply, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami. Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.80
Tingkat Pengangguran Terbuka

NO	SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD
			2023	2024	2025				2030	
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,68	8,04	8,04	7,99	100,63%	100,63%	7,61 - 8,32	95,24% - 104,13%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.80 diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2025 ini berhasil mencapai target yaitu sebesar 7,99% yang merupakan penurunan sebesar 0,05% poin dibandingkan dengan target 2025 sebesar 8,04% dengan persentase tingkat capaian 100,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 10,68 mengalami penurunan 2,69%, lalu jika dibandingkan dengan realisasi 2024 yaitu 8,04% juga mengalami penurunan 0,05% yaitu dengan persentase tingkat capaian 100,63%. Penurunan persentase TPT ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena angka yang dicapai sudah mendekati bawah target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 7,61-8,32 atau persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD sudah mencapai sekitar 95,24% - 104,13%. Apabila dibandingkan capaian Kabupaten Karawang 2025 masih lebih tinggi capaian Jawa Barat 2025 yang sudah mencapai 6,77, persentase capaian Karawang hanya 84,73% jika dibandingkan dengan capaian Jawa Barat tahun 2025.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.81

Efisiensi Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFSIENSI ANGGARAN	NILAI EFSIENSI ANGGARAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	8,04	7,99	100,63%	Rp 406.711.200	Rp 290.934.300	71,53%	28,47%	Rp 115.776.900

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.81 diatas terlihat bahwa Capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 100,63% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 71,53%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp115.776.900 atau sebesar 28,47% dari total anggaran. apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Tingkat Pengangguran Terbuka ialah Program Penempatan Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar 71,53%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.82

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Tingkat Pengangguran Terbuka

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan ditempatkan	74,65	72,92	97,68
2	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	80,32	97,13	120,93

Dilihat dari tabel 3.80 dan 3.82 diatas terlihat bahwa Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka hampir mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU DISNAKERTRANS) yang juga hampir mencapai target da nada yang berhasil mencapai target, yakni Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan ditempatkan yang capaiannya mencapai 97,68% dan Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja yang capaiannya mencapai 120,93%. Hal ini menunjukan bahwa IKU DISNAKERTRANS tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Tingkat Pengangguran Terbuka ialah Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja.

1. Faktor Pendorong

- Pengelolaan Pendidikan, dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan, penyediaan akses biaya pendidikan melalui beasiswa, serta peningkatan mutu dan manajemen pendidikan;
- Penempatan Tenaga Kerja, dengan peningkatan pelayanan informasi pasar kerja termasuk layanan informasi pasar kerja online, optimalisasi mekanisme antar kerja lokal, antar kerja antar daerah (AKL/ AKAD) serta penyelenggaraan kegiatan tenaga kerja mandiri;
- Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan pada 12 kejuruan dan MOU dengan perusahaan untuk pelatihan dan pemagangan;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa seperti pelatihan sekolah lapang, penguatan kelompok tani, penguatan ekonomi petani;
- Pemberdayaan UMKM melalui, Sinergitas Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Program Pengembangan Usaha Mikro dengan pemberian bantuan alat pada UMKM;
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan fasilitasi Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih;
- Program pemberdayaan pelaku seni dengan pelatihan, pemberian alat kesenian dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;

- Program pengembangan kapasitas nelayan, dengan Pelaksanaan Diklat Basic Safety Training Fisheries II (BST-F II) dan Kecakapan Nelayan.

2. Faktor Penghambat

- Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi masih rendah (45% dari jumlah tenaga kerja keseluruhan);
- Persentase tenaga kerja yang ditempatkan masih rendah (47,89% dari jumlah pencaker terdaftar sebanyak 33.191 orang).

3. Alternatif Solusi

- Penguatan Pendidikan Vokasi melalui kurikulum berbasis industri, meningkatkan kerja sama magang dan pelatihan langsung (siswa dengan Perusahaan, Balai Latihan Kerja, dunia usaha, dan platform digital untuk memberikan kursus keterampilan), Pelatihan dan Sertifikasi untuk Lulusan SMA/SMK, membentuk *Career Center* di sekolah dan di tingkat kabupaten yang menyediakan pendampingan kerja, informasi lowongan, serta pelatihan interview dan CV, Mendorong Wirausaha Muda melalui inkubasi bisnis dan akses modal usaha bagi lulusan SMA/SMK untuk membangun usaha kecil berbasis lokal, Transformasi Mindset melalui Kampanye bahwa bekerja tidak hanya berarti menjadi pegawai, tetapi bisa dengan *freelance*, digital business, dan usaha mandiri;
- Peningkatan efektifitas seleksi calon peserta pelatihan agar tepat sasaran misalnya calon peserta diambil dari jumlah pencaker terdaftar yang belum ditempatkan;
- Peningkatan kualitas pelaksanaan subkeg untuk membiayai aktivitas yang berkontribusi langsung terhadap perluasan cakupan layanan untuk meningkatkan angka tenaga kerja yang kompeten;

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil mencapai target tahun 2025, dengan demikian diharapkan di tahun-tahun selanjutnya target tersebut menjadi standar dan target tahun selanjutnya dapat ditingkatkan kembali. Oleh karena itu untuk Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* indeks konektivitas wilayah yakni Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dengan pendampingan Bapperida untuk segera memformulasikan Target baru tersebut.

Misi 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Indonesia berada dalam kategori baik, sedang atau buruk. pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah: Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025

dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.83
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,4	50,34	44,53	59,4	133,39%	118,00%	45,7	129,98%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.83 diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 meraih poin sebesar 59,4 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 44,53 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 133,39%. Peningkatan nilai capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 51,4 mengalami peningkatan 8 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 50,34 mengalami peningkatan 9,06 poin dengan persentase tingkat capaian 118%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 45,7 poin, capaian 2025 sudah jauh melebihi target akhir RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 129,98%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup termasuk indikator yang sangat berhasil mencapai target.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.84
Efisiensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	44,53	59,4	133,39%	Rp 78.891.106.175	Rp 57.527.409.697	72,92%	27,08%	Rp 21.363.696.478

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.84 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** mencapai 133,39% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 72,92%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp21.363.696.478 atau sebesar 27,08% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** ini termasuk **indikator yang sangat bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ialah Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran sebesar 71,80%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.85
IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Air	64,76	69,00	106,55
2	Indeks Kualitas Udara	21,56	57,30	265,77
3	Indeks Kualitas Lahan	52,26	52,42	100,31

Dilihat dari tabel 3.83 dan 3.85 diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bisa mencapai target karena adanya dukungan pencapaian IKU dari Dinas Lingkungan Hidup, dimana dari tiga IKU Dinas Lingkungan Hidup yang paling berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Udara yang capaiannya lebih dari 265,77%.

1. Faktor Pendorong

- Kualitas udara meningkat;
- Komitmen seluruh stake holder dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala;
- Mekanisme pengawasan baik langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program lingkungan;
- Kerjasama dengan sektor pendidikan dan komunitas lingkungan memperkuat kampanye dan aksi nyata.

2. Faktor Penghambat

- Kualitas air menurun;
- Kualitas tutupan lahan menurun.

3. Alternatif Solusi

- Intensifikasi dan ekstensifikasi Program "Bank Limbah Domestik" (BLD) untuk Pengelolaan Limbah Cair dan Padat, Gerakan "Satu Rumah Satu Lubang Biopori", dan "Karawang Bebas Sampah Plastik " – Pengurangan Sampah dari Sumbernya;
- Optimalisasi teknologi digital (kanal aduan lingkungan berbasis aplikasi, Drone untuk Pemantauan Area Luas, Manfaatkan CCTV Lingkungan);
- Peningkatan Peran Stakeholder Lain (Satgas Lingkungan atau Relawan Pengawas, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan NGO dan Sinergi dengan OPD Terkait & Aparat Penegak Hukum);

- Pendekatan Preventif melalui Penguatan Kepatuhan (Penerapan Sistem Insentif & Disinsentif), Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha);
- Pengawasan Berbasis Risiko (Prioritaskan Pengawasan pada Sektor dengan Risiko Tinggi, Gunakan Data untuk Pengawasan Berbasis Prioritas);
- Rotasi & Jadwal Pengawasan yang Fleksibel (inspeksi acak, rotasi pengawasan antar wilayah).

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja akhir masa RPJMD maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

2. Sasaran Strategis : Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten

Indikator Sasaran : Indeks Risiko Bencana

Penghitungan Indeks Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.86
Indeks Risiko Bencana

SASARAN	IKU	TAHUN							Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025
		2023	2024	2025				2029		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	152,32	142,06	142,06	147,42	96,36%	96,36%	142,02	96,34%	

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.86 diatas, Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 meraih poin sebesar 147,42 poin. Capaian tersebut hampir mencapai target 2025 sebesar 142,06 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,36%. Peningkatan nilai capaian Indeks Risiko Bencana ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 152,32 mengalami penurunan 4,9 poin, lalu jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 142,06 mengalami penurunan 5,36 poin dengan persentase tingkat capaian 96,36%. Walaupun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 142,02 poin, capaian 2025 masih jauh dari target akhir RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD baru mencapai sekitar 96,34%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Indeks Risiko Bencana masih termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang mendekati target tahun 2026 dan target akhir RPJMD.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.87
Efisiensi Indeks Risiko Bencana

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
INDEKS RISIKO BENCANA	142,06	147,42	96,36%	Rp 4.952.455.120	Rp 3.691.985.865	74,55%	25,45%	Rp 1.260.469.255

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.87 diatas terlihat bahwa Capaian **Indeks Risiko Bencana** mencapai 96,36% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 74,55%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp1.260.469.255 atau sebesar 25,45% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Indeks Risiko Bencana** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien**.

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Indeks Risiko Bencana ialah Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 74,55%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.88

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Indeks Risiko Bencana

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,48	0,55	114,58
2	Persentase pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran	100%	100%	100,00

Dilihat dari tabel 3.86 dan 3.88 diatas terlihat bahwa Indeks Risiko Bencana bisa mencapai target karena adanya dukungan pencapaian IKU dari BPBD, dimana dari dua IKU BPBD yang paling berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian Indeks Risiko Bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang capaiannya lebih dari 114,58%.

1. Faktor Pendorong

- Selesainya penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
- Pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang semakin baik;
- Regulasi-regulasi baru dibidang kebencanaan yang memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat

- Pengadaan barang/Jasa yang Kompleks sehingga di perlukan perencanaan pengadaan yang sangat detail, di mulai dari proses identifikasi kebutuhan, penyusunan persyaratan Spesifikasi Teknis, serta penyusunan perkiraan harga. Dan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit memerlukan data dan Informasi yang sangat Kompleks dan/atau di mungkinkan untuk dapat melibatkan tenaga ahli di dalamnya;
- Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2025 banyak dari kegiatan program prioritas tidak memperoleh anggaran.

3. Alternatif Solusi

- Perlu dilakukan penambahan personil sesuai kebutuhan dalam rangka percepatan pelayanan penanganan bencana;
- Perlunya inovasi untuk kelanjutan Program/ Kegiatan di tahun 2025 karena sudah tertuang dalam Rencana Strategis dan RPJMD (2021-2026);
- Perlunya anggaran yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana pada program yang direncanakan ditahun berikutnya untuk melanjutkan sisa target yang telah ditetapkan.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, Indeks Risiko Bencana hampir mencapai target tahun 2025, dengan demikian diharapkan di tahun-tahun selanjutnya target tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu untuk Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* indeks risiko bencana yakni BPBD dengan pendampingan Bapperida untuk segera memformulasikan Target baru tersebut.

Misi 5 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF

1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan

Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja membandingkan data realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2024; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target 2025; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD; realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kab/kota lain/provinsi/nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.89

Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

SASARAN	IKU	TAHUN						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2029			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,29	73,5	77,01	104,78%	105,08%	74,5	103,37%		0,00%

Sumber data : Bapperida Kab. Karawang

Dilihat dari Tabel 3.89 diatas, Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten pada tahun 2025 meraih poin sebesar 77,01 poin. Capaian tersebut berhasil mencapai target 2025 sebesar 73,5 poin, dengan persentase tingkat capaian sebesar 104,78%. Peningkatan nilai capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik karena jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 73,29 mengalami peningkatan 3,81 poin dengan persentase tingkat capaian 105,08%. Begitu juga apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu 74,5 poin, capaian 2025 sudah melampaui target RPJMD dengan persentase perbandingan capaian 2025 dengan RPJMD mencapai sekitar 103,37%. Hal ini menunjukkan bahwa tren Nilai Reformasi Birokrasi



General Kabupaten termasuk positif dan diharapkan bisa terus meningkat di tahun mendatang.

b. Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.90

Efisiensi Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	NILAI EFISIENSI ANGGARAN
Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,5	77,01	104,78%	Rp 2.817.867.379.446	Rp 2.508.423.546.270	89,02%	10,98%	Rp 309.443.833.176

Sumber data : Bapperida dan BPKAD Kab. Karawang

Dilihat dari tabel 3.90 diatas terlihat bahwa Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten mencapai 104,78% didukung dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 89,02%, dengan efisiensi yang di dapat sebesar Rp30943.833.176 atau sebesar 10,98% dari total anggaran. Apabila melihat hasil perbandingan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa untuk Capaian **Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten** ini termasuk **indikator yang bisa mempergunakan sumber daya dengan efisien.**

Adapun program yang paling berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten ialah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 70,42%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.91

IKU yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

No	IKU	2025		
		Target	Capaian	Tingkat

				Capaian (%)
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	70,5	92,69	131,48

Dilihat dari tabel 3.89 dan 3.91 diatas terlihat bahwa Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten berhasil mencapai target, hal ini di dukung oleh Indikator Kinerja dibawahnya (IKU SETDA) yang juga berhasil mencapai target. Hal ini menunjukan bahwa IKU SETDA tersebut merupakan IKU yang paling berkontribusi terhadap tercapainya IKU Bupati Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten.

1. Faktor Pendorong

- Penambahan jumlah fungsional pengelola PBJ dari CPNS;
- Meningkatnya sebagian besar komponen pendukung RB General seperti kearsipan dan indeks Kualitas Kebijakan.

2. Faktor Penghambat

- Adanya perubahan indikator penilaian, kurangnya kepedulian OPD untuk input data e-kontrak, penyelesaian paket E-Pengadaan Langsung, penyelesaian paket e-Purchasing dan Pencatatan Pengadaan non e-PL dan non e-Purchasing;
- Adanya beberapa komponen yang belum mencapai kategori Baik seperti strategi Pembangunan ZI dll.

3. Alternatif Solusi

- Menindaklanjuti Catatan dan Rekomendasi pada LKE RB Tahun 2025.

d. Rekomendasi Kebijakan

Melihat capaian diatas, dengan telah dicapainya kinerja yang melebihi target kinerja akhir masa RPJMD maka perlu dipertimbangkan oleh Bapperida dan Perangkat Daerah pengampu kinerja untuk memformulasikan kembali target tahun selanjutnya yakni minimal menetapkan target sesuai capaian tahun 2025.

3.4. REALISASI ANGGARAN

3.4.1. REALISASI ANGGARAN VISI DAN MISI KABUPATEN

Akuntabilitas sebagai Pengambil Keputusan (dalam Pemerintahan, Swasta, dan Kelompok Masyarakat) harus mampu menjawab kepada publik dan juga kepada target Pemerintahan itu sendiri, untuk mewujudkan *Good Governance* akuntabilitas Keuangan Negara merupakan kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of fund*), dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah sampai terwujud *Good Governance*. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara tersebut, membutuhkan komitmen, integritas, dan kompetensi manajerial dan teknis dalam penataan keuangan negara khususnya, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Konsep Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan kebebasan media. Aplikasi Akuntabilitas atau bertanggung-jawab/bertanggung-gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).

Pada tabel dibawah ini dapat terlihat bagaimana Penggunaan Keuangan (Anggaran) mencapai sasaran Visi Misi Kabupaten Tahun 2024, apakah efektif dan efisien atau sebaliknya.

Tabel 3.92
CAPAIAN KINERJA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD 2021-2026

MISI I	: TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET



1	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	INDEKS KESEHATAN		84,98
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp575,409,258,205	Rp539,199,225,808	93,71
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN DAN LITERASI	INDEKS PENDIDIKAN		62,45
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp593,681,056,210	584,220,961,305	98,41
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
3	MENINGKATNYA PENGARUSUTAM AAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)		91,98
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp3,567,044,800	Rp3,319,051,269	93,05
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
4	MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA BELI MASYARAKAT SERTA PEMBERIAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)		8,04
		INDEKS PURCHASING POWER PARITY (PPP)		78,02
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp57,376,592,764	Rp47,564,239,841	82,90



MISI II : TERWUJUDNYA EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING SERTA BERBASIS PADA POTENSI LOKAL				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1	MENINGKATNYA AKTIVITAS PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN DALAM PDRB		4,9
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp36,848,904,860	Rp25,545,557,474	69,33
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	TERWUJUDNYA DESTINASI PARIWISATA YANG BERDAYA SAING DAN UNGGUL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD		10,48
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp35,676,334,508	Rp34,508,918,988	96,73
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
3	MENINGKATNYA KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI	PERTUMBUHAN KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM PDRB		2,78
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp2,695,981,592	Rp2,490,116,200	92,36
MISI III : TERWUJUDNYA TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP YANG AMAN, NYAMAN DAN MENDUKUNG PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARAWANG	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)		48,13
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE



JUMLAH		Rp 103,964,776,975	Rp 81,221,944,594	78,12
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	MENINGKATNYA UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA MELALUI ADAPTASI DAN MITIGASI	INDEKS RESIKO BENCANA		174,1
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp16,834,959,520	Rp14,485,116,702	86,04
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
3	MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH	RASIO KONEKTIVITAS		0,685
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp707,051,471,034	Rp625,727,978,351	88,50
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
4	TERCAPAINYA UNIVERSAL AKSES (KUMUH, AIR BERSIH, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH DOMESTIK)	CAPAIAN UNIVERSAL AKSES		78,02
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp410,532,437,915	Rp378,770,058,368	92,26
MISI IV	: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
5	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN	NILAI AKIP		70,5
		OPINI AUDIT (OPINI BPK)		WTP

	KAPABEL			
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp3,711,362,831,183.00	Rp3,333,255,421,411.00	89,81
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1	TERWUJUDNYA IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		84,88
		INDEKS SPBE (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)		4,40
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp43,882,316,594	Rp40,895,600,718	93,19
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,66
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp35,740,666,700	Rp34,164,308,375	95,59
JUMLAH TOTAL		Rp6,334,624,632,860	Rp5,745,368,499,404	90,7

Dari tabel diatas, Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Karawang Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 masuk dalam kategori sangat berhasil, dimana persentase realisasi anggaran mencapai Rata-rata diatas 90,7%.

Tabel 3.93
CAPAIAN KINERJA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD 2025-2029

MISI I : MEMBANGUN SDM YANG ADAPTIF DAN BERKARAKTER			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN	INDEKS PENDIDIKAN	61,01



	PENDIDIKAN			
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp571,005,055,062	563.747.832.003	98,73
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KESEHATAN		86,04
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp542,911,576,705	Rp507,046,849,091	93,39
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
3	MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MATERIAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL MASYARAKAT	INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL		57,84
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp15,201,657,258	Rp10,520,140,949	69,20
MISI II	: MENDORONG SARANA PRASARANA PELAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG TERINTEGRASI			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1	MENINGKATKAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	CAPAIAN UNIVERSAL AKSES		36,68
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp404,231,910,000	Rp380,806,630,846	94,20
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	MENINGKATKAN KONEKTIVITAS WILAYAH	INDEKS KONEKTIVITAS WILAYAH		73,09
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp428,882,264,506	Rp387,358,879,075	90,32
MISI III	: MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA IKLIM INVESTASI YANG RAMAH DAN KONDISIF			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET



1	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN GUNA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN		2,36
		PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)		4,2
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp24,908,670,100	Rp14,838,527,346	59,57
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN YANG BERBASIS PADA POTENSI LOKAL	RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN		70,78
		PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR DALAM PDRB		10,2
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp1,187,936,500	Rp1,120,918,223	94,36
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
3	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PARIWISATA YANG BERDAYA SAING	RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM		1,37
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp7,801,765,467	Rp7,019,698,248	89,98
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
4	MENINGKATNYA KEMAMPUAN MASYARAKAT DI PASAR KERJA UNTUK TERSERAP DALAM KEGIATAN EKONOMI	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)		8,04
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH		Rp406,711,200	Rp290,934,300	71,53
MISI IV	: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		44,53
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp78,891,106,175.00	Rp57,527,409,697.00	72,92
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
2	MENURUNNYA RISIKO BENCANA DI TINGKAT KABUPATEN	INDEKS RISIKO BENCANA		142,06
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp4,952,455,120.00	Rp3,691,985,865.00	74,55
MISI V	: MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAHAN	NILAI REFORMASI BIROKRASI GENERAL KABUPATEN		73,5
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	JUMLAH	Rp2,817,867,379,446	Rp2,508,423,546,270	89,02
	JUMLAH TOTAL	Rp4,898,248,487,539	Rp3,878,645,519,910	79,18

Dari tabel diatas, Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Karawang Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 masuk dalam kategori kurang berhasil, dimana persentase realisasi anggaran hanya mencapai 79,18%

3.4.2. REALISASI ANGGARAN APBD KABUPATEN KARAWANG

3.4.2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Anggaran Kinerja APBD berdasarkan urusan Pemerintah Kabupaten Karawang. Anggaran kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp5.671.796.212.832,00 atau 96,25 persen dari anggaran sebesar Rp5.893.001.421.196,00 tersebar pada 14 SKPD yang mengelola pendapatan dari 60 SKPD yang ada di Kabupaten Karawang.

Tabel 3.94
Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	PENDAPATAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Perikanan	730.000.000,00	1.053.915.008,00	144,37
Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.000.000.000,00	52.301.417.733,00	116,23
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.200.000.000,00	14.779.110.615,00	111,96
Dinas Kesehatan	381.567.209.729,00	385.824.544.534,00	101,12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.581.578.079,00	4.583.445.536,00	100,04
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.651.113.017.008,00	3.538.607.172.127,00	96,92
Badan Pendapatan Daerah	1.770.135.321.380,00	1.655.033.619.159,00	93,50
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	696.590.000,00	637.310.000,00	91,49
Dinas Lingkungan Hidup	18.820.000.000,00	15.157.707.370,00	80,54
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	590.000.000,00	451.801.250,00	76,58
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.274.675.000,00	2.676.131.500,00	62,60
Dinas Perhubungan	1.694.160.000,00	584.318.000,00	34,49
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	258.120.000,00	75.720.000,00	29,34

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	340.750.000,00	30.000.000,00	8,80
JUMLAH	5.893.001.421.196,00	5.671.796.212.832,00	96,25

Sumber : LRA Per SKPD Tahun 2025

Realisasi ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Karawang yang berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi bentuk tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan merupakan Anggaran Pendapatan pada setiap SKPD;
2. Realisasi Pendapatan terbesar yaitu 144,37% meskipun masih terdapat beberapa dinas yang belum mencapai target;
3. Capaian 5 (lima) terendah realisasi pendapatan per SKPD adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk Belanja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga terdapat 60 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp6.353.560.752.074,00 dan terealisasi sebesar Rp5.764.197.433.299,00 atau 90,72 persen. Rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.95
Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD

(dalam rupiah)

NO	SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.570.018.882.331,00	1.515.010.566.946,00	96,50
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	43.347.191.937,00	41.320.006.687,00	95,32
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.537.653.682,00	25.959.712.429,00	94,27
4	Dinas Kesehatan	1.279.220.329.943,00	1.179.637.048.131,00	92,22



NO	SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.166.414.762,00	23.909.701.751,00	91,38
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	440.176.672.721,00	400.846.148.775,00	91,06
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.980.060.600,00	15.394.392.703,00	90,66
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	877.964.036.172,00	794.441.070.873,00	90,49
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31.491.904.861,00	28.393.357.773,00	90,16
10	Dinas Perhubungan	61.816.244.024,00	54.964.359.285,00	88,92
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.929.169.281,00	25.673.143.353,00	88,74
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	24.025.195.664,00	21.251.098.405,00	88,45
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	732.265.863.763,00	647.259.797.050,00	88,39
14	Sekretariat DPRD	118.671.420.791,00	103.748.562.969,00	87,43
15	Inspektorat	36.431.131.375,00	31.824.687.697,00	87,36
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	53.402.882.950,00	46.570.060.697,00	87,21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.586.134.983,00	30.147.244.531,00	87,17
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.202.420.470,00	9.534.079.538,00	85,11
19	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	223.066.818.400,00	188.567.620.550,00	84,53
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.119.578.447,00	16.770.758.550,00	83,36
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.753.853.070,00	23.064.569.999,00	83,10
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.128.007.490,00	27.413.469.320,00	82,75
23	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13.495.780.408,00	11.162.520.975,00	82,71
24	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.894.355.847,00	14.736.312.339,00	82,35
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.545.571.830,00	18.228.926.661,00	80,85
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	84.893.843.332,00	68.454.231.123,00	80,64
27	Badan Pendapatan Daerah	144.068.177.216,00	115.731.495.065,00	80,33

NO	SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
28	Dinas Lingkungan Hidup	120.694.783.975,00	95.574.074.393,00	79,19
29	Dinas Perikanan	20.101.682.351,00	15.584.928.127,00	77,53
30	Dinas Sosial	37.741.684.318,00	28.341.770.348,00	75,09
31	Kecamatan	173.823.005.080,00	144.681.716.256,00	83,24
	JUMLAH	6.353.560.752.074,00	5.764.197.433.299,00	90,72

Sumber : LRA Per SKPD Tahun 2024

Adapun rincian dari poin 31 pada Tabel 3.97 diatas merupakan realisasi belanja dari total 30 SKPD Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.96
Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Khusus Kecamatan
(dalam rupiah)

NO	SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Kecamatan Rengasdengklok	5.326.545.325,00	4.704.243.968,00	88,32
2	Kecamatan Tirtajaya	4.669.440.512,00	4.115.088.111,00	88,13
3	Kecamatan Telukjambe Barat	5.066.439.700,00	4.455.871.485,00	87,95
4	Kecamatan Tegalwaru	4.145.718.361,00	3.628.835.337,00	87,53
5	Kecamatan Pedes	4.416.313.054,00	3.863.752.538,00	87,49
6	Kecamatan Tempuran	4.994.647.129,00	4.365.263.184,00	87,40
7	Kecamatan Jatisari	5.861.297.440,00	5.077.356.960,00	86,63
8	Kecamatan Kutawaluya	4.495.858.700,00	3.888.459.145,00	86,49
9	Kecamatan Cibuaya	4.337.386.380,00	3.726.352.384,00	85,91
10	Kecamatan Cilamaya Kulon	4.705.591.287,00	4.035.476.258,00	85,76
11	Kecamatan Jayakarta	4.295.076.765,00	3.671.226.398,00	85,48
12	Kecamatan Karawang Timur	16.007.989.815,00	13.623.158.248,00	85,10
13	Kecamatan Banyusari	3.822.023.603,00	3.209.284.089,00	83,97

NO	SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
14	Kecamatan Kota Baru	4.706.075.390,00	3.932.406.819,00	83,56
15	Kecamatan Telagasari	4.393.009.000,00	3.662.515.975,00	83,37
16	Kecamatan Karawang Barat	30.163.463.504,00	25.141.906.532,00	83,35
17	Kecamatan Batujaya	3.971.663.300,00	3.295.885.186,00	82,99
18	Kecamatan Cilamaya Wetan	4.522.820.900,00	3.706.132.385,00	81,94
19	Kecamatan Lemahabang	4.262.140.987,00	3.489.328.537,00	81,87
20	Kecamatan Ciampel	3.935.588.772,00	3.217.572.088,00	81,76
21	Kecamatan Klari	5.449.708.913,00	4.430.537.377,00	81,30
22	Kecamatan Majalaya	4.661.377.611,00	3.767.774.662,00	80,83
23	Kecamatan Purwasari	4.700.742.974,00	3.774.275.526,00	80,29
24	Kecamatan Rawamerta	4.570.072.160,00	3.597.100.954,00	78,71
25	Kecamatan Tirtamulya	4.241.900.800,00	3.334.811.049,00	78,62
26	Kecamatan Pangkalan	3.871.967.504,00	3.035.269.086,00	78,39
27	Kecamatan Cikampek	4.747.792.280,00	3.692.625.059,00	77,78
28	Kecamatan Pakisjaya	4.237.793.600,00	3.260.529.950,00	76,94
29	Kecamatan Cilebar	4.258.605.820,00	3.264.048.899,00	76,65
30	Kecamatan Telukjambe Timur	4.983.953.494,00	3.714.628.067,00	74,53
	JUMLAH	173.823.005.080,00	144.681.716.256,00	83,24

Sumber : LRA Per SKPD Tahun 2025

3.4.2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

1. Penjelasan terkait capaian Anggaran Pendapatan

Penjelasan terkait capaian anggaran kinerja pendapatan selama tahun 2025 ada beberapa SKPD pencapaiannya rendah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Anggaran pendapatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp340.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 8,80 persen, pendapatan yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa tempat yang menjadi pendapatan daerah adalah Stadion Singaperbangsa, GOR Panatayuda, GOR Sport Hall Adiarsa dan Lapangan Karangnpawitan.
- 2) Tiga dari tempat penarikan retribusi tersebut yaitu Stadion Singaperbangsa, GOR Panatayuda dan Lapangan Karangnpawitan pada tahun 2025 sedang ada rehabilitasi.
- 3) Penarikan retribusi sesuai dengan penyeteroran pemakaian sesuai keadaan.

b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp258.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.720.000,00 atau 29,34 persen, pendapatan yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rusunawa Adiarsa memiliki 80 unit hunian dalam 4 Lantai. Saat ini yang terisi 21 unit, kosong 59 unit. Kurangnya tingkat hunian dikarenakan kondisi sarana, prasarana dan infrastruktur Rusunawa Adiarsa banyak yang rusak dan kurang layak huni, salah satunya karena usia bangunan Rusunawa sudah 19 tahun sejak pertama di bangun (dibangun tahun 2004), sehingga masyarakat kurang berminat menempatinnya.
- 2) Rusunawa Walahar memiliki 78 unit hunian dalam 10 blok. Saat ini yang terisi 46 unit, kosong 32 unit. Kurangnya tingkat hunian Rusunawa Walahar dikarenakan kondisi sarana, prasarana dan infrastruktur banyak yang rusak dan kurang layak huni, usia bangunan Rusunawa sudah 25 tahun sejak pertama di bangun (di bangun tahun 1998), sehingga masyarakat kurang berminat menempatinnya.
- 3) Berdasarkan data pekerjaan warga, Rusunawa Adiarsa 96% penghuni adalah pekerja informal, sedangkan Rusunawa Walahar

80% pekerja informal (buruh tidak tetap, tukang parkir, tenaga serabutan, dll).

- 4) Salah satu kendala utama dari menurunnya realisasi pendapatan Rusunawa Adiarsa dan Rusunawa Walahar Tahun 2025 adalah pendapatan para penghuni Rusunawa yang bulannya tidak menentu, sehingga untuk pembayaran sewa bulanan dari para penghuni banyak yang tidak lancar.
- 5) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA 2025 memiliki dua mobil penyedotan kakus, yang sudah berjalan secara optimal hanya satu mobil penyedotan kakus. Dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan terampil sehingga mobil penyedotan kakus lainnya belum berjalan secara optimal.
- 6) Selain itu kendala dalam realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus belum ada Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja untuk membuang limbah hasil penyedotan kakus

c. Dinas Perhubungan

Anggaran pendapatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.694.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp584.318.000,00 atau 34,49 persen, pendapatan yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1) Terminal

a) Kondisi fasilitas yang belum memadai

Kondisi fisik kios dan fasilitas pendukung terminal Cikampek dinilai masih memerlukan banyak perbaikan. Kurangnya kenyamanan ini membuat daya Tarik kios menurun bagi penyewa dan pedagang, yang berdampak langsung pada kelancaran pembayaran retribusi.

b) Penataan Kawasan yang belum kunjung diselesaikan

Kawasan Cikampek secara umum masih menghadapi masalah kemacetan parah dan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang belum teratur, sehingga menyebabkan akses konsumen ke area kios terminal terhambat, sehingga omset pedagang menurun dan mereka kesulitan memenuhi

kewajiban retribusi kios dan termasuk juga penataan pasar yang belum kunjung selesai serta semrawut dan kumuh.

c) Belum optimalnya sistem pembayaran dan pemungutan

Sistem pemungutan retribusi yang masih bersifat konvensional di beberapa titik terminal menyebabkan potensi pendapatan tidak tergali. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan penegakan aturan yang lebih tegas.

2) Perparkiran

Realisasi pendapatan sektor perparkiran Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penentuan target belum sepenuhnya didasarkan pada perhitungan riil potensi di lapangan, sehingga terdapat selisih antara target dan kemampuan realisasi aktual. Selain itu, tingkat kepatuhan pengelola parkir, khususnya pihak ketiga dalam melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama belum optimal, terutama terkait konsistensi dan ketepatan penyeteroran. Penerimaan parkir juga bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh volume kendaraan dan aktivitas masyarakat setiap harinya, sehingga besaran setoran tidak tetap dan berdampak pada capaian akhir.

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggaran pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.274.675.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.676.131.500,00 atau 62,60 persen, pendapatan yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Disperindag Kabupaten Karawang TA 2025 sebesar 62,60% dari target perubahan Rp. 4.274.675.000,- yaitu Rp.2.676.131.500,-;
- 2) Bahwa target tersebut terdiri dari kontribusi pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BOT) dan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang;

- 3) Bahwa rincian target Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a) Pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan realisasi sebesar 68,06% dari target perubahan Rp. 1.229.675.000,- yaitu Rp836.961.500,-
 - b) Kontribusi pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BOT) dengan realisasi 60,40% dari target perubahan Rp. 3.045.000.000,- yaitu Rp1.839.170.000,-
- 4) Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karawang seperti banyaknya kios dan los yang kosong dan persaingan bisnis online serta infrastruktur pasar yang kurang memadai menghambat tercapainya target Pendapatan Asli Daerah TA 2025 (data terlampir);
- 5) Bahwa realisasi pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BOT) sebesar 60,40% untuk Pasar Johar Karawang dan Pasar Proklamasi Rengasdengklok target kontribusi tahun 2025 tercapai Sedangkan Pasar Cilamaya, Pasar Cikampek I dan Pasar Cikampek II (Plaza) untuk penagihan kewajiban kontribusi sudah diterbitkan Surat Kuasa Khusus Bupati Karawang kepada Kejaksaan Negeri Karawang selaku Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan mediasi dan segala sesuatu yang dianggap perlu kepada pasar tersebut. Hal ini sesuai dengan penyelesaian pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BOT) sesuai dengan roadmap Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.485-Huk/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Roadmap dan Strategi Penyelesaian Permasalahan Kerjasama Pasar yang Komprehensif dan Terukur Kabupaten Karawang Tahun 2023-2026.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Anggaran pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp590.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp451.801.250,00 atau 76,58 persen, pendapatan yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa tempat yang menjadi Pendapatan Daerah adalah Destinasi Wisata Alam mencakup Pantai Sedani, Pantai Samudra Baru, Pantai Tanjung Pakis dan Curug Cigentis, Destinasi Wisata Religi mencakup Maqom Syekh Quro, dan aset daerah Kampung Budaya;
- 2) Bahwa terdapat penghapusan/pembebasan retribusi pada beberapa objek wisata alam khususnya Pantai Sedari, akibat terdampak bencana alam banjir rob serta adanya perbaikan sarana dan prasarana destinasi wisata, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penenimaan retribusi. Surat permohonan dan destinasi wisata dlampirkan (Retribusi Pantai Sedari per tahun 2025 sebesar Rp120.416.000,00 sudah mencapai 96,33% dari target Rp25.000.000,00)
- 3) Bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Pantai Samudra Baru belum dapat dilanjutkan karena belum adanya kejelasan legalitas lahan serta belum terpenuhinya dukungan pelayanan pariwisata berupa fasilitasi sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah, sehingga berdampak pada belumn optimalnya pemungutan retribusi. (Retribusi Pantai Samudera Baru per tatun 2025 sebesar Rp23.680.000,00 sudah mencapai 94.72% dan target Rp25.000.000,00)
- 4) Bahwa PKS pengelolaan Curug Cigentis tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.6/MENHUT/SET JEN/KUM.02/7/2025 tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan dalam Kawasan Hutan yang Tidak Dikenakan Pungutan Pajak/Retribusi Daerah, sehingga penenimaan retribusi dari objek tersebut tidak dapat dioptimalkan. Surat pemberitahuan dan surat edaran dilampirkan. (Retnbusi Curug Cigentis per tahun 2025 sebesar Rp43.234.000, sudah mencapai 61 76% dart target Rp70.000.000)
- 5) Bahwa penetapan target anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2025 dinilai relatif terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk keterbatasan regulasi, legalitas

lahan, serta kesiapan sarana dan prasarana pada beberapa destinasi wisata

- 6) Meskipun realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, secara nominal tetap menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2025.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan perolehan retribusi melalui pemanfaatan aset lahan milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) dengan melakukan kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak ketiga (lahan di Kampung Budaya, Desa Sedari, Desa Tanjung Baru, dan Kecamatan Tegalwaru);
- 2) Evaluasi dan penyesuaian target pendapatan berdasarkan potensi riil serta kondisi aktual di lapangan agar lebih terukur dan realistis.

Dengan mempertimbangkan faktor kendala regulasi, kondisi alam, aspek

1. legalitas, keterbatasan sarana prasarana, serta penetapan target yang relatif tinggi, maka rendahnya realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 lebih disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan perencanaan target yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi aktual. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, realisasi pendapatan tetap menunjukkan upaya optimalisasi dan menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target serta strategi peningkatan pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Penjelasan terkait capaian Anggaran Belanja

Terdapat 5 (lima) SKPD yang persentase realisasi belanjanya dibawah 90% dari Anggaran, sebagai berikut:

a. Kecamatan Telukjambe Timur

Anggaran belanja Kecamatan Telukjambe Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.983.953.494,00 dengan realisasi

sebesar Rp3.714.628.067,00 atau 74,53 persen, serapan belanja yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang hanya terserap 72,82% yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan Penghasilan pegawai ASN karena ada jabatan struktural yang kosong dan hanya diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt. Camat dan Sekretaris Camat yang kosong) terhitung mulai Bulan Januari 2025 untuk Camat dan Oktober 2025 untuk Sekretaris Camat. Serta Plt Camat berganti hingga 3 kali dalam setahun.
- 2) Serapan anggaran pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang hanya terserap 83,95% karena dilakukan efisiensi sehingga penggunaan belanja penyediaan alat rumah tangga dan penyediaan jasa surat menyurat serta pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
- 3) Serapan pada kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan hanya 16,82 % kami tidak melaksanakan dikarenakan jumlah kuota peserta sidang isbat tidak mencukupi dengan ketentuan dan kami tidak masukan kedalam perubahan anggaran, karena waktu yang mepet dilaksanakan di triwulan III. Begitu juga Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan hanya 76,05% ada beberapa kegiatan PHBN dan PHBI yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi dan situasi mengingat penghematan anggaran.
- 4) Serapan Anggaran pada kegiatan tersebut diatas berdampak signifikan terhadap anggaran keseluruhan sehingga realisasi belanja tahun Anggaran 2025 pada SKPD Kecamatan Telukjambe Timur hanya mencapai 74,53%.

b. Dinas Sosial

Anggaran belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp37.741.684.318,00 dengan realisasi sebesar Rp28.341.770.348,00 atau 75,09 persen, serapan belanja yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang hanya terserap 77,22% yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN karena ada Jabatan Struktural yang kosong.
- 2) Pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar hanya terserap 55,70% dikarenakan Persyaratan anak penerima bantuan terdaftar pada DTSEN dan hanya ada 41 LKSA yang mengikuti tahapan sampai dengan pencairan, sisa 14 LKSA yang tidak mengikuti tahapan bantuan sosial.
- 3) Pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan hanya terserap 56,71 % dikarenakan Honor SDM PKH tidak bisa dicairkan karena diangkat menjadi PPPK di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- 4) Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar hanya terserap 1,81 % dikarenakan Pengkajian Lahan Sekolah Rakyat masih dalam proses di DPUPR sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

c. Kecamatan Cilebar

Anggaran belanja Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.258.605.820,00 dengan realisasi sebesar Rp3.264.048.899,00 atau 76,65 persen, serapan belanja yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN rendah karena ada beberapa jabatan yang kosong sehingga serapan anggarannya kurang diantaranya, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi Kessos dan Kasubag UPP.
- 2) Belanja tagihan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor rendah karena pada belanja tagihan listrik serapan sudah memenuhi biaya listrik 12 bulan namun pagu anggaran yang tersedia lebih besar dari serapannya, dan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor tidak terserapnya anggaran dikarenakan ada 1 orang tenaga jasa pelayanan umum kantor yang meninggal dunia.

- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan serapannya rendah karena tidak terserapnya anggaran BBM dikarenakan ada beberapa jabatan yang kosong.
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat serapannya rendah karena kegiatan HUT Karawang tidak dilaksanakan.
- 5) Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serapannya rendah karena pagu anggaran untuk sewa kendaraan dari kegiatan Simponi lebih besar dari yang diserapnya.

d. Kecamatan Pakisjaya

Anggaran belanja Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.237.793.600,00 dengan realisasi sebesar Rp3.260.529.950,00 atau 76,94 persen, serapan belanja yang rendah disebabkan adanya jabatan yang kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt) yaitu Camat Pakisjaya adri bulan Januari-Juli 2025 serta jabatan kosong yaitu Kasi PMD dari bulan September – Desember 2025.

e. Dinas Perikanan

Anggaran belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.101.682.351,00 dengan realisasi sebesar Rp15.584.928.127,00 atau 77,53 persen, serapan belanja yang rendah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bidang Perikanan Budidaya

- a) Terdapat tagging sumber penganggaran yang dimasukan dalam sumber anggaran DBHCHT yaitu sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dari pagu anggaran Rp. 1.159.705.500,- dengan tagging DBHCHT Rp682.231.400,- dan sub kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pembudidaya ikan di darat dengan pagu anggaran Rp. 304.700.000,- dengan tagging DBHCHT Rp283.664.000,-;

- b) Berdasarkan laporan hasil reviu dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Karawang No Surat: 700/210/LHR/R.VII/Inspt-Irbani/2025 Tanggal 11 Juli 2025 dimana penerima manfaat belum sesuai sebagaimana PMK Nomor 72 Tahun 2024.
- 2) Bidang Sekretariat
 - a) Terdapat pegawai yang cuti sakit berdasarkan rekomendasi dari Dinas atas nama H.Asep Saepi, S.M sejak Juli - 23 Desember 2025;
 - b) Terdapat pegawai yang tugas belajar sehingga berdasarkan peraturan Bupati Karawang untuk TPP 2025 pasal 21 yang bersangkutan tidak diberikan tpp atas nama Aruma Hamida terhitung sejak tpp bulan Oktober 2025;
 - c) Terdapat pegawai yang cuti melahirkan sejak Desember 2024 – Februari 2025 sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan tpp full hanya 50% atas nama Desti Rachmawati;
 - d) Untuk gaji dan tpp dianggarkan full setahun 14 bulan untuk semua jabatan eselon IVB-eselon 2 (Kepala Dinas) meski jabatan struktural tersebut kosong sebagaimana SOTK yang masih berlaku saat itu jabatan yang kosong meliputi Kepala Dinas, Kepala TU UPTD BBI, Kepala UPTD BBI, Kepala seksi/subkoor bidang DSP dan Perikanan Tangkap, Kasubag/Subkoor keuangan dan kasubag umum dan kepegawaian yang seharusnya ada 16 pegawai hanya berisi 8 sisa 8 jabatan kosong namun tetap dianggarkan di gaji dan tpp full setahun 14 bulan;
 - e) Untuk anggaran pajak PPh pegawai juga masih menggunakan 2 sistem yaitu pajak final dan pajak TER pada gaji/tpp ke 13 dan 14 sehingga besaran juga berbeda jadi berdampak pula pada anggaran pajak PPh yang dianggarkan.



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Karawang kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026 serta RPJMD 2025-2029. Tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026 pengukuran terdiri dari 6 Tujuan dan 14 Sasaran serta pada RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 pengukuran terdiri dari 6 Tujuan dan 12 Sasaran.

Laporan ini memberikan gambaran atas segenap upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dilihat dari nilai pencapaian kinerja dari 6 tujuan dan 14 sasaran strategis indikator kinerja Utama Bupati Karawang sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati-Wakil Bupati Karawang Periode 2021-2026 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Misi 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan IKU:
 - a. Indeks Kesehatan : Sudah mencapai target
 - b. **Indeks Pendidikan : Belum mencapai target**
 - c. **Indeks Pembangunan Gender : N/A**

- d. Tingkat Pengangguran Terbuka : Sudah mencapai target
- e. Indeks Purchasing Power Parity : Sudah mencapai target
- 2. Misi 2 Terwujudnya ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing Serta Berbasis Pada Potensi Lokal dengan IKU:
 - a. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Dalam PDRB : Sudah mencapai target
 - b. **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD : Belum mencapai target**
 - c. Pertumbuhan Kontribusi Perindustrian Pengolahan Dalam PDRB : Sudah mencapai target
- 3. Misi 3 Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan Yang Berkesinambungan Dengan IKU:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : Sudah mencapai target
 - b. Indeks Resiko Bencana : Sudah Mencapai Target
 - c. Rasio Konektivitas : Sudah mencapai target
 - d. **Capaian Universal Akses : Belum mencapai target**
- 4. Misi 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dengan IKU:
 - a. **Nilai SAKIP : Belum mencapai target**
 - b. **Opini Audit (Opini BPK) : N/A**
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Sudah mencapai target
 - d. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) : Sudah mencapai target
 - e. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Sudah mencapai target

Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2025, terdapat 4 IKU (23,53%) belum mencapai target, 2 IKU (11,76%) belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang berwenang, 11 IKU (64,7%) sudah mencapai target.

Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran berdasarkan APBD pada tahun anggaran 2025, belanja Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp6.334.624.632.860 dan sampai dengan Desember 2025 dapat terealisasi Rp5.745.368.499.404 atau mencapai 90,7%

Selanjutnya dilihat juga dari nilai pencapaian kinerja dari 6 tujuan dan 12 sasaran strategis indikator kinerja Utama Bupati Karawang sebagai ukuran

keberhasilan pencapaian visi misi Bupati-Wakil Bupati Karawang 2025 sesuai dengan RPJMD 2025-2029 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Misi 1 : **Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter** dengan IKU :
 - a. Indeks Pendidikan : Sudah Mencapai Target
 - b. Indeks Kesehatan : Belum Mencapai Target**
 - c. Indeks Kesejahteraan Sosial : Belum Mencapai Target**
2. Misi 2 : **Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi** dengan IKU :
 - a. Capaian Universal Akses : Sudah Mencapai Target
 - b. Indeks Konektivitas Wilayah : Belum Mencapai Target**
3. Misi 3 : **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif** dengan IKU :
 - a. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : Sudah Mencapai Target
 - b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) : Belum Mencapai Target**
 - c. Rasio PDRB Industri Pengolahan : Belum Mencapai Target**
 - d. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB : Sudah Mencapai Target
 - e. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum : Sudah Mencapai Target
 - f. Tingkat Pengangguran Terbuka : Sudah Mencapai Target
4. Misi 4 : **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan** dengan IKU :
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : Sudah Mencapai Target
 - b. Indeks Resiko Bencana : Belum Mencapai Target**
5. Misi 5 : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif** dengan IKU :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten : Sudah Mencapai Target

Sebagai kesimpulan pencapaian misi tahun 2025, terdapat 6 IKU (42,8%) belum mencapai target, 8 IKU (57,2%) sudah mencapai target.

Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran berdasarkan APBD pada tahun anggaran 2025, belanja Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp4.898.248.487.539 dan sampai dengan Desember 2025 dapat terealisasi Rp3.878.645.519.910 atau mencapai 79,18%.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan- tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Karawang.

Kami menyadari bahwa walaupun pencapaian berdasarkan sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 sudah menunjukkan capaian sangat berhasil, namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang, diantaranya Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 yang diharapkan mengubah Kinerja Kabupaten Karawang menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini telah semaksimal mungkin mengikuti Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yakni pembuatan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Eselon 2, 3 serta 4, kemudian dibuatkan juga Cascading dan Pohon Kinerja perangkat daerah dan kabupaten dan telah di *upload* ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-SAKIP.

Akhirnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Karawang, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.